

INDIKATOR STRATEGIS PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TIMUR
2025



INDIKATOR STRATEGIS

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2025

Jumlah Halaman : Ixii+108 halaman

Naskah:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Desain Cover dan Layout:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Ilustrator:

<https://www.freepik.com>

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung jawab

Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penulis dan Penyunting

H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si.

Ika Wahyuni, S.E.

Untung Maryono, S.T., M.M.

Nazarruddin, S.Kom.

Nadia Paramitha Nazmah, S.T.

Pengolah Data

Hari Adam Suharto

Irfan Fadil, S.Stat.

Rizmalani Syawitri, S.Sos.

Desain Sampul dan Tata Letak

Febri Irawan, S.E.

Eka Indah Justisiani, S.I.Kom.

Vebi Regina, S.E.

Penerbit

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Redaksi

Bidang Statistik

Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.

Website : <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>

Email : diskominfo@kaltimprov.go.id

Telp/Fax: 0541-731963

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Indikator strategis Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat global, penggunaan indikator strategis telah menjadi landasan yang kritis dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan mengukur progres menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Buku Indikator Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan kumpulan beberapa indikator penting mengenai kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan dan ketenagakerjaan. Dengan adanya perbandingan indikator ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan Provinsi Kalimantan Timur dari beberapa aspek.

Diharapkan publikasi ini dengan analisis mendalam dapat membantu pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Buku ini tersaji dalam bentuk infografis beserta analisis mendalam terkait indikator Kependudukan, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi, Indeks Harga Konsumen - Inflasi, Ekspor - Impor, Perkembangan Pariwisata, Pendapatan Domestik Regional Bruto, Nilai Tukar Petani, Perhubungan dan Infrastruktur, Perdagangan, Industri, Koperasi dan Modal, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemilihan dan penyusunan indikator strategis ini. Kami berharap semoga buku ini memberikan andil dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua

Samarinda, September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

H.M FAISAL, S.Sos., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xi
Kependudukan	3
Ketenagakerjaan.....	11
Kemiskinan	17
Indeks Pembangunan Manusia.....	25
Indeks Demokrasi Indonesia.....	35
Indeks Harga Konsumen-Inflasi	43
Ekspor Impor	49
Perkembangan Pariwisata	57
Pendapatan Domestik Regional Bruto	63
Nilai Tukar Petani.....	73
Perhubungan dan Infrastruktur	81
Perdagangan, Industri, Koperasi dan Modal	87
Pertanian dan Ketahanan Pangan	93
Penutup	107

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2024	3
Tabel 1.2	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, Semester II Tahun 2024	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk menurut Wajib KTP di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024	12
Tabel 2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2024	13
Tabel 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2024	13
Tabel 3.2	Garis Kemiskinan menurut Perkotaan/Perdesaan (Rp/kapita/bulan), Maret 2020-Maret 2024.....	20
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur (ribu orang), 2021-2024.....	20
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Miskin (PO) menurut Perkotaan/Perdesaan (Persen), 2020-2024	21
Tabel 3.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Perkotaan/Perdesaan 2020-2024	21
Tabel 3.5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Perkotaan/Perdesaan, 2020-2024	23
Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (UHH SP 2010), 2018-2024.....	31
Tabel 4.2	Harapan Lama Sekolah Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024.....	32
Tabel 4.3	Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu Rupiah/Perkapita/Tahun, 2018-2024.....	32
Tabel 5.1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Menurut Indikator, 2021-2024	38
Tabel 6.1	Inflasi Tahunan Menurut Kota Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023	45

Tabel 6.2	Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2022	46
Tabel 6.3	Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2023	46
Tabel 6.4	Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2024	47
Tabel 6.5	Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2025	47
Tabel 7.1	Nilai FOB, Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Kalimantan Timur, 2015-2024....	51
Tabel 7.2	Nilai Impor Provinsi Kalimantan Timur (Juta USD) 2015-2024.....	53
Tabel 7.3	Neraca Pembayaran Provinsi Kalimantan Timur (Juta USD) 2015-2024.....	56
Tabel 8.1	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara per Bulan dengan Provinsi Tujuan Kalimantan Timur, 2021-2024.....	62
Tabel 8.2	Rata-rata Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Asal Tamu (hari), 2024.....	63
Tabel 8.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2024	64
Tabel 8.4	Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Klasifikasi Bintang (persen), 2024.....	65
Tabel 9.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah) 2024-2025.....	72
Tabel 9.2	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2024	74
Tabel 9.3	PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2020-2024	76
Tabel 9.4	PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2020-2024	77
Tabel 10.1	Rata-rata Nilai Tukar Petani dan Perubahannya Menurut Subsektor di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024 (2018=100).....	81
Tabel 11.1	Panjang Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Status Jalan (km), 2024	93
Tabel 11.2	Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenisnya, 2021-2024.....	95
Tabel 11.3	Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2024.....	96
Tabel 11.4	Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Domestik di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2025	97
Tabel 12.1	Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024.....	103
Tabel 12.1	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman	

	Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024	104
Tabel 13.1	Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota (Ton) 2019-2024.....	109
Tabel 13.2	Produksi Sayur- sayuran Semusim, 2021-2024.....	113
Tabel 13.3	Produksi Buah-Buahan Tahunan, 2021-2024	114
Tabel 13.4	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota (ton) di Provinsi Kalimantan Timur, 2024	116
Tabel 13.5	Produksi Daging dan Telur dari Beberapa Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2024 (Ton)	117
Tabel 13.6	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (rupiah), 2024.....	119
Tabel 13.7	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, 2024.....	121

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur (ribu orang), 2018-2024..... 11

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024.....27

Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi , 2024.....28

Gambar 4.3 Umur Harapan Hidup(Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2018-202429

Gambar 4.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2018-202429

Gambar 4.5 Pengeluaran Riil Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur (000 rupiah/perkapita/tahun), 202430

Gambar 4.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 202431

Gambar 5.1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024.....37

Gambar 5.2 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Menurut Aspek, 2022-202439

Gambar 5.3 Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi , 2024.....40

Gambar 10.1 Nilai Tukar Petani Sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024.....82

Gambar 10.2 Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024.....85

Gambar 10.3 Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, 2020-202488

Gambar 12.1 Banyaknya Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020..... 101

Gambar 12.2 Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 102

KEPENDUDUKAN

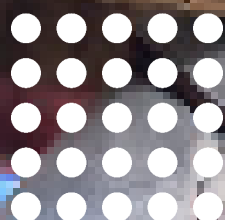
4.007.736

Penduduk kaltim (semester2/2023)





× × × × × × × × × × × × × × × ×



1. Kependudukan

Berdasarkan data dalam tabel, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, total penduduk Kalimantan Timur tercatat sebanyak 3.849.832 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 4.007.736 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 4.123.303 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sekitar 90–120 ribu jiwa per tahun. Pertumbuhan ini menandakan adanya dinamika demografis yang cukup aktif di Kalimantan Timur, baik akibat pertumbuhan alami (kelahiran lebih tinggi daripada kematian) maupun

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	288.225	296.582	303.424	309.667
Kutai Barat	170.871	175.610	180.119	186.581
Kutai Kartanegara	753.862	778.096	788.113	806.964
Kutai Timur	424.743	425.787	429.640	448.850
Berau	263.150	272.887	280.998	299.005
Penajam Paser Utara	186.801	191.967	196.566	202.067
Mahakam Ulu	35.274	37.318	38.498	39.715
Kota Balikpapan	710.293	727.665	738.532	757.418
Kota Samarinda	831.220	849.717	861.878	881.225
Kota Bontang	185.393	186.137	189.968	191.811
Kalimantan Timur	3.849.832	3.941.766	4.007.736	4.123.303

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

karena faktor migrasi, terutama migrasi masuk seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Jika dilihat lebih rinci per kabupaten/kota, terdapat variasi tingkat pertumbuhan penduduk di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar sepanjang periode 2021–2024 adalah Kutai Kartanegara. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 753.862 jiwa, dan terus meningkat menjadi 806.264 jiwa pada tahun 2024. Kutai Kartanegara menjadi pusat pertumbuhan

penduduk tertinggi karena merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan, energi, dan industri pengolahan. Selain itu, posisinya yang strategis di antara kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan menjadikannya kawasan yang menarik bagi urbanisasi dan investasi.

Di posisi kedua terdapat Kota Samarinda, ibu kota provinsi, dengan jumlah penduduk 831.220 jiwa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 884.376 jiwa pada tahun 2024. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Samarinda menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah. Kenaikan jumlah penduduk di Samarinda cenderung stabil dengan pertumbuhan sekitar 15–20 ribu jiwa per tahun. Hal ini juga menunjukkan urbanisasi yang terus terjadi di wilayah perkotaan utama Kalimantan Timur. Samarinda bukan hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat pendidikan dan jasa, yang memperkuat perannya dalam struktur demografis provinsi.

Sementara itu, Kota Balikpapan menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk 710.293 jiwa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 757.418 jiwa pada tahun 2024. Sebagai kota industri dan pelabuhan utama, Balikpapan memiliki daya tarik tinggi bagi tenaga kerja profesional maupun pekerja teknis. Pertumbuhan penduduk di Balikpapan menggambarkan aktivitas ekonomi yang dinamis, terutama karena kota ini juga menjadi salah satu gerbang utama menuju ibu kota negara (IKN) yang sedang dikembangkan di kawasan Penajam Paser Utara. Dampak pembangunan IKN kemungkinan besar ikut mendorong peningkatan jumlah penduduk di kota ini dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk Kabupaten Kutai Timur, jumlah penduduk meningkat dari 424.743 jiwa pada tahun 2021 menjadi 448.850 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil di daerah dengan basis ekonomi perkebunan dan pertambangan. Demikian pula Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari 230.150 jiwa menjadi 249.905 jiwa dalam periode yang sama. Wilayah Berau yang dikenal dengan potensi pariwisata dan sumber daya alam juga menarik bagi penduduk pendatang, meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih kecil dibandingkan wilayah-wilayah industri besar.

Di sisi lain, Kabupaten Paser juga memperlihatkan tren kenaikan jumlah penduduk dari 288.225 jiwa pada tahun 2021 menjadi 309.667 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini memperlihatkan adanya pertumbuhan yang cukup stabil dan dapat dikaitkan dengan posisinya yang strategis di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta kedekatannya dengan kawasan pembangunan ibu kota negara. Kabupaten

Kutai Barat juga menunjukkan peningkatan dari 170.871 jiwa pada 2021 menjadi 180.119 jiwa pada 2024, meskipun pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan daerah lain di provinsi ini.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi wilayah yang menarik perhatian karena pertumbuhannya cukup signifikan dalam periode tiga tahun. Jumlah penduduknya meningkat dari 186.801 jiwa pada tahun 2021 menjadi 202.067 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penajam Paser Utara menjadi episentrum pembangunan nasional, sehingga banyak tenaga kerja konstruksi, teknisi, dan profesional berpindah ke wilayah ini. Dampak migrasi tersebut sangat nyata dalam lonjakan penduduk yang lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten lain.

Adapun Kabupaten Mahakam Ulu tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kalimantan Timur, yakni hanya 35.274 jiwa pada 2021 dan 39.715 jiwa pada 2024. Keterbatasan aksesibilitas dan kondisi geografis yang relatif terpencil menjadi faktor utama lambatnya pertumbuhan penduduk di wilayah ini. Namun demikian, peningkatan kecil yang terjadi tetap menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan mobilitas penduduk yang mulai meningkat, terutama seiring dengan perbaikan jaringan transportasi antarwilayah. Terakhir, Kota Bontang memiliki jumlah penduduk 183.939 jiwa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 191.811 jiwa pada tahun 2024. Meskipun tidak sebesar Samarinda dan Balikpapan, pertumbuhan penduduk di Bontang tetap stabil, didorong oleh aktivitas industri kimia yang menjadi andalan kota tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, Semester II Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Lakilaki +Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	83.972	17.161	101.133
Kutai Barat	51.616	11.718	63.334
Kutai Kartanegara	219.818	46.099	265.917
Kutai Timur	131.289	24.599	155.888
Berau	86.691	17.197	103.888
Penajam Paser Utara	54.256	12.500	66.756
Mahakam Ulu	11.067	2.532	13.599
Kota Balikpapan	202.810	57.155	259.965
Kota Samarinda	232.333	60.388	292.721
Kota Bontang	51.388	11.633	63.021
Kalimantan Timur	1.125.240	260.982	1.386.222

Sumber: <https://laporpak.dkp3a.kaltimprov.go.id/klpkusia>

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk menurut Wajib KTP di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	110.924	102.955	213.879
Kutai Barat	69.848	62.534	132.382
Kutai Kartanegara	293.206	266.662	559.868
Kutai Timur	166.240	140.314	306.554
Berau	110.353	94.746	205.099
Penajam Paser Utara	72.916	67.836	140.752
Mahakam Ulu	15.451	12.969	28.420
Kota Balikpapan	273.491	264.084	537.575
Kota Samarinda	316.844	309.760	626.604
Kota Bontang	69.567	64.926	134.493
Kalimantan Timur	1.498.840	1.386.786	2.885.626

Sumber: <https://laporpak.dkp3a.kaltimprov.go.id/klpkusia>

Berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) di Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin. Total kepala keluarga mencapai 1.386.222 KK, terdiri dari 1.125.240 laki-laki dan 260.982 perempuan. Dominasi kepala keluarga laki-laki sangat jelas, yaitu sekitar 81%, sedangkan perempuan hanya 19%. Hal ini mencerminkan norma sosial dan budaya yang masih kuat, di mana laki-laki umumnya menjadi kepala keluarga. Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 291.721 KK, diikuti oleh Kota Balikpapan (259.965 KK) dan Kutai Kartanegara (265.917 KK).

Berdasarkan tabel yang menunjukkan jumlah kepala keluarga (KK) di Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin. Total kepala keluarga mencapai 1.386.222 KK, terdiri dari 1.125.240 laki-laki dan 260.982 perempuan. Dominasi kepala keluarga laki-laki sangat jelas, yaitu sekitar 81%, sedangkan perempuan hanya 19%. Hal ini mencerminkan norma sosial dan budaya yang masih kuat, di mana laki-laki umumnya menjadi kepala keluarga. Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 291.721 KK, diikuti oleh Kota Balikpapan (259.965 KK) dan Kutai Kartanegara (265.917 KK). Sebaliknya, Mahakam Ulu memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit, yaitu 13.599 KK, yang sejalan dengan karakteristik daerah pedalaman dan jumlah penduduk yang rendah.

Jika dibandingkan dengan tabel 1.2 jumlah penduduk menurut wajib KTP, terlihat bahwa total penduduk Provinsi Kalimantan Timur mencapai 2,88 juta jiwa, terdiri dari 1,48 juta laki-laki dan 1.38 juta perempuan. Proporsi ini menunjukkan selisih sekitar 112.054 jiwa antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki tetap mendominasi. Kota Samarinda kembali menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 626.604 jiwa, diikuti oleh Kutai Kartanegara (559.868 jiwa) dan Kota Balikpapan (537.525 jiwa). Mahakam Ulu, seperti pada data kepala keluarga, memiliki jumlah penduduk paling

sedikit, yaitu 28.420 jiwa. Pola ini mengindikasikan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan daerah kaya sumber daya alam, sementara daerah pedalaman memiliki populasi yang kecil. Koherensi antara kedua tabel terlihat jelas: daerah dengan jumlah penduduk besar juga memiliki jumlah kepala keluarga tinggi.

Namun, rasio kepala keluarga terhadap penduduk bervariasi. Misalnya, Samarinda dengan 626.604 jiwa memiliki 291.721 KK, yang berarti rata-rata sekitar 2,1 orang per KK. Sebaliknya, Mahakam Ulu dengan 28.420 jiwa dan 13.599 KK memiliki rasio sekitar 2,0 orang per KK. Rasio ini relatif kecil dibandingkan standar nasional, yang biasanya 3–4 orang per KK, sehingga bisa mengindikasikan adanya rumah tangga kecil atau fenomena migrasi anggota keluarga ke daerah lain. Distribusi gender pada kedua tabel juga menarik untuk dianalisis. Dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga sejalan dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar. Namun, proporsi kepala keluarga perempuan yang hanya 19% jauh lebih rendah dibandingkan proporsi penduduk perempuan (48%).

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia di Peovinsi Kalimantan Timur berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Lakilaki +Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
00-04	140.051	130.081	270.132
05-09	193.827	181.326	375.153
09-14	202.473	188.975	391.448
15-19	168.693	157.223	325.916
20-24	193.532	17.119	364.722
25-29	177.117	160.019	337.136
30-34	164.068	155.324	319.392
35-39	160.496	155.392	315.888
40-44	167.736	16.011	327.846
45-49	148.752	138.254	287.006
50-54	124.273	114.194	238.467
55-59	98.086	89.984	18.807
60-64	6.845	63.353	131.803
65-69	44.714	39.988	84.702
70-74	27.601	22.775	50.376
>75	20.391	21.631	42.022
Kalimantan Timur	2.100.260	1.949.819	4.050.079

Sumber: <https://laporpak.dkp3a.kaltimprov.go.id/klpkusia>

Data ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang struktur umur penduduk Kalimantan Timur. Total penduduk mencapai 4.050.079 jiwa, terdiri dari 2.100.260 laki-laki dan 1.949.819 perempuan. Secara umum, jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan selisih sekitar 150.441 jiwa, yang menunjukkan pola demografis khas daerah industri dan perkotaan, di mana migrasi tenaga kerja laki-laki cukup tinggi. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya, kelompok usia 20–24 tahun memiliki 353.119 jiwa, sedangkan usia 25–29 tahun mencapai 337.136 jiwa.

Dominasi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi tenaga kerja yang melimpah, yang dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di sektor industri, pertambangan, dan jasa. Namun, tingginya jumlah penduduk usia produktif juga menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai agar tidak terjadi pengangguran. Kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) juga cukup besar, dengan total lebih dari 1 juta jiwa. Angka ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan fasilitas pendidikan dasar dan layanan kesehatan anak akan terus meningkat. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan sekolah, tenaga pendidik, serta program gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif kecil, hanya sekitar 122.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan lansia masih rendah, tetapi tetap memerlukan perhatian, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Dengan meningkatnya harapan hidup, jumlah lansia diperkirakan akan terus bertambah di masa depan.

Data ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Timur. Total penduduk mencapai 4.050.079 jiwa, terdiri dari 2.100.260 laki-laki dan 1.949.819 perempuan. Jika dilihat dari distribusi pendidikan, kelompok terbesar adalah mereka yang tidak atau belum bersekolah, dengan jumlah 1.124.683 jiwa. Angka ini cukup besar dan menunjukkan bahwa masih ada tantangan serius dalam akses pendidikan dasar, terutama di daerah pedalaman atau terpencil. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah untuk memperluas jangkauan pendidikan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Kelompok berikutnya adalah penduduk yang belum tamat SD/ sederajat, sebanyak 494.551 jiwa, dan yang tamat SD/ sederajat sebanyak 647.322 jiwa. Jika digabungkan, lebih dari 1,1 juta jiwa hanya memiliki pendidikan dasar. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada tingkat pendidikan rendah, yang dapat memengaruhi kualitas tenaga kerja dan daya saing daerah. Rendahnya tingkat pendidikan ini berpotensi menjadi hambatan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja modern. Oleh karena itu, program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi penduduk. Menariknya, jumlah penduduk yang menamatkan SLTP/ sederajat mencapai 522.863 jiwa, sedangkan yang SLTA/ sederajat melonjak hingga 1.000.053 jiwa. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Sekolah	580.868	543.815	1.124.683
Belum Tamat SD/Sederajat	233.382	216.179	449.561
Tamat SD/Sederajat	312.674	334.648	647.322
SLTP/Sederajat	266.863	255.922	522.785
SLTA/Sederajat	564.172	435.833	1.000.005
Diploma I/II	5.633	7.957	13.590
Akademi/Diploma III/S.Muda	27.233	38.930	66.163
Diploma IV/Strata I	101.146	110.960	212.106
Strata II	7.817	5.371	13.188
Strata III	472	204	676
Kalimantan Timur	2.100.260	1.949.819	4.050.079

Sumber: <https://laporpak.dkp3a.kaltimprov.go.id/klpkusia>

akses pendidikan menengah, yang merupakan modal penting untuk menciptakan tenaga kerja semi-terampil. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, perbedaannya sangat mencolok. Penduduk yang memiliki Diploma I/II hanya 13.590 jiwa, sedangkan Diploma III sebanyak 66.263 jiwa. Untuk Strata I (S1) jumlahnya 212.106 jiwa, sementara Strata II (S2) hanya 13.188 jiwa, dan Strata III (S3) sangat kecil, yaitu 676 jiwa. Distribusi ini menggambarkan piramida pendidikan yang lebar di dasar dan sangat sempit di puncak. Artinya, meskipun ada kemajuan dalam pendidikan menengah, akses ke pendidikan tinggi masih terbatas. Rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi dapat berdampak pada ketersediaan tenaga kerja profesional di Kalimantan Timur, terutama untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pemerintahan. Kondisi ini juga menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan global, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu.

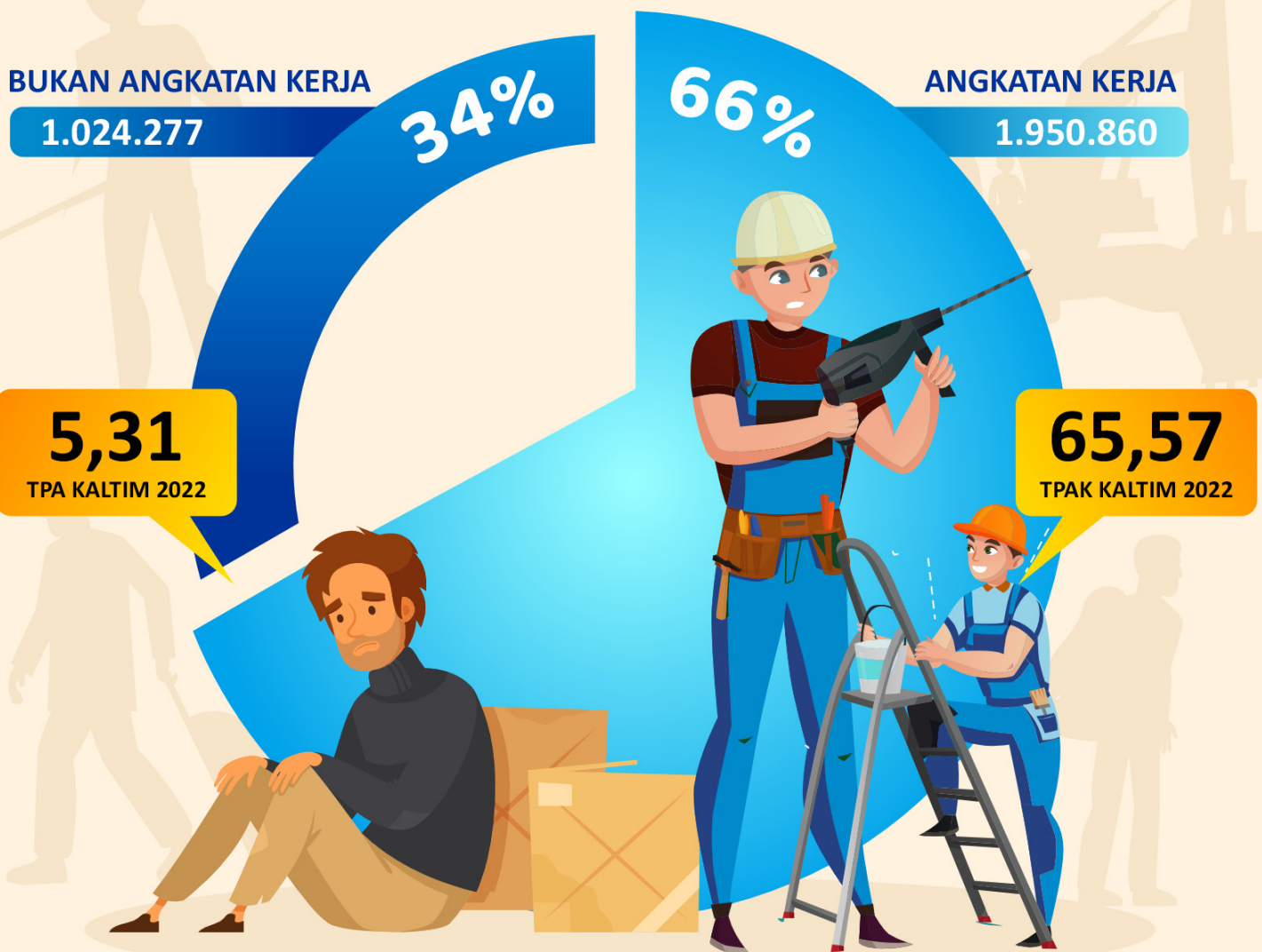
Jika tidak ada upaya serius untuk meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi, maka Kalimantan Timur berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, kesenjangan gender dalam pendidikan juga perlu diperhatikan. Meskipun jumlah perempuan yang menamatkan pendidikan tinggi cukup signifikan, proporsinya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama pada jenjang Strata II dan III. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintah dan masyarakat perlu mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Implikasi dari data ini sangat luas. Pertama, tingginya jumlah penduduk dengan pendidikan rendah menuntut kebijakan yang fokus pada pemerataan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi harus diatasi dengan memperluas akses ke universitas, memberikan beasiswa, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Ketiga, program pelatihan vokasi dan keterampilan harus digencarkan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, struktur pendidikan penduduk Kalimantan Timur menunjukkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan berupa kesenjangan pendidikan dan keterbatasan akses ke jenjang tinggi harus diatasi dengan kebijakan yang tepat. Di sisi lain, peluang berupa tingginya jumlah penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan jika mereka dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Dengan strategi yang terarah, Kalimantan Timur dapat mengubah tantangan ini menjadi kekuatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

KETENAGAKERJAAN

Presentase Penduduk 15+ 2025

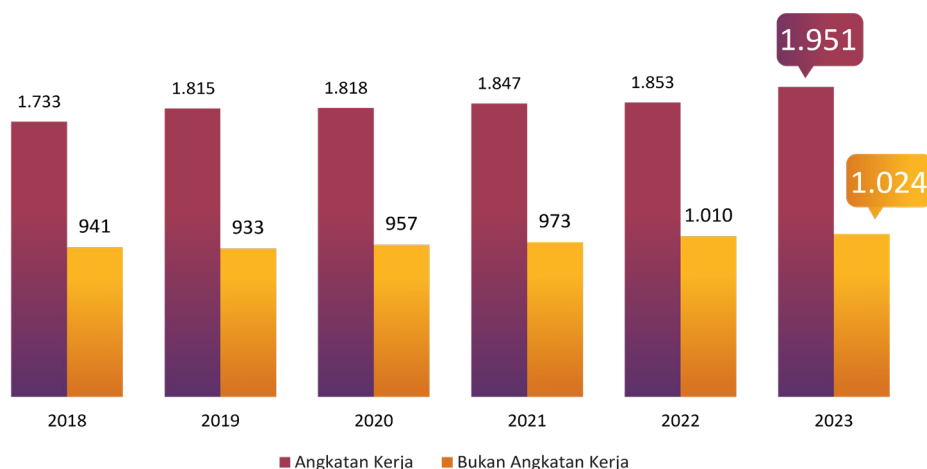




2. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja

Penduduk Usia Kerja dibagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pencari kerja (pengangguran), sedangkan Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagai penerima pendapatan dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwasanya Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi yang menjelaskan kebutuhan manusia akan



Gambar 2.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur (ribu orang), 2018-2024

pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan dimensi sosial yakni dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu seseorang.

Data penduduk berumur 15 tahun ke atas pada periode Februari 2020 hingga Februari 2024 memberikan gambaran penting mengenai dinamika pasar kerja dan perubahan struktur ketenagakerjaan di wilayah ini. Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah penduduk usia kerja meningkat dari 2,75 juta menjadi 3,03 juta orang atau bertambah sekitar 10,13 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan populasi yang konsisten, baik akibat faktor alami seperti kelahiran maupun migrasi masuk. Namun,

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

Kegiatan Utama	2020		2021		2022	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Angkatan Kerja	1.975.527	1.817.680	1.886.361	1.846.547	1.911.921	1.852.802
1. Bekerja	1.842.805	1.692.796	1.757.897	1.720.361	1.782.435	1.746.920
2. Pengangguran Terbuka	132.722	124.884	128.464	126.186	129.486	105.882
II. Bukan Angkatan Kerja	776.251	957.491	910.086	973.018	975.509	1.009.591
1. Sekolah	172.595	230.776	225.076	228.949	259.073	224.413
2. Mengurus Rumah tangga	534.572	611.283	588.799	609.254	588.715	655.958
3. Lainnya	69.084	115.432	96.211	134.815	127.721	129.220
Kalimantan Timur	2.751.778	2.775.171	2.796.447	2.819.565	2.887.430	2.862.393

Kegiatan Utama	2023		2024	
	Feb	Ags	Feb	Ags
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
I. Angkatan Kerja	1.932.030	1.950.860	2.009.517	2.083.469
1. Bekerja	1.808.972	1.847.295	1.893.994	1.976.447
2. Pengangguran Terbuka	123.058	103.565	115.523	107.022
II. Bukan Angkatan Kerja	1.010.337	1.024.277	1.020.889	1.022.837
1. Sekolah	276.774	265.822	312.634	264.213
2. Mengurus Rumah tangga	642.894	641.208	605.762	638.259
3. Lainnya	90.669	117.247	102.493	120.365
Kalimantan Timur	2.942.367	2.975.137	3.030.406	3.106.306

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

yang menarik adalah pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja hanya bertambah dari 1,98 juta menjadi 2,01 juta orang atau naik sekitar 1,72 persen. Perbedaan laju pertumbuhan ini menandakan adanya penurunan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara langsung di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja aktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPAK adalah persentase dari penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka), dalam perkembangannya TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor itu antara lain: umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, tuntutan ekonomi dan daerah tempat tinggal (perkotaan/perdesaan). Pengaruh dari faktor-faktor ini terhadap penduduk laki-laki tidak sama dengan penduduk perempuan. Pengaruh terhadap tingkat partisipasi laki-laki tidak besar, karena umumnya laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga.

Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	66,17	67,88	65,34	61,70	62,95	68,75
Kutai Barat	66,76	71,02	72,53	69,68	70,51	70,28
Kutai Kartanegara	65,74	61,98	64,46	61,95	65,32	65,19
Kutai Timur	68,85	68,96	67,97	67,78	66,22	66,78
Berau	66,49	67,4	65,55	64,97	66,91	66,73
Penajam Paser Utara	64,33	69,04	66,85	68,40	66,25	73,10
Mahakam Ulu	69,91	76,22	74,83	70,51	75,00	70,01
Kota Balikpapan	65,44	62,9	64,29	65,58	63,48	66,80
Kota Samarinda	64,77	65,16	64,29	62,96	65,49	65,50
Kota Bontang	68,06	69,24	66,63	72,08	68,35	67,75
Kalimantan Timur	65,96	65,5	65,49	64,73	65,57	67,07

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau *Labour Force Participation Rate (LFPR)* yang menurun dari 71,79 persen pada Februari 2020 menjadi 66,31 persen pada Februari 2024 memperkuat indikasi tersebut. Penurunan sebesar lebih dari 5 poin persentase ini cukup signifikan, apalagi jika dihubungkan dengan tren jangka panjang yang biasanya stabil atau sedikit meningkat seiring bertambahnya jumlah

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	4,38	4,52	5,70	4,88	4,72	4,53
Kutai Barat	4,89	4,97	5,14	4,62	6,16	5,58
Kutai Kartanegara	5,79	5,70	5,66	4,14	4,05	4,11
Kutai Timur	5,45	5,45	5,35	6,48	5,93	5,76
Berau	4,95	5,08	5,82	5,02	4,95	5,15
Penajam Paser Utara	6,03	6,22	2,95	2,12	2,07	2,05
Mahakam Ulu	3,56	3,49	3,14	2,44	2,09	2,51
Kota Balikpapan	7,15	9,00	8,94	6,90	6,09	6,22
Kota Samarinda	5,73	8,26	8,16	6,78	5,92	5,75
Kota Bontang	9,02	9,46	9,92	7,81	7,74	7,06
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

penduduk usia produktif. Penurunan TPAK dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang berada di luar angkatan kerja, yaitu mereka yang tidak bekerja dan tidak sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori terbesar dari penduduk di luar angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang bersekolah mengalami lonjakan hingga 81,14 persen selama periode tersebut. Peningkatan yang sangat besar ini kemungkinan dipengaruhi oleh dua hal utama. Pertama, adanya kebijakan atau dorongan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang membuat lebih banyak remaja dan dewasa muda menunda masuk ke pasar kerja. Kedua, dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020–2021 menyebabkan penurunan kesempatan kerja di banyak sektor, sehingga sebagian generasi muda memilih bertahan di bangku pendidikan hingga kondisi pasar tenaga kerja membaik. Di sisi lain, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga juga meningkat, meskipun tidak setinggi kategori sekolah. Peningkatan kategori ini bisa mencerminkan adanya pergeseran preferensi atau keterpaksaan, misalnya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau karena faktor budaya dan gender yang masih berpengaruh.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja meningkat dari 1,85 juta pada Februari 2020 menjadi 1,90 juta pada Februari 2024, atau naik sekitar 2,78 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja secara keseluruhan, yang berarti proporsi penduduk yang bekerja dalam angkatan kerja bertambah. Hal ini juga tercermin pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,72 persen pada Februari 2020 menjadi 5,75 persen pada Februari 2024. Penurunan TPT sebesar hampir 1 poin persentase ini dapat diartikan sebagai indikasi perbaikan di pasar kerja, di mana lebih banyak pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan. Namun, penurunan TPT ini perlu dilihat dengan hati-hati, karena sebagian penyebabnya bukan hanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga penurunan jumlah pencari kerja akibat menurunnya partisipasi angkatan kerja.

Rasio Penduduk Bekerja terhadap Penduduk Usia Kerja (Employment-to-Population Ratio/EPR) turun dari 66,97 persen pada 2020 menjadi 62,50 persen pada 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk bekerja tidak secepat pertumbuhan penduduk usia kerja. Dengan kata lain, meskipun jumlah absolut pekerja bertambah, laju pertumbuhannya tertinggal dibandingkan dengan laju pertumbuhan populasi usia kerja. Hal ini menjadi salah satu indikator adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru yang cukup untuk menampung masuknya tenaga kerja baru ke pasar kerja setiap tahunnya.

Jika melihat pola tahunan, tahun 2020 merupakan titik awal dengan kondisi pasar kerja yang cukup tertekan akibat pandemi. Banyak sektor ekonomi mengalami perlambatan atau bahkan kontraksi, sehingga berdampak pada kesempatan kerja. Pada tahun-tahun berikutnya, terutama 2021 hingga 2022, terjadi pemulihan bertahap. Jumlah penduduk bekerja mulai meningkat, meskipun TPAK masih menunjukkan tren

menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan lapangan kerja lebih banyak menyerap tenaga kerja yang sebelumnya menganggur, tetapi belum cukup menarik mereka yang berada di luar angkatan kerja untuk kembali aktif.

Tahun 2023 dan 2024 menjadi periode yang relatif lebih baik bagi pasar kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja mulai menunjukkan percepatan, disertai dengan penurunan TPT yang lebih nyata. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor, seiring membaiknya kondisi ekonomi pasca-pandemi. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama untuk mengembalikan TPAK dan EPR ke level sebelum pandemi atau bahkan meningkatkannya. Tanpa peningkatan partisipasi angkatan kerja, potensi bonus demografi bisa tidak termanfaatkan secara optimal.

Fenomena meningkatnya jumlah penduduk di luar angkatan kerja yang bersekolah sebenarnya memiliki sisi positif dalam jangka panjang, karena kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Namun, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan lulusan di masa depan, hal ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru berupa pengangguran terdidik. Demikian pula, peningkatan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dapat menjadi cerminan adanya kesenjangan kesempatan kerja bagi kelompok tertentu, misalnya perempuan, sehingga kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga atau usaha mikro bisa menjadi salah satu solusi.

Secara keseluruhan, tren 2020–2024 menggambarkan perbaikan moderat di pasar tenaga kerja setelah guncangan pandemi, dengan penurunan TPT dan sedikit peningkatan jumlah penduduk bekerja. Namun, penurunan TPAK dan EPR menjadi sinyal peringatan bahwa tidak semua penduduk usia produktif dapat atau mau berpartisipasi dalam pasar kerja. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terarah, mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan kelompok rentan, serta penciptaan ekosistem kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan struktur ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, pertumbuhan penduduk usia kerja dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan ekonomi, bukan justru menjadi beban. fluktuasi industri, terutama di sektor migas dan manufaktur. Balikpapan juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, dengan puncak pada 2020 di angka 9,00%. Meskipun angka ini turun menjadi 6,09% pada 2023, Balikpapan tetap memiliki salah satu TPT tertinggi di Kalimantan Timur. Kota ini mungkin terdampak oleh penurunan aktivitas industri dan perdagangan selama pandemi. Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan TPT yang sangat rendah dan stabil selama periode ini. Pada 2023, TPT di Mahakam Ulu hanya 2,09%, turun dari 3,49% pada 2020. Tingkat pengangguran yang rendah mungkin disebabkan oleh tingginya keterlibatan penduduk dalam sektor pertanian dan kehutanan, yang relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi makro. Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan penurunan stabil dalam TPT, dari 5,70% pada 2020 menjadi 4,05% pada 2023. Kabupaten ini memiliki perekonomian yang bergantung pada sektor pertambangan dan pertanian, yang kemungkinan pulih dengan cepat setelah pandemi.

KEMISKINAN

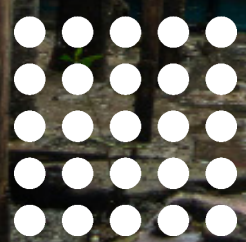
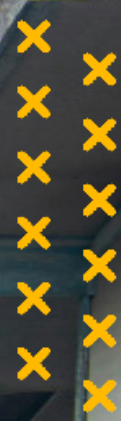
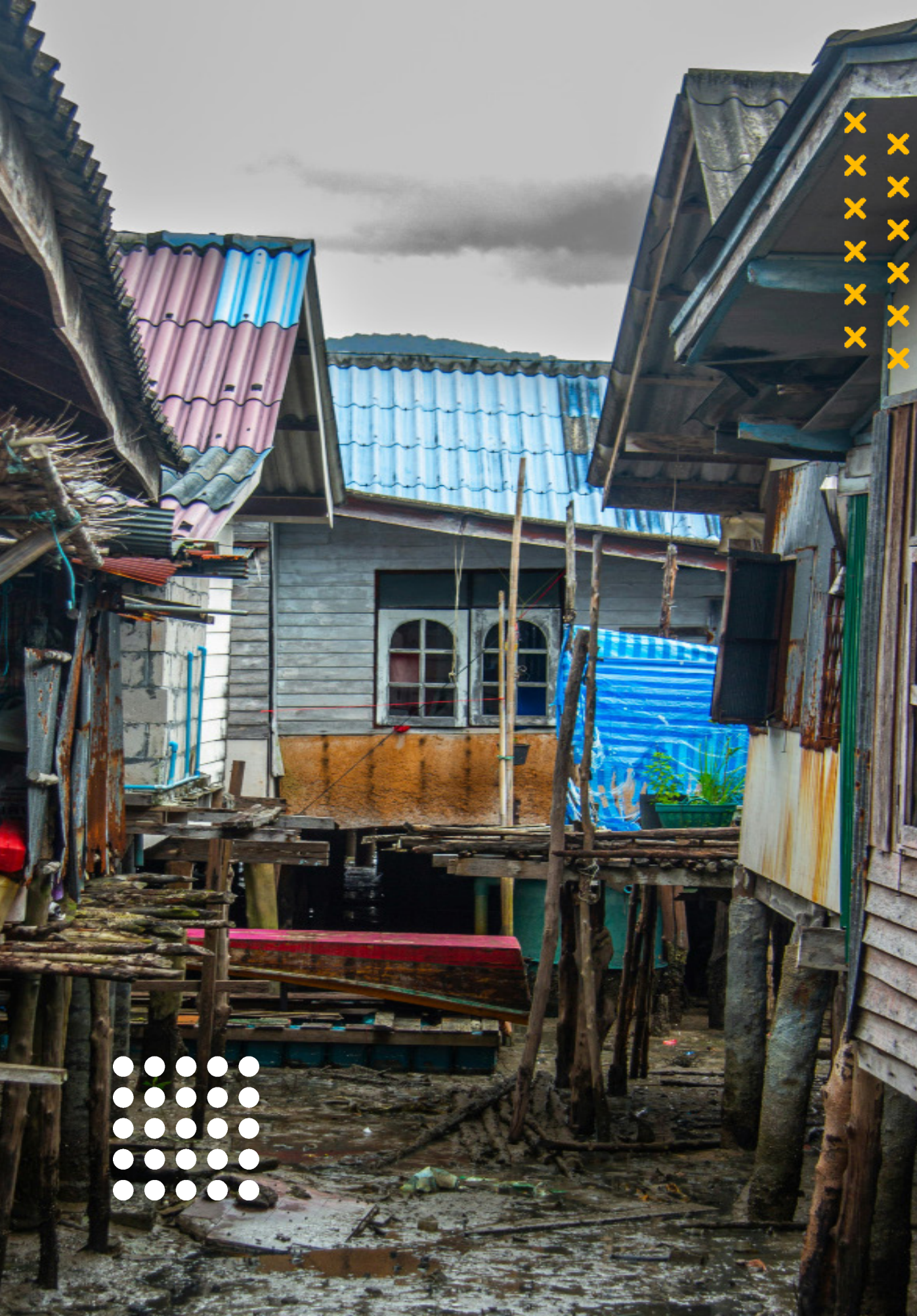
221,34 Ribu

Jumlah Penduduk Miskin 2024

833.955

GK Kalimantan Timur 2023





3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya. Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya. Salah satu dasarnya adalah tersedianya data yang baik. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, konsep mengenai kemiskinan tersebut diadopsi dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga yang diukur dalam bentuk uang berkorelasi positif dengan variabel kunci kemiskinan yang sulit diukur seperti status sosial, kesenjangan sosial dan aneka ragam variannya, serta akses terhadap fasilitas sosial maupun ekonomi (UNESCAP, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, salah satu definisi mengenai kemiskinan difokuskan pada ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan sejumlah komoditi makanan dan kebutuhan dasar lainnya (UNSD, 2005). Meskipun dianggap menyempitkan makna dari kemiskinan itu sendiri, namun mengingat sisi kepraktisannya maka ukuran inilah yang sampai sekarang banyak digunakan.

Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok acuan sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS). GKS adalah GK pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur (ribu orang), 2021-2024

Wilayah	2021		2022		2023	2024	
	Maret	September	Maret	September	Maret	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	127,28	121,28	123,59	128,98	122,43	118,44	118,19
Perdesaan	114,48	111,85	112,66	113,32	108,64	102,9	93,69
Kalimantan Timur	241,77	233,13	236,25	242,30	231,07	221,34	211,88

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Selanjutnya, penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK.

Tabel 3.2 Garis Kemiskinan menurut Perkotaan/Perdesaan (Rp/kapita/bulan), Maret 2020- Maret 2024

Wilayah	2021		2022		2023		2024
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	695.824	706.886	732.195	772.112	796.193	-	118.44
Perdesaan	673.636	692.910	718.550	758.565	776.285	-	102.9
Kalimantan Timur	689.035	703.223	728.208	768.120	790.186	-	221.34

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan tabel yang menampilkan perkembangan garis kemiskinan untuk wilayah perkotaan, perdesaan, dan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2024, dapat diamati beberapa tren garis kemiskinan. Pada wilayah perkotaan, angka tertinggi terjadi pada September 2022, yaitu 128,98 rupiah/kapita/bulan, dengan tren yang fluktuatif sejak Maret 2020 (113,27 rupiah/kapita/bulan). Di tahun 2024, pada Maret, angka untuk wilayah perkotaan turun menjadi 118,44 rupiah/kapita/bulan. Di perdesaan, terdapat penurunan yang konsisten, dimulai dari 116,99 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2020 menjadi 102,9 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2024. Sementara itu, untuk keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur, terjadi penurunan yang lebih stabil dari 243,99 rupiah/kapita/bulan pada September 2020 menjadi 221,34 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2024, dengan titik tertinggi pada September 2022, yaitu 242,3 rupiah/kapita/bulan.

Sedangkan berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur dari Maret 2020 hingga Maret 2024 menunjukkan beberapa pola yang menarik. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin sempat naik dari 113,27 ribu orang pada Maret 2020 ke 128,11 ribu pada September 2020, lalu menurun secara bertahap, meskipun ada kenaikan kecil di beberapa periode. Pada Maret 2024, jumlahnya turun menjadi 118,44 ribu orang. Di perdesaan, jumlah penduduk miskin terus menurun dari 116,99 ribu pada Maret 2020

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Perkotaan/Perdesaan (Persen), 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023	2024
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan	4,45	5,10	5,01	4,74	4,80	4,97	4,68	4,47
Perdesaan	9,51	9,98	9,87	9,63	9,64	9,71	9,28	8,76
Kalimantan Timur	6,10	6,64	6,54	6,27	6,31	6,44	6,11	5,78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Perkotaan/Perdesaan 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023	2024
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan	0,664	0,675	1,017	0,882	0,672	0,634	0,602	0,619
Perdesaan	1,743	1,801	1,673	1,380	1,687	1,119	1,150	1,207
Kalimantan Timur	1,015	1,031	1,223	1,037	0,989	0,784	0,771	0,799

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

menjadi 102,9 ribu pada Maret 2024, tanpa banyak fluktuasi. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sempat mencapai puncak pada September 2020 (243,99 ribu), namun terus turun hingga 221,34 ribu pada Maret 2024. Kenaikan yang sering terjadi di bulan September di daerah perkotaan mungkin disebabkan oleh faktor musiman, sementara penurunan yang stabil di perdesaan bisa mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi di wilayah tersebut.

Dari data persentase penduduk miskin P0 di Kalimantan Timur dari Maret 2020 hingga Maret 2024 menunjukkan pola yang menarik di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 4,45% pada Maret 2020 menjadi 5,1% pada September 2020, yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 atau krisis ekonomi saat itu. Namun, setelah itu,

terjadi penurunan bertahap yang konsisten hingga Maret 2024, di mana persentase penduduk miskin turun menjadi 4,47%. Tren serupa juga terjadi di perdesaan, meskipun tingkat kemiskinan di sana selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 9,98% pada September 2020, namun secara perlahan menurun hingga mencapai 8,76% pada Maret 2024. Secara keseluruhan, di Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin mencapai puncaknya pada September 2020 dengan 6,64% dan terus menurun stabil hingga 5,78% pada Maret 2024. Kenaikan awal pada 2020 kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi global, sementara penurunan berikutnya mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan efektifnya program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Meski demikian, penurunan di perdesaan berjalan lebih lambat, yang dapat dijelaskan dengan kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur dibandingkan wilayah perkotaan.

Berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kalimantan Timur dari 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalami fluktuasi dengan tren penurunan secara bertahap setelah puncaknya di tahun 2021. Di wilayah perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 0,664 pada Maret 2020 menjadi 1,017 pada Maret 2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak ekonomi pandemi COVID-19. Peningkatan ini mencerminkan bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin jauh dari garis kemiskinan selama periode ini. Namun, setelah 2021, terjadi tren penurunan, dengan indeks menurun secara konsisten hingga mencapai 0,602 pada Maret 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Sedikit peningkatan menjadi 0,619 pada Maret 2024 mengindikasikan fluktuasi kecil yang mungkin terkait dengan perubahan ekonomi musiman atau kebijakan sementara.

Di wilayah perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan, menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan lebih parah. Pada Maret 2020, indeks berada di 1,743 dan mencapai puncaknya pada September 2020 sebesar 1,801, menunjukkan bahwa banyak penduduk miskin di perdesaan memiliki pendapatan yang sangat jauh di bawah garis kemiskinan. Walaupun ada penurunan ke 1,673 pada Maret 2021 dan penurunan lebih lanjut hingga 1,119 pada September 2022, tren penurunan di perdesaan lebih lambat dibandingkan di perkotaan. Indeks kembali naik menjadi 1,207 pada Maret 2024, yang mungkin mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan, seperti kurangnya akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

Secara keseluruhan, di Kalimantan Timur, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tren yang cukup signifikan. Indeks meningkat dari 1,015 pada Maret 2020 menjadi 1,223 pada Maret 2021 sebelum mulai menurun stabil hingga mencapai 0,771 pada Maret 2023. Meskipun ada sedikit kenaikan pada Maret 2024 menjadi 0,799, angka ini masih menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan periode awal pandemi. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Namun, tantangan yang dihadapi perdesaan dalam

menurunkan keparahan kemiskinan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 3.5 Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) menurut Perkotaan/Perdesaan, 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023	2024
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan	0,157	0,165	0,303	0,219	0,149	0,096	0,113	0,120
Perdesaan	0,412	0,569	0,413	0,257	0,395	0,169	0,199	0,230
Kalimantan Timur	0,240	0,293	0,337	0,231	0,226	0,118	0,140	0,154

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Data Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur dari 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam tingkat keparahan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2020, indeks di perkotaan tercatat sebesar 0,157, yang sedikit meningkat menjadi 0,165 pada September 2020, mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin tidak bertambah secara signifikan, tingkat keparahan kemiskinan mereka semakin parah. Puncaknya terjadi pada Maret 2021 dengan indeks mencapai 0,303, yang bisa disebabkan oleh dampak mendalam dari pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi perkotaan. Namun, setelah puncak tersebut, terjadi penurunan yang signifikan; indeks menurun menjadi 0,219 pada September 2021 dan terus berlanjut hingga 0,096 pada September 2022. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih baik bagi penduduk miskin di perkotaan, meskipun pada Maret 2023, indeks sedikit meningkat menjadi 0,113, menunjukkan fluktuasi kecil tetapi masih di bawah puncak tahun 2021.

Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi, mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Indeks pada Maret 2020 berada di 0,412 dan meningkat tajam menjadi 0,569 pada September 2020, menandakan bahwa kemiskinan di perdesaan tidak hanya lebih luas tetapi juga lebih dalam. Meskipun pada Maret 2021, indeks sedikit menurun menjadi 0,413, penurunan lebih signifikan terjadi hingga September 2021 dengan indeks 0,257, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi di pedesaan. Namun, pada tahun 2022, indeks kembali mengalami fluktuasi, dengan nilai mencapai 0,169 pada September, mencerminkan adanya peningkatan kondisi ekonomi bagi masyarakat miskin di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pada Maret 2023, indeks berada di 0,199, sedikit meningkat tetapi masih menunjukkan perbaikan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, indeks keparahan kemiskinan di Kalimantan Timur mencerminkan tren yang serupa dengan pola di perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2020, indeks berada di 0,24 dan meningkat menjadi

0,293 pada September 2020, dengan puncaknya mencapai 0,337 pada Maret 2021. Namun, setelah puncak tersebut, indeks mulai menunjukkan tren penurunan yang stabil, mencapai 0,118 pada September 2022 dan 0,14 pada Maret 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang signifikan, meskipun tantangan kemiskinan di pedesaan tetap memerlukan perhatian khusus. Data ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan dan intervensi yang lebih terfokus dalam menangani keparahan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang sering kali tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

INDEKS PEMBANGUNAN

78,20

IPM Kalimantan Timur 2023

74,72

Umur Harapan Hidup 2023

14,02

Harapan Lama Sekolah 2023

9,99

Rata-rata Lama Sekola 2023

13.202

Pengeluaran Riil Perkapita 2023

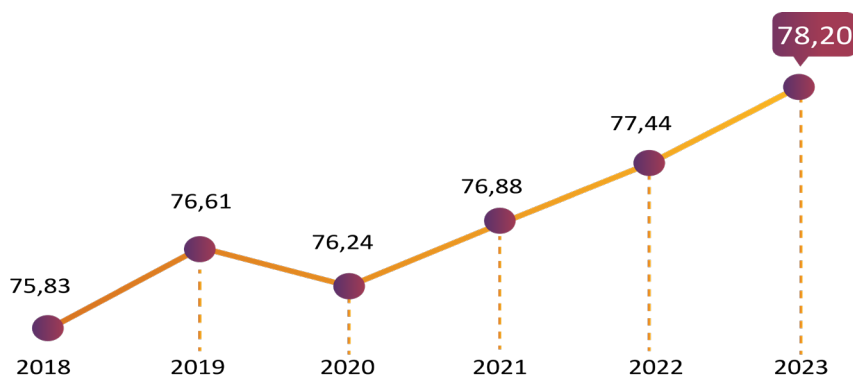




4. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia diartikan sebagai perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya (Sen, 1990). Konsep ini mengemuka sebagai alternatif dari indikator pembangunan yang hanya mengukur kemajuan ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

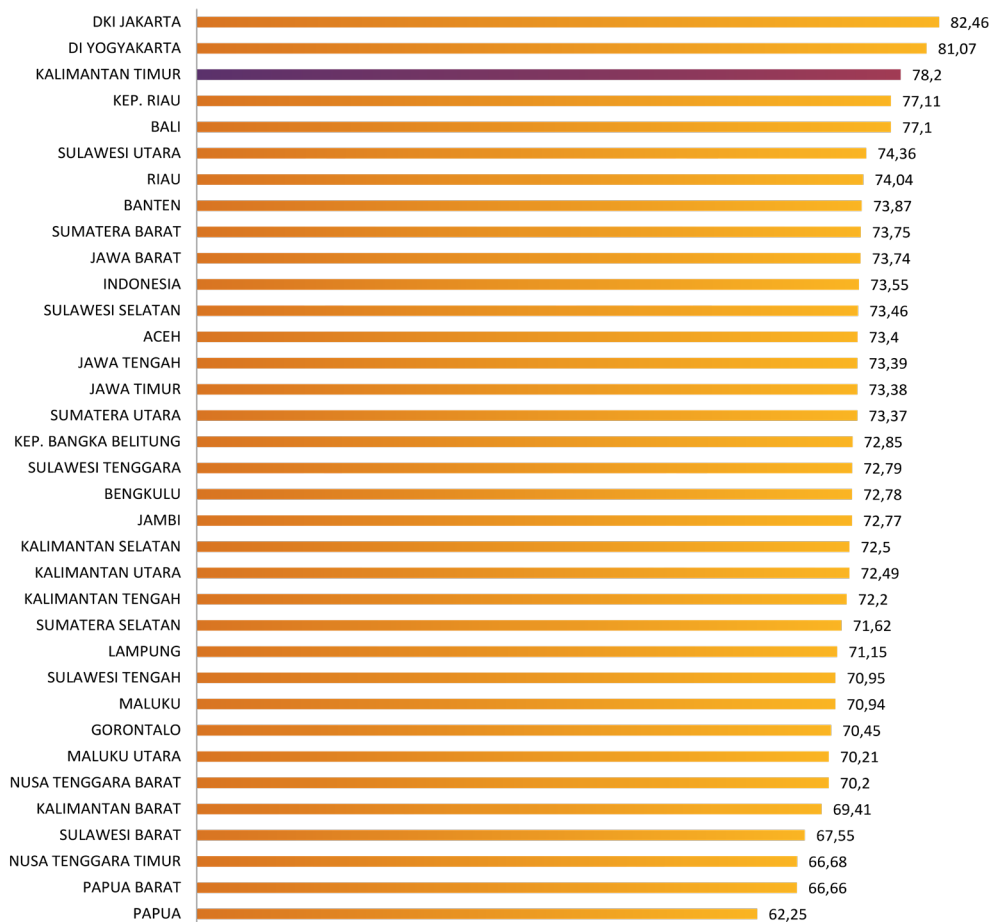
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pembangunan suatu daerah berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Provinsi Kalimantan Timur, IPM telah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2018 hingga 2023. Data yang dihasilkan dari masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang masih dihadapi dalam



Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024

upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu manfaat utama dari IPM adalah adanya keterbandingan antarnegara dalam hal kemajuan pembangunan manusia (UNDP, 2023a). Dengan membandingkan IPM antarnegara, perbedaan

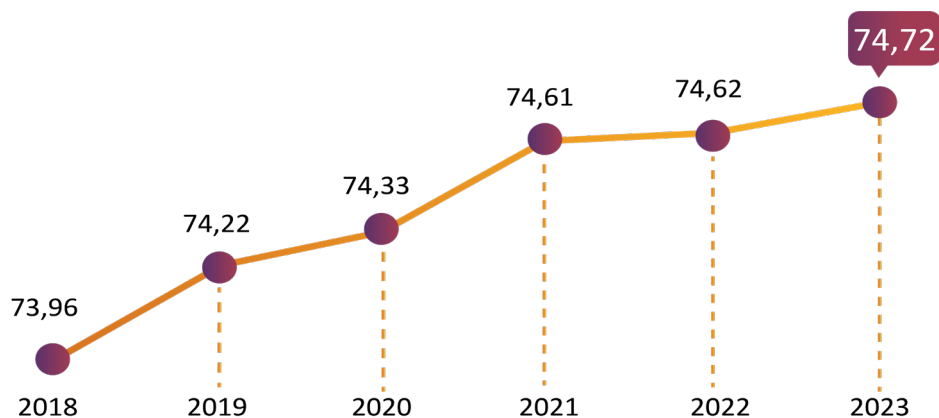
dalam kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia dapat dilihat dan dipahami dengan lebih mudah. Selain itu, IPM juga memungkinkan identifikasi masalah dan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara tertentu dalam mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. ndeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, IPM berada pada angka 75,83 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 78,20 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa terdapat



Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi , 2024

perbaikan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur melalui berbagai program. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur pada angka 78,2 menempatkannya dalam posisi yang sangat baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kalimantan Timur berada di atas rata-rata nasional (73,55) dan unggul dibandingkan mayoritas provinsi, termasuk provinsi tetangga di Kalimantan seperti Kalimantan Selatan (72,5), Kalimantan Tengah (72,2), Kalimantan Utara (72,49), dan Kalimantan Barat (69,41).

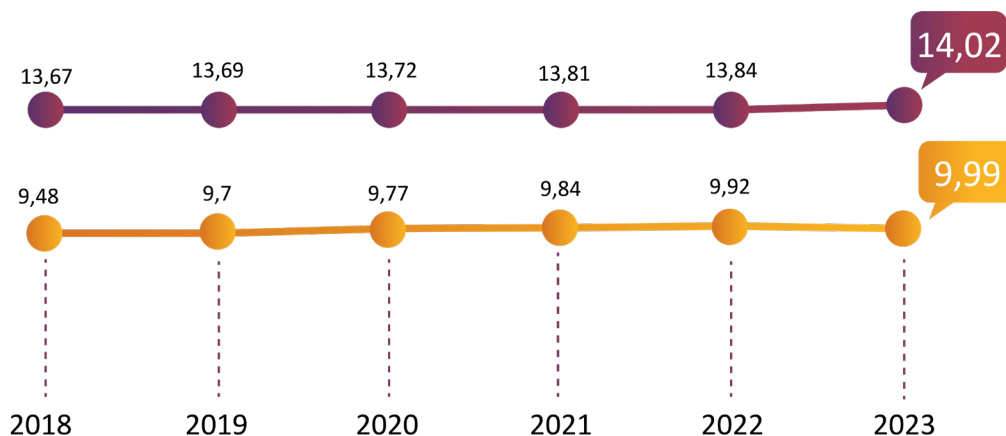
Selain DI Yogyakarta (81,07) dan DKI Jakarta (82,46), Kalimantan Timur menempati peringkat tertinggi ketiga secara nasional, mengindikasikan kualitas hidup yang lebih baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia.



Gambar 4.3 Umur Harapan Hidup(Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024

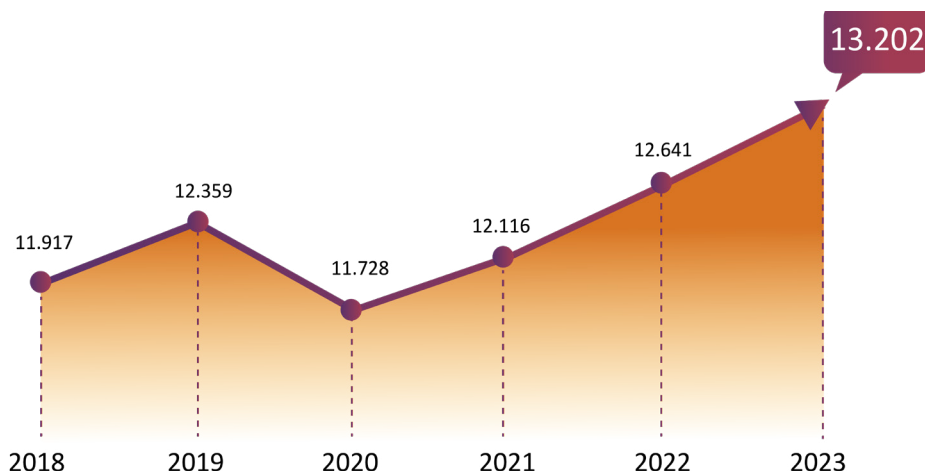
Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Sebagai salah satu dimensi utama IPM, dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh angka harapan hidup saat lahir (UHH). Pencapaian UHH Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah 74,62 tahun, yang berarti anak yang lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat hidup sampai dengan 74,62 tahun. Dibandingkan tahun lalu, UHH tumbuh 0,01 tahun atau 0,01 persen. Banyak hal yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Dari keempat faktor tersebut, faktor lingkungan memiliki pengaruh terbesar terhadap status kesehatan. Indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan meliputi indikator akses terhadap air minum yang layak dan tempat buang air besar sendiri.



Gambar 4.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024

Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, UHH tercatat sebesar 73,96 tahun dan terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 74,72 tahun pada 2023. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur selama periode tersebut.



Gambar 4.5 Pengeluaran Riil Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur (000 rupiah/perkapita/tahun), 2024

Capaian Dimensi Pengetahuan

Indikator penyusun dimensi pengetahuan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dari 2018 hingga 2023. HLS, yang mencerminkan ekspektasi tahun pendidikan yang akan dijalani oleh anak-anak, meningkat dari 13,67 tahun pada 2018 menjadi 14,02 tahun pada 2023. Ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kalimantan Timur diproyeksikan menghabiskan lebih banyak waktu dalam pendidikan formal.

Sementara itu, RLS, yang mengukur jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, juga meningkat dari 9,48 tahun pada 2018 menjadi 9,99 tahun pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan di Kalimantan Timur.

Capaian Dimensi Standar Hidup Layak

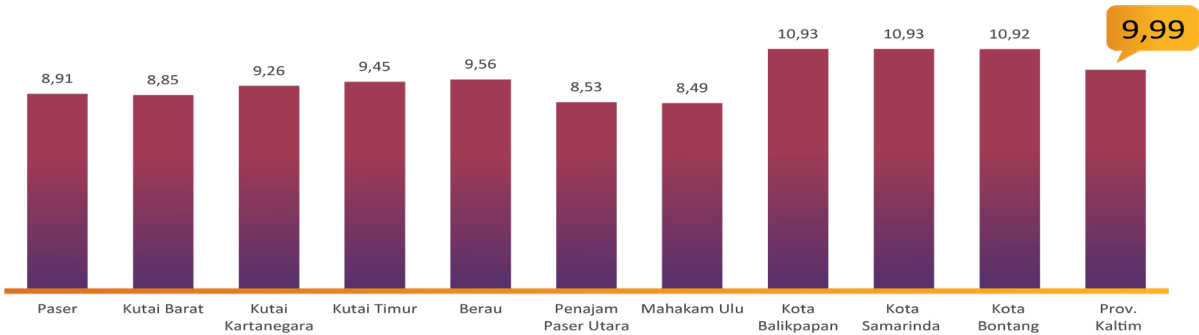
Indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak adalah indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Data pengeluaran riil per kapita di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi namun secara

keseluruhan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, pengeluaran riil per kapita tercatat sebesar 11.917 ribu rupiah, dan naik menjadi 12.359 ribu rupiah pada 2019. Namun, pada 2020 terjadi penurunan menjadi 11.728 ribu rupiah, kemungkinan dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Setelah itu, pengeluaran riil per kapita kembali meningkat pada 2021 menjadi 12.116 ribu rupiah, terus naik hingga 12.641 ribu rupiah pada 2022, dan mencapai 13.202 ribu rupiah pada 2023. Secara umum, kenaikan ini mencerminkan perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat di Kalimantan Timur.

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (UHH SP 2010), 2018-2024

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44	74,14	74,70
Kutai Barat	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92	73,72	74,50
Kutai Kartanegara	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67	75,30	75,91
Kutai Timur	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35	74,98	75,53
Berau	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74	76,21	76,66
Penajam Paser Utara	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55	73,30	73,90
Mahakam Ulu	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75	69,59	70,35
Kota Balikpapan	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13	81,66	82,24
Kota Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43	82,32	82,81
Kota Bontang	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94	81,56	82,42
Kalimantan Timur	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44	78,20	78,83

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 4.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Tabel 4.2 Harapan Lama Sekolah Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	12,99	13	13,1	13,25	13,27	13,37	13,38
Kutai Barat	12,88	12,89	12,9	13,02	13,09	13,25	13,36
Kutai Kartanegara	13,57	13,58	13,59	13,6	13,63	13,64	13,65
Kutai Timur	12,65	12,78	12,89	12,9	13	13,01	13,02
Berau	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
Penajam Paser Utara	12,54	12,55	12,56	12,57	12,7	12,86	12,87
Mahakam Ulu	12,48	12,5	12,51	12,61	12,62	12,63	12,78
Kota Balikpapan	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
Kota Samarinda	14,66	14,7	14,89	15,09	15,1	15,39	15,4
Kota Bontang	12,89	12,9	13,03	13,17	13,18	13,43	13,73
Kalimantan Timur	13,67	13,69	13,72	13,81	13,84	14,02	14,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3 Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu Rupiah/Perkapita/Tahun, 2018-2024)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181	11.651	12.181
Kutai Barat	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740	11.291	11.903
Kutai Kartanegara	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677	12.323	12.957
Kutai Timur	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322	11.961	12.490
Berau	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095	13.620	14.101
Penajam Paser Utara	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890	12.517	13.100
Mahakam Ulu	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215	8.696	9.126
Kota Balikpapan	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455	16.195	16.854
Kota Samarinda	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162	15.610	16.160
Kota Bontang	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327	17.659	18.394
Kalimantan Timur	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641	13.202	13.793

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Secara umum, terlihat bahwa hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2018 hingga 2023. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda merupakan dua daerah dengan IPM tertinggi di Kalimantan Timur, yang mencerminkan keberhasilan mereka dalam pembangunan manusia. Kota Balikpapan mencatat IPM sebesar 79,81 pada

tahun 2018 dan meningkat menjadi 81,66 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warganya.

Kota Samarinda juga menunjukkan tren positif, dengan IPM yang meningkat dari 79,93 pada tahun 2018 menjadi 82,32 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas semakin membuahkan hasil. Peningkatan ini juga dapat diatribusikan kepada pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang membantu meningkatkan standar hidup masyarakat.

Di sisi lain, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur menunjukkan pertumbuhan IPM yang relatif stabil. Kutai Kartanegara, dengan IPM yang meningkat dari 73,15 pada tahun 2018 menjadi 75,30 pada tahun 2023, mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, Kutai Timur mengalami peningkatan dari 72,56 menjadi 74,98, menunjukkan bahwa meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar, upaya perbaikan kualitas hidup tetap berjalan.

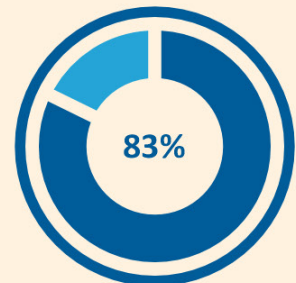
Sementara itu, Kabupaten Berau menunjukkan IPM yang positif, meningkat dari 74,01 pada tahun 2018 menjadi 76,21 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta upaya dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal. Kabupaten Paser dan Kutai Barat juga menunjukkan peningkatan IPM yang konsisten, meskipun tidak secepat kabupaten lainnya. Kabupaten Paser meningkat dari 71,61 menjadi 74,14, sementara Kutai Barat dari 70,69 menjadi 73,72. Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan, keduanya tetap berada di bawah rata-rata IPM provinsi.

Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan IPM terendah di Kalimantan Timur, meskipun terdapat peningkatan dari 66,67 pada tahun 2018 menjadi 69,59 pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, angka tersebut menunjukkan bahwa kabupaten ini masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang kurang memadai, serta tantangan dalam pengembangan ekonomi menjadi kendala utama bagi peningkatan IPM di daerah ini.

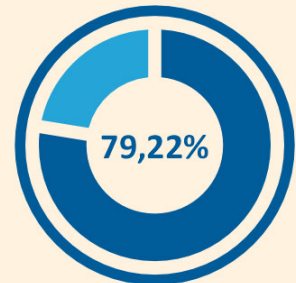
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

82,28

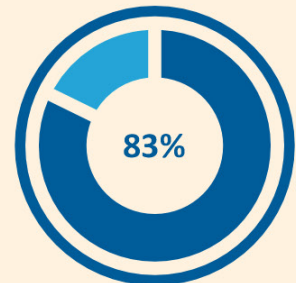
IDI Kalimantan Timur 2023



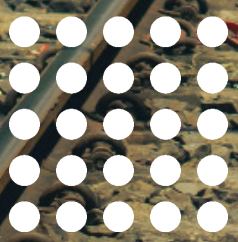
KEBEBASAN



KESETARAAN



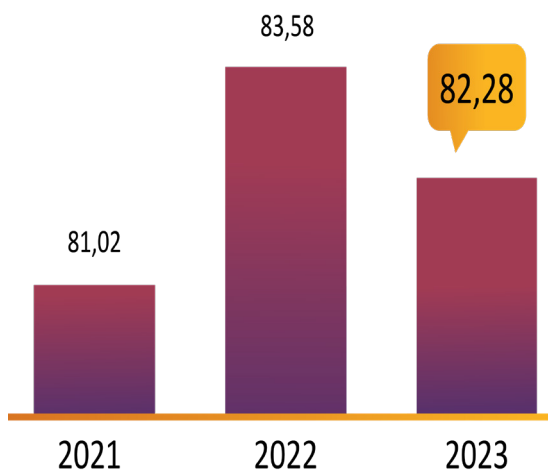
KAPASITAS LEMBAGA



5. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila.

Secara keseluruhan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang menarik antara 2021 hingga 2024: meningkat dari 81,02 (2021) ke 83,58 (2022), mencapai puncak relatif 82,28 (2023) lalu turun tipis menjadi 80,69 (2024). Pola ini menggambarkan bahwa kualitas demokrasi daerah mengalami perbaikan setelah 2021 namun masih rentan terhadap perubahan kebijakan, performa lembaga, dan dinamika sosial-politik lokal yang menyebabkan terjadinya penurunan pada 2024. Secara ringkas, fondasi demokrasi ada—tetapi masih membutuhkan konsistensi dan penguatan di beberapa aspek.



Gambar 5.1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024

Aspek Kebebasan

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), aspek ini menunjukkan fluktuasi cukup signifikan selama periode 2021–2024. Secara umum, nilai aspek kebebasan mengalami penurunan dari 89,46 pada tahun 2021 menjadi 79,73 pada tahun 2024, menandakan adanya penurunan ruang kebebasan publik baik di ranah sipil maupun politik. Meskipun awalnya berada pada kategori “baik”, tren penurunan ini menjadi sinyal penting bagi perlunya penguatan kembali ruang kebebasan

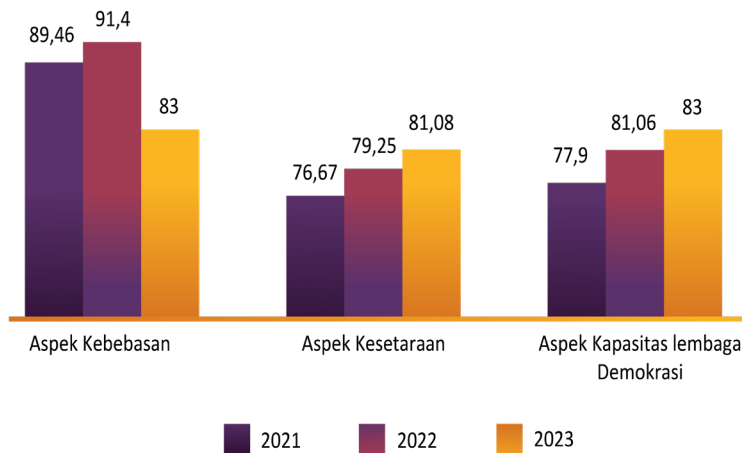
di daerah. Indikator kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dijamin aparat negara relatif stabil, namun kebebasan antar masyarakat justru melemah dari 82,3 pada 2023 menjadi hanya 66,07 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan toleransi sosial dan potensi polarisasi antar kelompok. Sementara itu,

Tabel 5.1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Menurut Indikator, 2021-2024

Aspek/Indikator	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspek Kebebasan	89,46	91,40	83,00	79,73
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	92,65	92,78	78,76	79,64
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	63,27	81,95	82,3	66,07
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	100,00	76,4	88,69
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	90,91	90,91	72,73	63,64
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	97,97	97,97	97,97	89,11
Pemenuhan hak-hak pekerja	95,00	89,50	95,57	92,30
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	82,27	83,78	84,38	79,96
Aspek Kesenjangan	76,67	79,25	81,08	77,32
Kesenjangan gender	87,88	88,21	90,94	80,98
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00	100,00	100,00	61,82
Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,50	66,17	65	64,33
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	63,58	67,18	74,18	78,35
Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah	93,17	94,29	94,69	94,86
Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,41	79,05	81,43	90,54
Kesenjangan dalam pelayanan dasar	72,49	72,86	73,07	73,21
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90	81,06	83,00	85,68
Kinerja lembaga legislatif	53,33	57,14	71,43	90,00
Kinerja lembaga yudikatif	85,68	86,03	85,33	88,57
Netralitas penyelenggara pemilu	77,27	77,27	77,27	68,18
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	72,73	68,18	72,73	95,45
Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,06	74,46	75,47	76,63
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00	100,00	100	100,00
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	78,00	80,00	80	75,00
Pendidikan politik pada kader partai politik	72,00	100,00	100	100,00
IDI Kalimantan Timur	81,02	83,58	82,28	80,69

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

indikator kebebasan berkeyakinan tetap tinggi di atas 88 poin, menandakan kehidupan beragama masih berjalan harmonis. Namun, turunnya indikator kebebasan dalam setiap kebijakan publik dari 90,91 ke 63,64 memperlihatkan masih lemahnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. Hak memilih dan dipilih tetap kuat, meskipun sedikit menurun dari 97,97 ke 89,11.



Gambar 5.2 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Menurut Aspek, 2022-2024

dan akses informasi publik melonjak hingga 90,54, menandakan transparansi semakin membaik. Namun demikian, perubahan terlihat pada indikator partisipasi masyarakat dalam lembaga perwakilan yang turun drastis dari nilai sempurna 100 ke 61,82.

Aspek Kapasitas Lembaga

Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, perkembangan yang terjadi cukup menggembirakan. Nilainya meningkat konsisten dari 77,9 (2021) menjadi 85,68 (2024). Kinerja lembaga legislatif mengalami lonjakan besar dari 53,33 menjadi 90, menunjukkan fungsi kontrol dan legislasi semakin efektif. Lembaga yudikatif juga menunjukkan kinerja stabil di kisaran 85–88, yang menandakan penegakan hukum relatif konsisten. Transparansi anggaran pemerintah tetap sempurna di angka 100, menjadi salah satu kekuatan utama demokrasi daerah ini. Namun, terdapat beberapa catatan: netralitas penyelenggara pemilu menurun dari 77,27 menjadi 68,18, dan kinerja birokrasi sedikit turun dari 80 ke 75. Dua hal ini menunjukkan bahwa aspek integritas lembaga publik masih memerlukan penguatan.

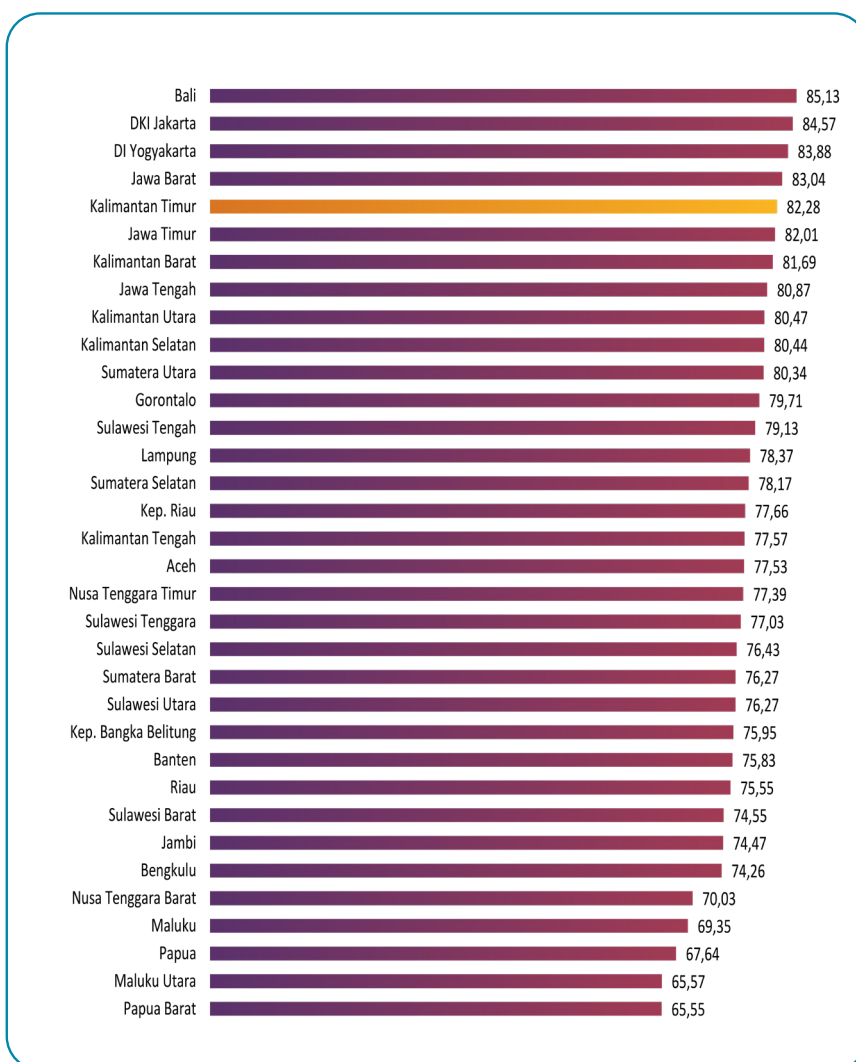
Indeks Demokrasi Indonesia

ITahun 2024 menjadi potret penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memperlihatkan variasi yang cukup lebar antarprovinsi. Secara nasional, terlihat adanya kesenjangan yang mencolok antara daerah dengan tingkat demokrasi yang sangat tinggi dan daerah yang masih tertinggal dalam hal kebebasan sipil, partisipasi politik, serta kualitas lembaga demokrasi. Data ini menjadi cerminan nyata bagaimana dinamika sosial, politik, dan budaya di tiap wilayah berpengaruh terhadap kualitas demokrasi lokal.

Aspek Kesenjangan

Aspek kesetaraan memperlihatkan pola yang cukup fluktuatif. Setelah sempat meningkat dari 76,67 (2021) menjadi 81,08 (2023), skor kesetaraan turun ke 77,32 pada 2024. Beberapa indikator dalam aspek ini justru memperlihatkan kemajuan. Kesenjangan gender, misalnya, tetap tinggi di atas 80 poin; akses warga miskin terhadap jaminan sosial meningkat dari 63,58 ke 78,35;

Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi secara nasional dengan skor 89,25, menegaskan reputasinya sebagai salah satu daerah yang paling demokratis di Indonesia. Keterbukaan masyarakat, tradisi intelektual yang kuat, serta hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan warga menjadi faktor utama



Gambar 5.3 Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi , 2024

yang menjaga tingginya kualitas demokrasi di wilayah ini. Menyusul di posisi kedua adalah Bali dengan skor 88,34, yang mencerminkan stabilitas sosial dan kematangan politik warganya, terutama dalam hal toleransi dan partisipasi publik. Sementara itu, Kalimantan Barat dengan nilai 86,17 menunjukkan kinerja luar biasa di luar Pulau Jawa, menandakan bahwa wilayah ini mampu mengelola keberagaman sosial dengan baik tanpa mengorbankan kebebasan sipil.

Di jajaran tengah, terdapat beberapa provinsi besar seperti Jawa Tengah (85,84), DKI Jakarta (84,99), dan Jawa Timur (84,17) yang mempertahankan posisi stabil dalam kelompok “demokrasi tinggi”. Ketiga provinsi

ini menunjukkan keseimbangan antara partisipasi publik yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Meskipun kerap menghadapi dinamika politik yang intens, tingginya tingkat literasi politik dan pengawasan masyarakat menjadi penopang utama bagi kualitas demokrasi di wilayah tersebut

Kalimantan Timur, dengan skor 80,69, menempati posisi menengah ke atas atau di posisi ke empat belas secara nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa provinsi kaya sumber daya tersebut masih memiliki ruang untuk memperkuat kualitas kebebasan berpendapat dan transparansi kebijakan publik. Nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan Kalimantan Barat (86,17) dan Kalimantan Selatan (81,91), yang berarti masih terdapat tantangan dalam memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas lembaga politik lokal.

Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Riau (77,06), Banten (76,87), Aceh (75,8), dan Gorontalo (74,57) menampilkan skor moderat yang menandakan adanya stabilitas demokrasi, namun belum disertai dengan pelembagaan partisipasi publik yang kuat. Faktor seperti ketimpangan sosial, konflik politik lokal, dan keterbatasan akses informasi publik masih menjadi hambatan di beberapa daerah tersebut

Sementara itu, wilayah-wilayah di bagian timur Indonesia menunjukkan skor yang relatif rendah. Maluku (67,98), Maluku Utara (67,8), Papua Barat (64,74), dan Papua (56,55) menempati posisi terbawah dalam daftar IDI 2024. Rendahnya skor di kawasan timur menunjukkan bahwa demokrasi di sana masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi infrastruktur politik, pendidikan warga, maupun kapasitas lembaga pemerintahan daerah. Konflik sosial dan keterbatasan akses terhadap media serta partisipasi politik formal menjadi penghambat utama perkembangan demokrasi yang sehat.

Pola umum dari data ini memperlihatkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan sebagian Kalimantan memiliki kualitas demokrasi yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah timur Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur informasi memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat demokratisasi daerah.

Dengan demikian, capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 menggambarkan dua hal penting: pertama, bahwa Indonesia secara umum masih mempertahankan iklim demokrasi yang positif; dan kedua, bahwa kesenjangan antarwilayah masih perlu mendapat perhatian serius. Upaya peningkatan kualitas demokrasi harus difokuskan pada penguatan kebebasan sipil, peningkatan partisipasi publik, dan perbaikan tata kelola lembaga demokrasi, terutama di provinsi-provinsi dengan nilai di bawah 75. Jika langkah-langkah strategis ini dilakukan, maka Indonesia dapat mempersempit kesenjangan demokrasi antarwilayah dan menjaga konsolidasi demokrasi nasional secara berkelanjutan.

INDEKS HARGA KONSUMEN

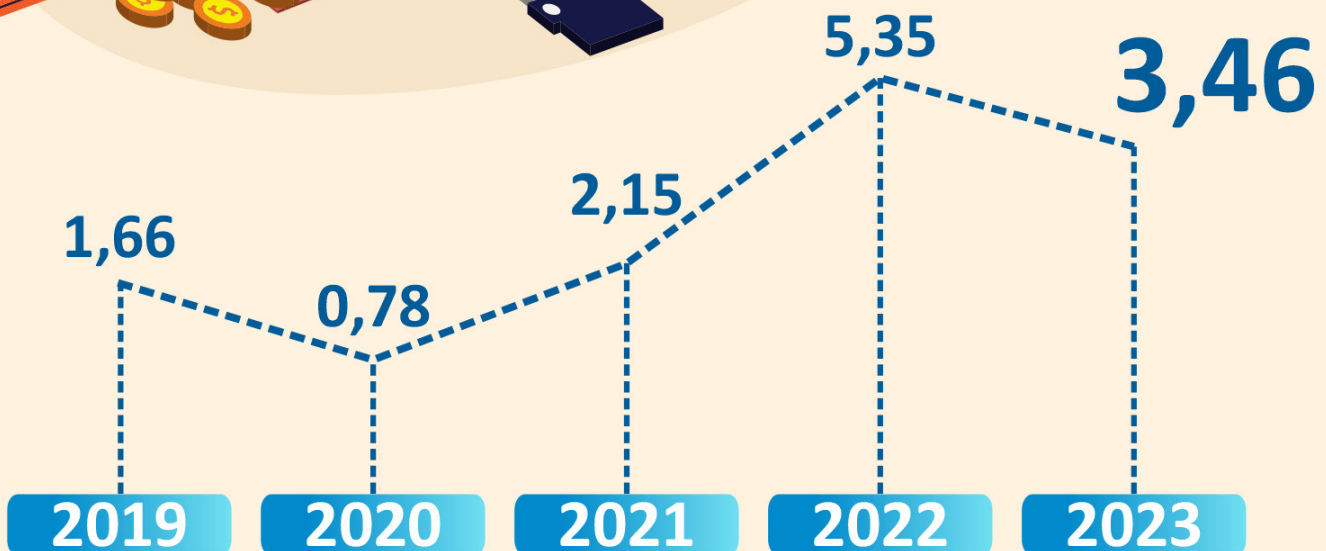
INFLASI

Kalimantan Timur 2019-2023



3,46

Inflasi Kalimantan Timur 2022





6. Indeks Harga Konsumen-Inflasi

Penyajian data Indeks Harga Konsumen (IHK) terbagi menjadi 11 kelompok pengeluaran berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 sebagai tahun dasar. Berdasarkan data inflasi tahunan menurut kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, dapat dilihat bahwa laju inflasi di wilayah ini menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung menurun pada dua tahun terakhir. Secara umum, pergerakan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih sejalan dengan tren inflasi nasional yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah pusat, serta faktor domestik seperti harga pangan dan transportasi. Dalam periode tujuh tahun terakhir, inflasi di Provinsi Kalimantan Timur sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, sebelum kemudian menurun signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Pola ini menggambarkan proses stabilisasi ekonomi daerah setelah tekanan inflasi yang cukup berat pasca-pandemi dan krisis energi global.

Pada tahun 2018, inflasi di Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,24 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,13 persen. Dua kota utama penyumbang inflasi, yaitu Balikpapan dan Samarinda, masing-masing mencatat inflasi sebesar 3,13 persen dan 3,32 persen. Tahun ini merupakan periode di mana harga pangan dan energi cukup stabil, sehingga inflasi masih dalam kategori terkendali. Namun memasuki tahun 2019 hingga 2020, inflasi mengalami penurunan tajam. Di tahun 2019, inflasi Kalimantan Timur turun

Tabel 6.1 Inflasi Tahunan Menurut Kota Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2024

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Balikpapan	3,13	1,88	0,65	2,28	5,51	3,60	1,11
Samarinda	3,32	1,49	0,86	2,05	5,22	3,37	1,50
Kalimantan Timur	3,24	1,66	0,78	2,15	5,35	3,46	1,47
Berau	-	-	-	-	-	-	2,69
PPU	-	-	-	-	-	-	1,25
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

menjadi 1,66 persen, dan kembali menurun hingga 0,78 persen pada 2020. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun,

serta pembatasan mobilitas menyebabkan berkurangnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini membuat tekanan inflasi relatif rendah di sebagian besar daerah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.

Memasuki tahun 2021, inflasi kembali meningkat menjadi 2,15 persen seiring dengan pemulihan ekonomi

Tabel 6.2 Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2022

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Balikpapan	0,81	0,3	1,4	2,75	3,28	3,83
Samarinda	0,91	0,7	1,11	2,17	2,83	3,26
Kalimantan Timur	0,87	0,53	1,23	2,42	3,02	3,51
Indonesia	0,56	0,54	1,2	2,15	2,56	3,19

Bulan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Balikpapan	4,59	4,25	4,45	5,26	5,31	5,51
Samarinda	3,8	3,59	5,16	4,69	4,95	5,22
Kalimantan Timur	4,15	3,87	4,76	4,94	5,11	5,35
Indonesia	3,85	3,63	4,84	4,73	4,82	5,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3 Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2023

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Balikpapan	0,41	0,73	1,40	1,8	2,13	2,21
Samarinda	0,44	0,40	0,92	1,38	1,48	1,73
Kalimantan Timur	0,43	0,54	1,13	1,56	1,76	1,94
Indonesia	0,34	0,50	0,68	1,01	1,10	1,24

Bulan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Balikpapan	2,76	2,60	2,62	2,75	3,2	3,6
Samarinda	2,08	2,19	2,38	2,63	2,95	3,37
Kalimantan Timur	2,38	2,36	2,49	2,68	3,06	3,46
Indonesia	1,45	1,43	1,63	1,80	2,19	2,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.4 Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2024

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Balikpapan	3,54	3,22	2,95	3,06	3,13	3
Penajam	3,1	3,71	3,18	3,33	3,06	2,36
Samarinda	2,61	3,04	2,84	3,2	3,34	2,88
Berau	2,26	4,14	4,05	3,62	3,76	3,67
Kalimantan Timur	2,95	3,28	3,03	3,21	3,29	2,99
Indonesia	2,57	2,75	3,05	3	2,84	2,51

Bulan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Balikpapan	2,28	2,26	2,31	1,51	1,19	1,11
Penajam	1,71	1,37	1,73	0,85	0,9	1,25
Samarinda	2,06	1,98	1,79	1,61	1,51	1,5
Berau	2,58	2,64	3,34	3,54	3,14	2,69
Kalimantan Timur	2,18	2,13	2,16	1,75	1,54	1,47
Indonesia	2,13	2,12	1,84	1,71	1,55	1,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.5 Inflasi Kumulatif (Inflasi Tahun Kalender) (Persen), 2025

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Balikpapan	0,36	0,18	1,38	1,51	1,01	1,77
Penajam	-0,13	-0,73	1,19	2,06	1,27	1,26
Samarinda	0,1	-0,6	1,29	1,58	1,03	1,77
Berau	0,28	-0,56	1,71	1,47	0,92	0,77
Kalimantan Timur	0,21	-0,3	1,36	1,57	1,03	1,62
Indonesia	0,76	-0,09	1,03	1,95	1,65	1,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

pasca-pandemi. Aktivitas perdagangan, transportasi, dan konsumsi masyarakat mulai menggeliat, sementara harga energi dan bahan makanan mulai naik. Lonjakan inflasi semakin terlihat pada tahun 2022, ketika inflasi Kalimantan Timur mencapai 5,35 persen—angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kaltim, kenaikan inflasi ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas utama seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif transportasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Faktor eksternal seperti kenaikan harga energi dunia akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok

global juga turut memperburuk situasi. Samarinda dan Balikpapan sama-sama mencatat inflasi di atas lima persen pada tahun tersebut, menunjukkan bahwa tekanan harga terasa di seluruh wilayah provinsi

Setelah lonjakan tajam pada 2022, inflasi Kalimantan Timur kembali menurun pada 2023 menjadi 3,46 persen, mendekati rata-rata nasional yang sebesar 2,61 persen. Dalam beberapa rilis resmi, BPS Kaltim menegaskan bahwa inflasi di 2023 mulai terkendali berkat upaya koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah provinsi. Kelompok pengeluaran yang masih menjadi penyumbang utama inflasi adalah makanan dan minuman, khususnya beras, cabai, dan daging ayam ras. Namun di sisi lain, beberapa kelompok seperti perlengkapan rumah tangga dan komunikasi mengalami deflasi, membantu menahan laju inflasi secara keseluruhan. Kota Balikpapan mencatat inflasi 3,60 persen, sedangkan Samarinda sedikit lebih rendah di angka 3,37 persen. Perbedaan antarwilayah ini mencerminkan variasi kondisi pasar, logistik, serta tingkat ketergantungan terhadap komoditas tertentu di masing-masing kota.

Tren penurunan inflasi berlanjut pada tahun 2024, di mana angka inflasi tahunan Kalimantan Timur turun signifikan menjadi 1,47 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kaltim edisi Januari 2025, inflasi tertinggi di provinsi ini terjadi di Kabupaten Berau sebesar 2,69 persen, sedangkan yang terendah di Kota Balikpapan sebesar 1,11 persen. Penurunan ini menunjukkan efektivitas pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk peningkatan ketersediaan stok pangan strategis dan pelaksanaan operasi pasar di berbagai kota. Menurut laporan BPS, inflasi di tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau; perawatan pribadi; serta pendidikan. Sementara itu, kelompok transportasi dan komunikasi mengalami penurunan harga yang cukup membantu dalam menekan inflasi keseluruhan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa struktur konsumsi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang masih didominasi oleh kebutuhan pokok menjadikan kelompok pangan sebagai penentu utama dinamika inflasi daerah.

Inflasi Berau yang hampir selalu mencatat inflasi tertinggi di provinsi ini selama beberapa tahun terakhir juga menarik untuk diperhatikan. Faktor geografis dan logistik berperan penting di sini: lokasi Berau yang relatif jauh dari pusat distribusi barang membuat biaya transportasi dan distribusi lebih tinggi, sehingga harga barang di pasaran lebih mudah naik saat pasokan terganggu. Sebaliknya, Balikpapan sebagai kota dengan akses logistik yang lebih baik dan infrastruktur pelabuhan yang kuat, cenderung lebih stabil terhadap gejolak harga. Perbedaan semacam ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang bersifat wilayah-spesifik dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Timur.

Jika kita pantau data inflasi kumulatif atau inflasi tahun kalender (year-to-date dalam setahun) menunjukkan bagaimana harga-harga rata-rata bergerak dari awal tahun sampai bulan tertentu dibandingkan dengan titik awal tahun tersebut. Data yang Anda lampirkan—Tabel 6.2 (2022), 6.3 (2023), dan 6.4 / 6.5 (2024/2025) —menggambarkan bahwa inflasi di Kalimantan Timur (serta di kota-kota seperti Balikpapan, Samarinda, Berau, Penajam Paser Utara) cenderung meningkat di awal tahun, mencapai puncak sekitar pertengahan hingga

akhir tahun, kemudian melambat menjelang akhir tahun, serta pada 2025 menunjukkan gejala perlambatan yang lebih jelas.

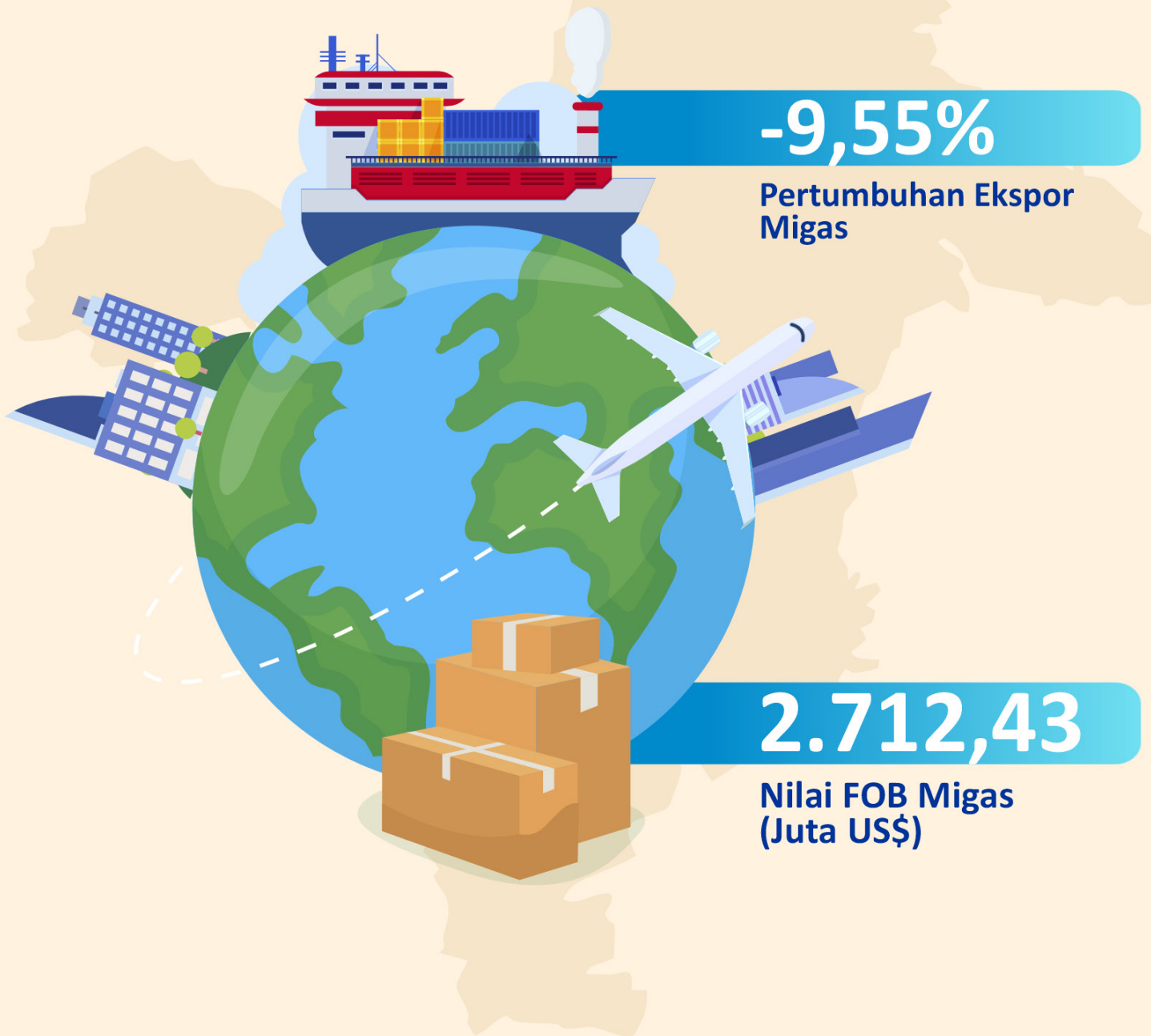
Pada tahun 2022 (Tabel 6.2), inflasi kumulatif Kalimantan Timur menunjukkan kenaikan progresif dari bulan ke bulan: Januari inflasi 0,87 %, Februari 0,53 %, Maret 1,23 %, April 2,42 %, Mei 3,02 %, Juni 3,51 %, kemudian berlanjut ke Juli–Desember, hingga Desember berada pada kisaran 5,51 %. Pola mirip terlihat di kota-kota: Balikpapan misalnya memulai 0,81 % di Januari dan berakhir di 5,51 % di Desember. Demikian halnya dengan Kota Samarinda. Data ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi cukup konsisten sepanjang tahun 2022, dengan akumulasi yang signifikan di akhir tahun. Tahun 2022 memang dikenal sebagai tahun di mana inflasi nasional dan regional melonjak karena dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi, adanya kenaikan harga energi, dan gangguan rantai pasok. Memasuki 2023 (Tabel 6.3), pola masih berupa kenaikan kumulatif seiring berjalannya bulan, tetapi laju kenaikan relatif lebih stabil dibanding 2022. Misalnya, Kalimantan Timur mencapai sekitar 1,13 % pada Maret, kemudian 1,56 % pada April, terus naik hingga Oktober–November. Angka inflasi kumulatif akhir tahun berada di kisaran yang lebih rendah dibanding 2022. Inflasi Kota Balikpapan menunjukkan inflasi kumulatif Januari 0,41 %, Februari 0,73 %, Maret 1,40 %, dan seterusnya. Samarinda pun memulai 0,44 % di Januari dan terus naik. Dibandingkan 2022, pola kenaikan masih ada, tetapi menuju Desember cenderung lebih landai. Hal ini mencerminkan bahwa tekanan harga masih ada, tetapi tidak sekuat pada periode lonjakan besar tahun 2022.

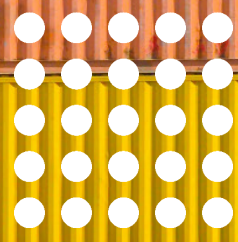
Tahun 2024 (Tabel 6.4) menunjukkan perubahan menarik—awal tahun 2024 inflasi kumulatif relatif lebih tinggi dibanding 2023, namun menuju pertengahan hingga akhir tahun, akselerasi harga tampak menurun. Misalnya, inflasi kumulatif Kalimantan Timur mencapai 2,95 % di Januari, 3,28 % di Februari, 3,62 % di April, dan kemudian naik ke 3,29 % di Mei, sebelum melambat ke 1,47 % di Desember (anggapan berdasarkan data tabel yang menunjukkan inflasi tahunan 1,47 %). Kota-kota juga mengikuti pola serupa: Balikpapan memulai di 3,54 % pada Januari, dan turun ke 1,11 % di Desember. Penajam (PPU) mulai 3,10 % Januari, turun ke 1,25 % di Desember. Samarinda dari 2,61 % ke 1,50 %. Kabupaten Berau menunjukkan tekanan yang relatif lebih tinggi di sepanjang tahun, misalnya 2,26 % Januari, 2,64 % pada Agustus, dan 2,69 % di Desember. Berdasarkan kumulatif 2025 (Tabel 6.5) hingga Juni, tampak fenomena perlambatan yang cukup nyata: inflasi kumulatif Kalimantan Timur pada Juni 2025 tercatat 1,62 %. Kota-kota seperti Balikpapan mencatat 1,77 %, Penajam 1,26 %, Samarinda 1,77 %, Berau 0,77 %. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di awal tahun 2025 tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, artinya ada upaya manajemen harga atau peredaman tekanan eksternal yang relatif berhasil di wilayah ini.

Pada tahun 2024 disebutkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year) Kaltim sebesar 1,47 %, sedikit di bawah rata-rata nasional (1,57 %), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi di provinsi tersebut. Pada September 2024, inflasi y-o-y Kaltim mencapai 2,16 % dan Kabupaten Berau tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi (3,34 %) di bulan tersebut. Selain itu, analisis dalam sepanjang tahun 2024, meskipun inflasi y-o-y menunjukkan kenaikan harga tiap bulan dibanding tahun

sebelumnya, inflasi bulanan (m-to-m) juga mengalami periode deflasi di beberapa bulan. Pola ini terjadi karena terdapat suplai komoditas tertentu misalnya panen raya sayuran atau stok pangan melimpah yang menyebabkan harga sejumlah bahan pokok terjadi penurunan sementara. Adanya kontribusi kelompok pengeluaran tertentu: kelompok makanan, minuman & tembakau, perumahan/utilitas, kesehatan, dan pendidikan cenderung menjadi pendorong utama inflasi pada banyak periode. Dikarenakan harga barang kebutuhan pokok dan biaya utilitas/energi sangat mudah bergerak naik. Pada kelompok transportasi dan komunikasi kadang memberikan andil deflasi dalam periode tertentu, yang membantu meredam laju inflasi keseluruhan.

EKSPOR IMPOR





7. Ekspor Impor

Ekspor

Perkembangan ekspor Kalimantan Timur selama periode 2015–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, baik pada komoditas migas (minyak dan gas) maupun nonmigas. Secara umum, ekspor migas mendominasi total ekspor provinsi ini dengan rata-rata kontribusi di atas 80 persen, meskipun nilainya mengalami penurunan signifikan pada beberapa tahun. Sementara itu, ekspor nonmigas yang terdiri atas hasil industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan nonenergi menunjukkan tren yang lebih beragam, dengan periode kenaikan yang tajam diikuti penurunan tajam pada tahun-tahun tertentu. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor energi serta belum stabilnya diversifikasi ekspor di luar migas.

Ekspor nonmigas pada tahun 2015–2016 mengalami penurunan cukup tajam, dari 11,07 miliar US\$ menjadi 10,07 miliar US\$, dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -19,82 persen dan -9,00 persen. Namun, pada tahun 2017 hingga 2018, terjadi kebangkitan signifikan dengan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 31,35 persen dan 13,60 persen. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2021, ketika ekspor nonmigas melonjak hingga 90,63 persen atau hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini kemungkinan dipicu oleh kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara dan kelapa sawit, setelah pandemi

Tabel 7.1 Nilai FOB, Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Kalimantan Timur, 2015-2024

Tahun	Nonmigas (juta US\$)	Migas (juta US\$)	Pertumbuhan Nonmigas (%)	Pertumbuhan Migas (%)	Peranan Nonmigas (%)	Peranan Migas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	11.069,11	6.414,17	-19,82	-40,98	63,31	36,69
2016	10.072,71	3.781,67	-9,00	-41,04	72,70	27,30
2017	13.230,03	4.302,83	31,35	13,78	75,46	24,54
2018	15.029,36	3.356,38	13,60	-22,00	81,74	18,26
2019	14.282,49	1.900,72	-4,97	-43,37	88,25	11,75
2020	11.831,99	1.148,29	-17,16	-39,59	91,15	8,85
2021	22.554,76	1.605,15	90,63	39,79	93,36	6,64
2022	33.059,32	2.998,93	46,57	86,83	91,68	8,32
2023	24.312,28	2712,43	-26,46	-9,55	89,96	10,04
2024	22.158,25	2.507,40	-8,86	-7,56	89,83	10,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

COVID-19. Meski demikian, sejak 2022 hingga 2024 tren kembali menurun—pertumbuhan negatif sebesar -26,46 persen di 2023 dan -8,86 persen di 2024—menunjukkan gejala koreksi pasar dan melemahnya

permintaan global.

Kinerja ekspor migas memperlihatkan pola yang cenderung menurun dalam jangka panjang, meskipun dengan beberapa periode pemulihan. Dari tahun 2015 ke 2016, nilai ekspor migas anjlok lebih dari 40 persen, dan penurunan ini berlanjut hingga 2019 dengan kontraksi besar sebesar -43,37 persen. Tahun 2021 dan 2022 menjadi masa pemulihan signifikan, di mana ekspor migas tumbuh 39,79 persen dan 86,83 persen—diduga karena meningkatnya harga minyak dunia pascapulihnya aktivitas ekonomi global. Namun, tren ini tidak bertahan lama karena pada 2023 dan 2024 kembali mencatatkan pertumbuhan negatif, masing-masing -9,55 persen dan -7,56 persen. Hal ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap migas masih menghadapi tantangan struktural, baik dari sisi produksi maupun volatilitas harga internasional.

Dari sisi struktur, peranan migas dalam total ekspor Kalimantan Timur mengalami peningkatan tajam dari 63,31 persen pada 2015 menjadi sekitar 90 persen pada 2024. Sebaliknya, kontribusi nonmigas terus menurun dari 36,69 persen menjadi hanya 10,17 persen pada akhir periode. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekalipun nilai ekspor nonmigas meningkat pada beberapa tahun, dominasi sektor migas tetap tidak tergoyahkan. Ketergantungan tinggi terhadap migas mengindikasikan lemahnya diversifikasi ekonomi ekspor, yang berpotensi meningkatkan risiko ketika harga energi global turun atau terjadi gangguan produksi.

Periode 2017 dan 2018 menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekspor nonmigas. Nilainya naik menjadi 13,23 miliar US\$ pada 2017 dan 15,03 miliar US\$ pada 2018, dengan pertumbuhan positif 31,35 persen dan 13,60 persen. Peningkatan ini dikaitkan dengan membaiknya harga komoditas batubara di pasar global serta meningkatnya permintaan dari negara tujuan utama seperti Tiongkok dan India. Di sisi lain, sektor industri pengolahan di dalam negeri mulai menunjukkan peningkatan kapasitas produksi.

Namun, momentum positif tersebut tidak bertahan lama. Pada 2019 hingga 2020, ekspor nonmigas kembali mengalami penurunan berturut-turut sebesar -4,97 persen dan -17,16 persen. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memperparah kondisi tersebut, karena permintaan global menurun drastis dan rantai pasok terganggu. Pembatasan aktivitas ekonomi dan transportasi internasional membuat ekspor nonmigas dari Kalimantan Timur menurun cukup signifikan, terutama dari sektor kehutanan dan pertambangan nonenergi.

Setelah fase krisis pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik luar biasa bagi ekspor nonmigas Kalimantan Timur. Nilainya melonjak menjadi 22,55 miliar US\$, tumbuh 90,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan yang hampir dua kali lipat ini sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi global dan naiknya harga batubara internasional. Permintaan energi alternatif selain minyak meningkat tajam, dan Kalimantan Timur diuntungkan sebagai salah satu produsen batubara utama Indonesia..

Pada tahun 2022, tren pertumbuhan positif masih berlanjut dengan kenaikan 46,57 persen untuk ekspor nonmigas. Nilai ekspornya mencapai 33,05 miliar US\$, mencetak rekor tertinggi selama periode analisis. Kinerja ini menandakan bahwa sektor nonmigas sebenarnya memiliki potensi besar apabila didukung dengan kebijakan hilirisasi dan penguatan industri lokal. Namun, tingginya nilai ekspor tersebut juga disebabkan oleh

faktor eksternal seperti konflik geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dan bahan baku.

Mulai tahun 2023 hingga 2024, ekspor nonmigas kembali menurun tajam, masing-masing -26,46 persen dan -8,86 persen. Nilainya merosot dari 33,05 miliar menjadi 22,16 miliar US\$. Koreksi harga batubara internasional dan penurunan permintaan dari negara mitra utama menjadi penyebab utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tahan sektor nonmigas Kalimantan Timur terhadap tekanan global masih rendah dan sangat tergantung pada fluktuasi harga komoditas primer.

Kinerja ekspor migas memiliki dinamika berbeda. Sejak 2015, ekspor migas menurun drastis dari 6,41 miliar US\$ menjadi 1,14 miliar US\$ pada 2020, atau turun lebih dari 80 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi minyak dan gas di wilayah Kalimantan Timur akibat berkurangnya cadangan lapangan tua dan keterbatasan investasi baru di sektor hulu migas. Situasi ini diperburuk dengan anjloknya harga minyak dunia pada 2015–2016 serta dampak pandemi di 2020.

Setelah mengalami kontraksi panjang, sektor migas kembali pulih pada 2021–2022 dengan pertumbuhan tinggi masing-masing 39,79 persen dan 86,83 persen. Nilai ekspornya meningkat hingga hampir 3 miliar US\$ pada 2022. Lonjakan ini sejalan dengan kebangkitan ekonomi global dan meningkatnya harga minyak mentah dunia. Meski begitu, pemulihan tersebut tidak berlangsung stabil karena kapasitas produksi dalam negeri masih terbatas. Pada dua tahun terakhir, ekspor migas kembali mengalami perlambatan dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,55 persen di 2023 dan -7,56 persen di 2024. Nilai ekspor migas turun menjadi 2,51 miliar US\$. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya volume ekspor gas cair (LNG) dan beralihnya sebagian pasar ke sumber energi alternatif

Impor

Perkembangan nilai impor Provinsi Kalimantan Timur sepanjang periode 2015 hingga 2024 memperlihatkan

Tabel 7.2 Nilai Impor Provinsi Kalimantan Timur (Juta USD) 2015-2024

Tahun	Nonmigas (juta US\$)	Migas (juta US\$)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	4.196,05	1.354,43	5.550,48
2016	2.612,98	1.098,07	3.711,05
2017	2.402,63	821,68	3.224,31
2018	3.206,18	1.417,95	4.624,13
2019	1.409,31	1.096,90	2.506,21
2020	874,48	1.085,84	1.960,32
2021	1.736,15	1.593,51	3.329,66
2022	3.670,89	1.747,08	5.417,98
2023	4.078,99	1.491,82	5.570,81
2024	3.502,26	70,07	1.495,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi total nilai impor, komposisi antara migas dan nonmigas, maupun peran relatif kedua sektor tersebut terhadap total nilai impor. Jika dilihat secara umum, nilai impor Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh sektor migas yang selalu mendominasi komposisi impor selama satu dekade terakhir. Namun demikian, sektor nonmigas juga memperlihatkan tren yang menarik karena pada periode tertentu kontribusinya justru lebih tinggi dibandingkan sektor migas. Hal ini mencerminkan ketergantungan struktur impor Kalimantan Timur pada kebutuhan energi sekaligus adanya diversifikasi ke sektor-sektor nonmigas.

Pada tahun 2015, nilai impor Kalimantan Timur mencapai titik tertinggi dalam periode awal dekade, yaitu sebesar 5.550,48 juta US\$. Dari jumlah tersebut, sektor migas menyumbang sebesar 4.196,05 juta US\$ atau sekitar 75,60 persen. Sementara itu, sektor nonmigas berkontribusi sebesar 1.354,43 juta US\$ atau 24,40 persen. Dominasi migas yang sangat tinggi pada tahun ini menggambarkan bahwa ketergantungan Kalimantan Timur terhadap impor migas masih sangat kuat. Faktor ini dapat disebabkan oleh tingginya kebutuhan bahan bakar dan energi untuk mendukung aktivitas industri, khususnya industri berbasis ekstraktif seperti pertambangan dan pengolahan sumber daya alam.

Memasuki tahun 2016, terjadi penurunan signifikan pada nilai impor, yaitu hanya sebesar 3.711,05 juta US\$. Penurunan ini terutama berasal dari berkurangnya impor migas yang turun menjadi 2.612,98 juta US\$. Walaupun perannya masih cukup dominan (70,41 persen), namun terlihat adanya kecenderungan menurunnya ketergantungan pada migas. Nonmigas justru relatif stabil di angka 1.098,07 juta US\$ dengan kontribusi yang meningkat menjadi 29,59 persen. Perubahan struktur ini dapat dikaitkan dengan kondisi harga minyak dunia yang pada periode tersebut memang mengalami fluktuasi tajam akibat pelemahan permintaan global. Hal ini memberikan dampak pada berkurangnya volume maupun nilai impor migas di tingkat daerah.

Tren penurunan berlanjut pada tahun 2017, di mana nilai impor total kembali merosot menjadi 3.224,31 juta US\$. Sektor migas menyumbang 2.402,63 juta US\$ atau 74,52 persen, sedangkan nonmigas turun menjadi 821,68 juta US\$ atau 25,48 persen. Secara absolut, baik migas maupun nonmigas sama-sama mengalami penurunan, yang menunjukkan melemahnya aktivitas perdagangan internasional di Kalimantan Timur. Faktor global seperti melemahnya harga komoditas, serta faktor domestik berupa penyesuaian kebijakan energi nasional, turut mempengaruhi angka tersebut.

Tahun 2018 menandai adanya pemulihan dalam aktivitas impor. Total impor naik menjadi 4.624,13 juta US\$, dengan migas mencapai 3.206,18 juta US\$ (69,34 persen) dan nonmigas meningkat cukup signifikan menjadi 1.417,95 juta US\$ (30,66 persen). Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan bahan baku dan barang modal nonmigas, sejalan dengan geliat pertumbuhan ekonomi regional yang mulai membaik setelah perlambatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, pada 2019 terjadi penurunan kembali dengan total impor hanya sebesar 2.506,21 juta US\$. Penurunan ini terutama disebabkan oleh merosotnya impor migas yang hanya sebesar 1.409,31 juta US\$. Peran migas turun drastis menjadi 56,23 persen, sementara nonmigas relatif stabil di angka 1.096,90 juta US\$ dengan kontribusi meningkat menjadi 43,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut sektor nonmigas mulai mengambil peran lebih besar dalam struktur impor Kalimantan Timur.

Situasi yang lebih ekstrem terlihat pada tahun 2020, yaitu ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Total impor Kalimantan Timur anjlok menjadi hanya 1.960,32 juta US\$. Angka ini merupakan titik terendah selama periode 2015–2024. Sektor migas hanya berkontribusi sebesar 874,48 juta US\$ atau 44,61 persen, sementara nonmigas sebesar 1.085,84 juta US\$ atau 55,39 persen. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, nonmigas mendominasi struktur impor Kalimantan Timur. Perubahan ini jelas dipengaruhi oleh menurunnya permintaan energi akibat pembatasan aktivitas ekonomi serta turunnya harga minyak dunia. Sementara itu, impor nonmigas tetap relatif stabil karena adanya kebutuhan terhadap barang-barang kesehatan, alat medis, serta produk esensial lain selama masa pandemi.

Memasuki tahun 2021, pemulihan mulai terlihat. Nilai impor meningkat menjadi 3.329,66 juta US\$, dengan migas sebesar 1.736,15 juta US\$ (52,14 persen) dan nonmigas sebesar 1.593,51 juta US\$ (47,86 persen). Walaupun migas kembali sedikit dominan, namun kontribusi nonmigas tetap tinggi, mendekati 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi ditopang bukan hanya oleh energi, tetapi juga oleh kebutuhan barang modal dan barang konsumsi nonmigas.

Pemulihan berlanjut pada 2022 dengan total impor mencapai 5.417,98 juta US\$. Migas kembali mendominasi dengan nilai 3.670,89 juta US\$ atau 67,75 persen, sementara nonmigas sebesar 1.747,08 juta US\$ atau 32,25 persen. Kenaikan ini menunjukkan rebound ekonomi yang cukup kuat, seiring meningkatnya mobilitas global, naiknya harga energi dunia, serta peningkatan permintaan domestik.

Tahun 2023 menjadi puncak baru dalam periode yang ditinjau. Nilai impor mencapai 5.570,81 juta US\$, sedikit lebih tinggi dari tahun 2015. Migas kembali sangat dominan dengan nilai 4.078,99 juta US\$ atau 73,22 persen. Nonmigas turun ke 1.491,82 juta US\$ dengan kontribusi 26,78 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pada masa pemulihan penuh pascapandemi, kebutuhan energi di Kalimantan Timur meningkat tajam untuk mendukung aktivitas industri, transportasi, dan pembangunan infrastruktur.

Terakhir, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 4.998,24 juta US\$. Migas masih mendominasi dengan nilai 3.502,26 juta US\$ (70,07 persen), sedangkan nonmigas sebesar 1.495,98 juta US\$ (29,93 persen). Walaupun turun dibandingkan tahun sebelumnya, struktur impor tetap menunjukkan pola klasik di mana migas mendominasi dengan porsi sekitar 70 persen.

Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur

Neraca pembayaran Kalimantan Timur selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang konsisten surplus setiap tahun, mencerminkan kekuatan ekspor yang jauh melampaui nilai impor. Surplus ini menandakan bahwa provinsi tersebut merupakan wilayah dengan kapasitas ekspor tinggi dan ketergantungan impor yang relatif rendah. Struktur ekonomi yang berorientasi ekspor, terutama di sektor migas dan batubara, menjadi pendorong utama terjaganya neraca perdagangan positif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kalimantan Timur masih menjadi salah satu penopang utama neraca perdagangan nasional Indonesia.

Nilai ekspor Kalimantan Timur pada awal periode (2015–2018) bergerak fluktuatif. Pada tahun 2015 ekspor mencapai 17,48 miliar US\$, turun menjadi 13,85 miliar US\$ di 2016 akibat menurunnya harga minyak dan batubara dunia. Namun, ekspor kembali meningkat pada 2017 dan 2018 masing-masing menjadi 17,53 dan 18,38 miliar US\$. Kenaikan ini berkaitan erat dengan pemulihan harga komoditas global dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan utama seperti Tiongkok, India, dan Jepang. Pola ini menunjukkan ketergantungan ekspor Kalimantan Timur terhadap siklus harga komoditas internasional.

Sementara itu, impor justru menunjukkan tren menurun dalam sebagian besar periode—dari 5,55 miliar US\$ di 2015 menjadi hanya sekitar 2,5 miliar US\$ pada 2019–2020. Kondisi ini menunjukkan efisiensi industri lokal yang lebih mandiri serta terbatasnya kebutuhan impor bahan baku di masa pandemi. Namun, sejak 2021 hingga 2023 impor kembali naik seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas industri.

Tabel 7.3 Neraca Pembayaran Provinsi Kalimantan Timur (Juta USD) 2015-2024

Tahun	Impor (juta.US\$)	Ekspor (juta.US\$)	Neraca.Pembayaran (juta.US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	5.550,48	17.483,28	11.932,80
2016	3.711,05	13.854,38	10.143,33
2017	3.224,31	17.532,86	14.308,55
2018	4.624,13	18.385,74	13.761,61
2019	2.506,21	16.183,21	13.677,00
2020	1.960,32	12.980,28	11.019,96
2021	3.329,66	24.159,91	20.830,25
2022	5.417,98	36.058,25	30.640,27
2023	5.570,81	26.840,72	21.269,91
2024	4.998,24	24.665,65	19.667,41

Sumber: Badan.Pusat.Statistik.Provinsi.Kalimantan.Timur

Surplus neraca pembayaran Kalimantan Timur terus terjaga di atas 10 miliar US\$ sepanjang dekade terakhir, bahkan sempat melonjak drastis menjadi 30,64 miliar US\$ pada tahun 2022 — angka tertinggi dalam periode ini. Kenaikan tersebut dipicu oleh kombinasi antara ekspor tinggi akibat lonjakan harga komoditas energi

global dan nilai impor yang masih terkendali. Meski pada 2023 surplus menurun menjadi 21,27 miliar US\$, serta sedikit turun lagi menjadi 19,67 miliar US\$ di 2024, kondisi ini tetap menunjukkan kinerja eksternal daerah yang sangat kuat. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh penyesuaian harga komoditas internasional dan normalisasi perdagangan pascapandemi.

Meskipun neraca pembayaran selalu positif, struktur ekonomi Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak, gas, dan batubara. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan jangka panjang terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga energi dunia turun, surplus neraca pembayaran bisa langsung menyempit, bahkan berpotensi menurun tajam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi daerah agar kinerja perdagangan tidak hanya bergantung pada satu sektor unggulan.

Surplus yang besar dalam neraca pembayaran menunjukkan daya saing ekspor Kalimantan Timur yang tinggi, terutama dari sektor energi. Namun demikian, ketergantungan terhadap komoditas primer seperti migas dan batubara membuat surplus tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Sementara nilai impor yang relatif kecil dapat mencerminkan dua sisi: efisiensi produksi di satu sisi, tetapi juga terbatasnya aktivitas industri pengolahan yang membutuhkan bahan baku impor. Oleh karena itu, meskipun neraca pembayaran positif, struktur ekonominya masih didominasi sektor ekstraktif dengan nilai tambah rendah.

PERKEMBANGAN PARIWISATA

44791

Jumlah Wisatawan Mancanegara
2023

6.728.338

Jumlah Wisatawan Nusantara
2023

Januari	310.053
Februari	256.145
Maret	332.387
April	306.368
Mei	483.121
Juni	454.319
Juli	573.460
Agustus	521.964
September	507.079
Oktober	533.691
November	514.833
Desember	638.297





XXXXXXXXXX



8. Perkembangan Pariwisata

Pariwisata di Kalimantan Timur sangat beragam dan menawarkan berbagai pengalaman menarik bagi pengunjung. Dengan keindahan alam, kekayaan budaya, serta komitmen untuk melestarikan lingkungan, setiap kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata yang menarik di Indonesia. Pariwisata di Kalimantan Timur menawarkan keanekaragaman yang memikat, tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan daya tarik unik. Di Balikpapan, wisatawan dapat menikmati keindahan Pantai Manggar dan sejarah di Museum Perjuangan, sementara Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, memukau dengan pesona Sungai Mahakam dan Jembatan Mahakam yang megah. Kutai Kartanegara memikat dengan Taman Nasional Kutai, rumah bagi orangutan dan warisan budaya di Candi Agung Mulawarman. Berau, dengan keindahan Pulau Derawan dan Taman Nasional Kelay, menjadi surga bagi pecinta *snorkeling* dan *diving*. Sementara itu, Tana Tidung menawarkan pesona danau dan pantai yang menakjubkan, dan Mahakam Ulu mempersembahkan keindahan alam yang masih perawan dengan kesempatan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kabupaten Paser dan Kutai Timur melengkapi pengalaman wisata dengan pantai indah dan festival budaya yang kaya. Dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakat lokal, Kalimantan Timur menjadi tujuan yang menarik dan beragam bagi setiap pengunjung yang mencari petualangan dan pengalaman tak terlupakan.

Pariwisata di Kalimantan Timur mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Data perjalanan wisatawan nusantara yang menggunakan sumber *Mobile Positioning Data (MPD)* menunjukkan peningkatan yang tidak hanya konsisten, tetapi juga menggambarkan arah perkembangan sektor pariwisata di provinsi ini. Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan alam luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis, sungai besar, pantai eksotis, hingga situs budaya masyarakat lokal, tampaknya semakin menarik perhatian wisatawan domestik.

Jika ditarik garis besar, pada tahun 2021 jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kalimantan Timur tercatat 2,37 juta perjalanan. Angka ini kemudian meningkat sangat drastis di tahun 2022 menjadi 5,43 juta perjalanan, hampir dua kali lipat lebih tinggi. Lompatan ini erat kaitannya dengan kondisi nasional, di mana pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 mulai longgar, sehingga masyarakat kembali melakukan perjalanan. Tahun 2023, jumlah perjalanan kembali meningkat menjadi 6,72 juta perjalanan, menandakan adanya tren pemulihan yang berkelanjutan. Memasuki tahun 2024, Kalimantan Timur semakin solid sebagai destinasi favorit. Dalam empat bulan pertama saja (Januari–April), jumlah perjalanan telah menembus lebih dari 3,8 juta perjalanan. Jika tren ini berlanjut hingga Desember, angka tahunan 2024 akan jauh lebih tinggi

dibanding tahun sebelumnya. Data parsial tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan tren positif tersebut, meskipun angka lengkap tahunan belum tersedia.

Jika dilihat per bulan, terdapat pola musiman yang menarik. Bulan Desember hampir selalu mencatat puncak perjalanan. Pada 2023, misalnya, Desember mencapai 1,17 juta perjalanan, jauh lebih tinggi dibanding bulan lain. Hal ini jelas dipengaruhi oleh liburan akhir tahun, Natal, dan Tahun Baru, yang menjadi momentum utama bagi wisatawan untuk berlibur. Pola serupa juga terlihat di bulan Juni–Juli, yang bertepatan dengan liburan sekolah. Pada Juni 2023, jumlah perjalanan mencapai hampir 696 ribu, sementara Juli berada di level 664 ribu perjalanan. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Februari dan Maret cenderung mencatat angka lebih rendah. Hal ini wajar, mengingat kedua bulan tersebut berada di luar musim liburan panjang dan lebih banyak didominasi oleh aktivitas rutin masyarakat. Namun, meskipun lebih rendah, tren tetap menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Bila ditinjau dari distribusi kabupaten/kota tujuan wisatawan, terlihat konsentrasi yang kuat pada kota besar dan pusat ekonomi. Pada 2024, Samarinda menempati posisi teratas dengan lebih dari 3,29 juta perjalanan,

Tabel 8.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara per Bulan dengan Provinsi Tujuan Kalimantan Timur, 2021-2024

Bulan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	165.649	310.053	641.896	932.814
Februari	154.006	256.145	579.530	907.903
Maret	194.579	332.387	580.672	860.633
April	189.339	306.368	580.561	1.163.540
Mei	211.241	483.121	643.021	922.361
Juni	233.957	454.319	695.994	890.636
Juli	137.412	573.46	663.800	906.438
Agustus	155.57	521.964	620.068	1.097.616
September	207.404	507.079	597.562	1.157.551
Oktober	243.553	533.691	560.799	998.379
November	221.625	514.833	564.435	989.602
Desember	260.542	638.297	1.174.998	1.378.485
Total	2.374.877	5.431.717	6.728.338	12.205.958

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

disusul oleh Balikpapan dengan 2,63 juta perjalanan. Kedua kota ini memang memiliki peran ganda: selain sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, keduanya juga menawarkan destinasi wisata keluarga, kuliner, dan hiburan perkotaan yang lengkap.

Selain itu, Kutai Kartanegara muncul sebagai magnet penting dengan 2,34 juta perjalanan. Kabupaten ini memiliki daya tarik wisata alam dan budaya yang khas, seperti wisata sungai Mahakam, ladang budidaya

perikanan, serta kekayaan budaya Dayak. Kota Bontang dan Kutai Timur juga tidak kalah penting, meskipun angka perjalanannya lebih rendah, masing-masing sekitar 512 ribu dan 1,02 juta perjalanan pada 2024. Kabupaten lain seperti Berau, yang terkenal dengan Kepulauan Derawan, menyumbang sekitar 403 ribu perjalanan. Angka ini mungkin terlihat lebih kecil, tetapi justru mengindikasikan wisata yang lebih tersegmentasi: wisata bahari yang cenderung menarik wisatawan dengan motivasi khusus dan durasi tinggal lebih lama.

Sebaliknya, kabupaten dengan aksesibilitas terbatas seperti Mahakam Ulu mencatat jumlah perjalanan yang sangat kecil, hanya sekitar 55 ribu perjalanan pada 2024. Hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang: keterbatasan infrastruktur membuat destinasi ini masih belum banyak dijangkau, tetapi di sisi lain menyimpan potensi besar bagi wisatawan.

Selain tujuan, data asal wisatawan juga memberikan gambaran yang menarik. Pada 2024, jumlah perjalanan yang berasal dari Samarinda menempati posisi tertinggi dengan lebih dari 3,34 juta perjalanan, disusul oleh Kutai Kartanegara (2,76 juta perjalanan) dan Balikpapan (2,28 juta perjalanan). Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas wisatawan di Kalimantan Timur sebagian besar bersifat intra-provinsi. Artinya, masyarakat yang tinggal di Kalimantan Timur sendiri cukup aktif berwisata di dalam daerah, baik ke kota lain maupun destinasi alam di kabupaten sekitarnya.

Tabel 8.2 Rata-rata Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Asal Tamu (hari), 2024

Bulan	Tamu Mancanegara	Tamu Nusantara	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	3,03	1,68	1,70
Februari	2,31	1,61	1,62
Maret	5,87	1,68	1,74
April	2,73	1,58	1,59
Mei	2,51	1,85	1,85
Juni	2,75	1,81	1,81
Juli	2,28	1,77	1,78
Agustus	3,01	1,72	1,74
September	2,18	1,78	1,78
Oktober	2,57	1,72	1,73
November	2,07	1,68	1,68
Desember	2,03	1,58	1,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat dari rata-rata lama menginap pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang di Kalimantan Timur relatif stabil, dengan variasi yang mencerminkan dinamika kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Secara umum, tamu mancanegara memiliki lama tinggal lebih panjang

dibandingkan tamu nusantara, yang menandakan bahwa wisatawan asing cenderung memanfaatkan waktu lebih lama untuk berlibur atau urusan bisnis di daerah ini. Nilai rata-rata total lama menginap berkisar antara 1,59 hingga 1,85 hari, menandakan bahwa sebagian besar tamu menginap dalam jangka pendek, tipikal bagi daerah dengan aktivitas bisnis dan perjalanan dinas yang tinggi.

Tamu mancanegara menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun. Puncak lama menginap terjadi pada Maret 2024 dengan rata-rata 5,87 hari, jauh di atas bulan-bulan lainnya. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan kegiatan internasional atau event khusus yang menarik kunjungan wisatawan asing dalam waktu lebih lama, seperti pameran, konferensi, atau festival pariwisata. Sementara itu, periode November dan Desember mencatat rata-rata terendah sekitar 2,03 hari, yang bisa jadi disebabkan oleh menurunnya kegiatan wisata dan bisnis menjelang akhir tahun. Tren ini menunjukkan bahwa keberadaan event internasional berpengaruh besar terhadap durasi kunjungan tamu mancanegara.

Berbeda dengan wisatawan asing, tamu nusantara menunjukkan pola yang lebih stabil sepanjang tahun dengan rata-rata menginap antara 1,58 hingga 1,85 hari. Lama menginap yang relatif singkat ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengunjung domestik datang untuk urusan pekerjaan, perjalanan dinas, atau kunjungan singkat. Kenaikan tertinggi terjadi pada Mei dan Juni sebesar 1,85 hari, yang dapat dikaitkan dengan periode libur panjang nasional seperti Idulfitri dan pertengahan tahun. Pola ini memperlihatkan bahwa pergerakan wisatawan nusantara sangat dipengaruhi oleh kalender libur nasional serta kegiatan pemerintahan atau bisnis regional.

Tabel 8.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2024

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	206	204	14	-	32	316
Februari	168	162	15	-	33	471
Maret	188	97	25	-	322	261
April	349	13	12	-	324	378
Mei	208	23	16	-	466	208
Juni	262	18	-	-	391	291
Juli	300	34	116	163	523	558
Agustus	294	13	-	163	526	527
September	415	9	-	-	584	504
Oktober	320	1	-	9	363	402
November	253	15	-	1	486	648
Desember	62	-	-	7	441	330
Jumlah	3.025	589	198	343	4.491	4.894

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Sedangkan jika dilihat perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Timur selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi tajam yang mencerminkan dinamika global, terutama dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mencapai 3.025 orang, namun anjlok drastis menjadi hanya 589 orang pada 2020 dan 198 orang pada 2021 akibat pembatasan perjalanan internasional. Memasuki 2022, sektor pariwisata mulai bangkit dengan 343 kunjungan, dan lonjakan signifikan terjadi pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 4.491 dan 4.894 kunjungan, menandai proses pemulihan yang kuat dan meningkatnya kembali minat wisatawan asing terhadap Kalimantan Timur. Bulan-bulan dengan kunjungan tertinggi di tahun 2024 adalah November (648 wisatawan) dan Juli (558 wisatawan), menandakan bahwa pertengahan hingga akhir tahun menjadi musim favorit bagi wisatawan mancanegara. Pola ini bisa berkaitan dengan penyelenggaraan berbagai agenda budaya dan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, serta membaiknya konektivitas penerbangan dan fasilitas pendukung wisata di Samarinda, Balikpapan, dan destinasi sekitarnya.

Tabel 8.4 Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Klasifikasi Bintang (persen), 2024

Bulan	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	30,63	46,14	54,37	57,95	54,55	53,52
Februari	32,43	53,28	61,79	60,90	75,19	60,71
Maret	35,77	49,20	61,76	57,39	57,72	57,44
April	38,33	46,41	58,23	54,14	45,21	53,62
Mei	40,60	47,93	62,81	56,50	62,39	58,12
Juni	50,54	54,17	66,73	57,63	74,31	62,38
Juli	53,04	48,53	66,33	62,93	70,53	63,04
Agustus	43,26	42,89	65,51	56,63	64,13	58,82
September	42,66	50,73	61,18	61,90	69,09	60,48
Oktober	49,62	51,09	64,67	62,27	70,13	62,39
November	54,04	54,51	67,82	69,93	75,62	67,39
Desember	52,65	53,17	69,32	72,65	75,70	68,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2023 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, mencerminkan variasi dalam aktivitas pariwisata, kegiatan bisnis, dan mobilitas masyarakat. Jika dibandingkan dengan 2022, tren pada 2023 memperlihatkan adanya penurunan di beberapa segmen hotel berbintang rendah, tetapi sekaligus kenaikan yang lebih stabil pada hotel berbintang empat dan lima. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis menuju kelas hotel yang lebih tinggi.

Memasuki 2023, TPK hotel berbintang satu dan dua berada pada kisaran rendah, rata-rata sekitar 30–50 persen. Misalnya, pada Januari 2023, hotel bintang satu hanya terisi 30,63 persen, sedangkan bintang dua mencapai 46,14 persen. Angka ini jauh di bawah TPK bintang empat dan lima yang masing-masing mencatat 57,95 persen dan 54,55 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa wisatawan atau pengunjung lebih banyak memilih kenyamanan dan fasilitas lengkap, kemungkinan besar dipengaruhi oleh aktivitas pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE) yang meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sebaliknya, hotel berbintang rendah kehilangan daya tarik karena dianggap kurang mampu menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan perjalanan bisnis maupun wisata keluarga.

Pada kuartal pertama 2023, meskipun terjadi variasi, pola yang terlihat adalah stabilnya TPK pada hotel menengah ke atas. Contohnya, Februari 2023 memperlihatkan lonjakan signifikan pada hotel bintang lima yang mencapai 75,19 persen, jauh di atas rata-rata gabungan sebesar 60,71 persen. Sementara itu, hotel bintang satu justru turun menjadi 32,43 persen. Hal ini memperkuat dugaan bahwa konsumen di Kalimantan Timur cenderung memilih akomodasi premium. Tidak hanya karena fasilitas, tetapi juga faktor lokasi strategis dan dukungan jaringan hotel besar yang mampu menjawab kebutuhan korporasi serta ekspatriat, terutama di daerah dengan aktivitas industri dan energi yang kuat seperti Balikpapan dan Samarinda.

Bergerak ke pertengahan tahun 2023, pola kenaikan semakin terlihat. Pada Mei hingga Juni 2023, TPK gabungan berada di kisaran 58–62 persen. Hotel bintang lima kembali mencatat angka tinggi, seperti 74,31 persen pada Juni, menunjukkan momentum kunjungan yang lebih padat. Juni biasanya bertepatan dengan musim liburan sekolah, sehingga ada kombinasi antara perjalanan wisata domestik dan kegiatan bisnis. Sebaliknya, hotel berbintang satu tetap rendah, meskipun ada sedikit kenaikan hingga 50,54 persen pada bulan tersebut. Namun, angka ini masih belum mampu menyamai kinerja hotel berbintang tiga hingga lima yang sudah melampaui 60 persen.

Memasuki semester kedua 2023, tren TPK relatif lebih stabil, berada pada kisaran 58–68 persen secara gabungan. Bulan Agustus dan September menunjukkan konsistensi dengan angka gabungan sekitar 60 persen. Hal menarik terjadi pada Oktober hingga Desember 2023, di mana TPK bintang empat dan lima stabil tinggi, bahkan mencapai puncak 75,70 persen pada Desember untuk hotel bintang lima. Hal ini sejalan dengan periode akhir tahun, yang biasanya dipenuhi dengan liburan Natal dan Tahun Baru, serta agenda rapat korporasi akhir tahun. Secara keseluruhan, 2023 ditutup dengan gambaran bahwa hotel berbintang empat dan lima menjadi pilihan utama, sementara hotel berbintang satu dan dua semakin terpinggirkan.

Pada 2024, kondisi lebih dinamis. Data menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada hotel berbintang tiga, empat, dan lima di beberapa bulan. Misalnya, pada Mei 2024, TPK bintang lima mencatat 73,69 persen, sementara bintang empat bahkan lebih tinggi yaitu 71,51 persen. Angka gabungan bulan tersebut mencapai hampir 70 persen, menunjukkan permintaan yang kuat. Namun, fluktuasi juga muncul di kuartal pertama 2024. Maret misalnya, TPK bintang satu hanya 53,79 persen, sedangkan bintang empat turun ke 50,22

persen, lebih rendah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor musiman, seperti berkurangnya agenda perjalanan bisnis setelah awal tahun dan sebelum masuk musim libur panjang. Namun, tren pemulihan cepat terlihat lagi pada semester kedua 2024. Juli hingga Oktober memperlihatkan capaian gemilang, di mana TPK bintang empat dan lima masing-masing konsisten di atas 70 persen. Puncaknya terjadi pada Oktober 2024, dengan hotel bintang empat mencapai 78,08 persen dan bintang lima 71,83 persen. Angka ini menandai salah satu kinerja terbaik sektor perhotelan di Kalimantan Timur dalam periode pengamatan. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata dan bisnis sudah pulih sepenuhnya, ditopang oleh semakin banyaknya agenda nasional yang dilaksanakan di wilayah ini, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Memasuki 2025, data sementara Januari hingga Mei menunjukkan adanya penurunan cukup tajam dibandingkan 2024. Misalnya, pada Maret 2025, TPK bintang tiga hanya 38,91 persen dan gabungan turun drastis menjadi 36,43 persen, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mungkin memengaruhi adalah transisi aktivitas akibat perpindahan pusat pemerintahan ke kawasan IKN yang sedang dalam tahap pembangunan, sehingga pola perjalanan bisnis bergeser. Meski demikian, ada tanda-tanda perbaikan menjelang April hingga Mei 2025. Pada Mei, hotel bintang lima masih mampu mencatat 57,01 persen, sementara gabungan mencapai 52,67 persen. Meski tidak setinggi periode puncak di 2024, angka ini menunjukkan adanya upaya pemulihan.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

215,76

PDRB Perkapita ADHB (Juta)

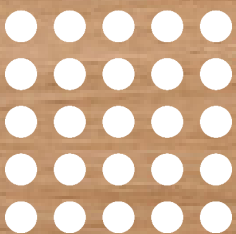


137,51

PDRB Perkapita ADHK (Juta)

Paser	131,97
Kubar	134,64
Kukar	178,92
Kutim	229,77
Berau	122,23
PPU	48,84
Mahulu	54,87
Balikpapan	136,70
Samarinda	63,20
Bontang	229,40

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



9. Pendapatan Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Kalimantan Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur besarnya perekonomian suatu wilayah. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), data tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup menarik karena Provinsi Kalimantan timur ini memang dikenal sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia di sektor pertambangan. Namun, perkembangan sektor nonmigas dan jasa juga tampak semakin menonjol dalam periode ini, menandakan adanya arah transformasi ekonomi menuju diversifikasi.

Secara keseluruhan, data PDRB Kalimantan Timur periode 2022-2025 memberikan gambaran tentang proses transisi ekonomi dari dominasi pertambangan menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Tahun 2022 menjadi puncak pertambangan, diikuti penurunan tajam pada 2023-2024, sementara sektor nonpertambangan menunjukkan tren naik. Tahun 2025 menjadi momen penting, di mana konstruksi, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta berbagai sektor jasa mulai menunjukkan kontribusi signifikan.

Memasuki 2024, ekonomi Kalimantan Timur mulai stabil dengan nilai PDRB Rp858,43 triliun. Kenaikan tipis ini menandakan bahwa meski pertambangan tidak lagi sekuat sebelumnya, sektor-sektor lain mulai memberikan peran yang lebih signifikan. Tren ini berlanjut pada 2025, ketika hingga triwulan II saja total PDRB sudah mencapai Rp221,76 triliun, yang berpotensi melampaui capaian tahunan sebelumnya apabila tren positif terus berlangsung.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan konsisten dari Rp64,99 triliun pada 2022 menjadi Rp67,68 triliun pada 2023, lalu melonjak ke Rp74,36 triliun pada 2024. Lonjakan lebih terasa di 2025 dengan capaian Rp20,78 triliun pada triwulan I dan Rp21,40 triliun pada triwulan II, yang berarti setengah tahun saja sudah mendekati 60% dari capaian 2024. Hal ini mencerminkan pentingnya sektor pangan dan kehutanan sebagai penopang ketahanan ekonomi lokal. Faktor lain adalah meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk populasi yang kian bertambah.

Tidak bisa dipungkiri, pertambangan adalah penopang utama ekonomi Kaltim. Pada 2022, kontribusinya mencapai Rp490,04 triliun. Namun, pada 2023, angka ini merosot tajam ke Rp364,25 triliun. Penurunan ini terjadi akibat anjloknya permintaan batubara dunia, fluktuasi harga minyak, serta kebijakan transisi energi global yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pada 2024, sektor ini tetap menunjukkan

tren melemah dengan Rp329,45 triliun. Bahkan pada 2025, hingga triwulan II, nilainya hanya Rp75,65 triliun, jauh di bawah capaian tahunan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor ini masih akan bertahan sebagai penyumbang terbesar dalam waktu dekat, namun arah jangka panjang menuntut Kalimantan Timur untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu rentan pada guncangan global.

Industri pengolahan mencatatkan tren pertumbuhan stabil. Dari Rp138,60 triliun pada 2022, naik ke Rp149,70 triliun di 2023, dan meningkat lagi menjadi Rp156,78 triliun di 2024. Pada 2025, hanya dalam dua triwulan pertama, sektor ini sudah menghasilkan Rp87,64 triliun. Jika tren ini berlanjut, maka pada akhir tahun 2025 industri pengolahan dapat menembus Rp170 triliun lebih. Sektor industri pengolahan

Tabel 9.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah) 2024-2025

Lapangan Usaha	Tw. I	Tw. II	2024 Tw. III	Tw. IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.734.324,09	18.232.486,07	18.420.451,84	19.975.457,20	74.362.719,20
B. Pertambangan dan Penggalian	82.412.121,36	82.812.064,33	81.015.509,25	83.219.625,35	329.459.320,30
C. Industri Pengolahan	38.303.371,59	38.692.686,63	39.222.200,63	40.562.456,10	156.780.714,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	142.286,74	146.624,25	148.627,96	151.240,11	588.779,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	112.867,95	117.381,85	118.663,80	123.168,51	472.082,12
F. Konstruksi	23.859.216,92	25.304.668,50	25.934.281,60	26.776.034,28	101.874.201,30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.081.698,12	14.760.114,80	15.063.741,73	15.290.192,64	59.195.747,30
H. Transportasi dan Pergudangan	8.736.377,99	9.947.065,08	9.837.612,85	10.134.050,89	38.655.106,81
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.233.374,09	2.371.453,28	2.456.750,86	2.566.077,29	9.627.655,52
J. Informasi dan Komunikasi	3.097.187,30	3.226.040,90	3.284.359,75	3.344.856,28	12.952.444,23
K. Jasa Keuangan	3.982.077,61	3.991.015,28	4.239.602,08	4.400.795,51	16.613.490,48
L. Real Estate	1.683.389,73	1.726.019,00	1.759.153,25	1.809.658,92	6.978.220,90
M.N. Jasa Perusahaan	447.955,82	466.119,28	478.435,45	496.228,30	1.888.738,85
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.201.249,42	5.291.014,26	4.570.684,65	4.899.805,74	18.962.754,06
P. Jasa Pendidikan	3.720.190,51	3.898.080,72	3.901.299,28	4.018.282,23	15.537.852,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.863.561,42	1.960.416,00	2.007.659,90	2.033.957,51	7.865.594,82
R.S.T.U. Jasa Lainnya	1.486.214,70	1.640.017,54	1.713.646,19	1.775.439,11	6.615.317,54
	208.097.465,36	214.583.267,78	214.172.681,05	221.577.325,99	858.430.740,18

Tabel Lanjutan 9.1

Lapangan Usaha	2025	
	Tw. I	Tw.II
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.783.262,28	21.406.530,07
B. Pertambangan dan Penggalian	76.906.596,18	75.653.411,59
C. Industri Pengolahan	42.573.224,44	45.073.032,51
D. Pengadaan Listrik dan Gas	150.687,61	155.555,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	124.028,86	127.744,44
F. Konstruksi	25.013.287,71	25.453.711,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.317.780,84	16.712.884,31
H. Transportasi dan Pergudangan	10.233.163,63	10.531.716,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.609.381,13	2.680.801,10
J. Informasi dan Komunikasi	3.412.179,01	3.496.800,91
K. Jasa Keuangan	4.245.198,82	4.157.002,39
L. Real Estate	1.860.038,81	1.887.238,92
M.N. Jasa Perusahaan	495.449,12	532.058,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.896.000,88	5.505.617,80
P. Jasa Pendidikan	4.062.052,80	4.276.625,25
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.097.446,27	2.198.768,09
R.S.T.U. Jasa Lainnya	1.744.192,71	1.916.020,61
	217.523.971,08	221.765.519,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

juga penting sebagai penggerak lapangan kerja dan memberikan nilai tambah lebih tinggi dibanding sekadar ekspor bahan mentah.

Konstruksi menjadi sektor lain yang mengalami pertumbuhan signifikan. Dari Rp71,49 triliun pada 2022 melonjak ke Rp87,00 triliun pada 2023, kemudian naik pesat ke Rp101,87 triliun pada 2024. Pendorong utama tentu saja proyek pembangunan IKN, infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga perumahan yang melibatkan ribuan tenaga kerja dan nilai investasi besar. Pada 2025, hingga triwulan II, kontribusi konstruksi sudah mencapai Rp25,45 triliun. Artinya, potensi akhir tahun bisa mendekati atau melampaui Rp105 triliun. Tren ini menegaskan peran sektor konstruksi sebagai motor pertumbuhan baru di Kalimantan Timur. Perdagangan besar dan eceran juga memperlihatkan tren positif. Dari Rp47,59 triliun di 2022 meningkat ke Rp53,17 triliun pada 2023, lalu Rp59,19 triliun pada 2024. Pada 2025, hanya dua triwulan pertama sudah menyentuh Rp33,03 triliun. Pertumbuhan ini menandakan peningkatan daya beli masyarakat, masuknya tenaga kerja baru, serta aktivitas ekonomi yang semakin menggeliat di sekitar kawasan calon IKN.

Pada sektor transportasi dan pergudangan adalah sektor yang tumbuh pesat. Dari Rp28,89 triliun pada 2022 naik ke Rp34,22 triliun pada 2023, lalu Rp38,65 triliun di 2024. Pada 2025, hanya sampai triwulan II

sudah tercatat Rp20,76 triliun. Peningkatan ini jelas berkaitan dengan tingginya mobilitas barang dan orang akibat pembangunan besar-besaran, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Selain sektor besar, jasa-jasa seperti akomodasi, informasi, komunikasi, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan real estate juga menunjukkan pertumbuhan konsisten. Misalnya, jasa akomodasi naik dari Rp7,52 triliun (2022) menjadi Rp9,62 triliun (2024). Informasi dan komunikasi tumbuh dari Rp11,05 triliun (2022) ke Rp12,95 triliun (2024). Sementara sektor pendidikan dan kesehatan juga terus meningkat, mencerminkan permintaan masyarakat terhadap layanan publik yang semakin tinggi. Khusus sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, lonjakan cukup tajam terjadi pada 2024 dengan Rp18,96 triliun, dan pada 2025 masih terus meningkat.

Tabel 9.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2024

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	180,26	161,80	183,16	238,92	215,76	212,18
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	134,41	125,76	127,37	131,24	137,51	141,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kalimantan Timur berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) dari tahun 2019 hingga 2024 memperlihatkan dinamika perekonomian daerah yang menarik dan terdapatnya proses pemulihan serta penyesuaian ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp180,26 juta dan turun menjadi Rp161,79 juta pada tahun 2020. Penurunan ini jelas disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama migas, industri, dan perdagangan. Namun, pada tahun 2021 ekonomi daerah mulai menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya nilai PDRB menjadi Rp183,16 juta per kapita, menandai awal dari proses pemulihan ekonomi.

Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana PDRB per kapita melonjak tajam hingga mencapai Rp238,92 juta. Kenaikan besar ini mencerminkan efek positif dari meningkatnya harga komoditas global, terutama batu bara dan minyak bumi, yang menjadi sektor andalan Kalimantan Timur. Namun, setelah lonjakan tersebut, terjadi sedikit penurunan pada dua tahun berikutnya – turun menjadi Rp215,76 juta pada 2023 dan Rp212,17 juta pada 2024. Penurunan ini bisa diartikan

sebagai bentuk penyesuaian ekonomi setelah euforia kenaikan harga komoditas, di mana stabilisasi harga dunia dan pengaruh inflasi mulai mengurangi nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku.

Jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) – yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terpengaruh oleh inflasi – terlihat tren yang lebih stabil dan positif. Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita ADHK mencapai Rp134,41 juta dan sempat turun ke Rp125,76 juta di tahun 2020, mengikuti pola perlambatan ekonomi akibat pandemi. Setelah itu, terjadi peningkatan bertahap setiap tahun: Rp127,37 juta pada 2021, Rp131,23 juta pada 2022, Rp137,51 juta pada 2023, dan mencapai Rp141,09 juta pada 2024. Pola kenaikan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan, menandakan bahwa pondasi ekonomi Kalimantan Timur semakin kuat secara struktural.

PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah. Data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi inflasi, sementara PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai nominal ekonomi dengan memperhitungkan perubahan harga. Kedua ukuran ini saling melengkapi, karena dari ADHK kita bisa menilai laju pertumbuhan riil, sedangkan dari ADHB dapat dilihat kapasitas ekonomi dan skala nilai tambah yang tercipta. Jika kita menelaah data PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur periode 2018–2024, maka akan terlihat dinamika yang cukup kompleks: ada daerah yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan konsisten, ada pula yang fluktuatif akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta munculnya dampak transformasi ekonomi termasuk kehadiran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Secara agregat, PDRB Kalimantan Timur ADHK tumbuh dari Rp464,7 triliun pada 2018 menjadi Rp570,8 triliun pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil. Pandemi COVID-19 tahun 2020 cukup memukul perekonomian, terlihat dari kontraksi PDRB yang turun menjadi Rp472,3 triliun, sebelum kemudian pulih secara bertahap pada 2021 dan meningkat tajam pada 2022–2024. Sementara dari sisi ADHB, skala ekonomi Kaltim melonjak dari Rp635,5 triliun pada 2018 menjadi Rp858,4 triliun pada 2024. Angka ini memperlihatkan peran dominan harga komoditas global, terutama batubara dan minyak bumi, yang memengaruhi nilai tambah nominal daerah ini. Namun, bila dilihat per kabupaten/kota, terdapat ketimpangan cukup besar yang perlu dicermati lebih jauh.

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selalu menjadi kontributor terbesar dalam struktur ekonomi Kaltim. Dari sisi ADHK, Kukar tumbuh dari Rp121,5 triliun (2018) menjadi Rp143 triliun (2024). Pertumbuhan ini stabil meskipun sempat tertekan pada 2020 saat pandemi. Sementara pada ADHB, nilai PDRB Kukar bahkan mencapai Rp240,3 triliun di tahun 2022, meskipun kemudian menurun ke Rp204,7 triliun pada 2023–2024. Fluktuasi ADHB ini erat kaitannya dengan harga komoditas batubara dan migas yang menjadi tulang punggung ekonomi Kukar. Artinya, meskipun pertumbuhan riil terjaga, daya ungkit nilai nominal Kukar

masih sangat rentan pada siklus global. Dari sini terlihat bahwa transformasi ekonomi berbasis sektor non-ekstraktif masih menjadi tantangan besar bagi Kukar ke depan.

Kutai Timur (Kutim) juga menunjukkan perkembangan menarik. Secara ADHK, PDRB Kutim naik dari Rp88,6 triliun pada 2018 menjadi Rp114,9 triliun pada 2024, mencerminkan pertumbuhan riil cukup pesat pasca-pandemi. Bahkan pada 2023–2024, Kutim mencatat lonjakan pertumbuhan lebih tinggi dibanding daerah lain. Dari sisi ADHB, PDRB Kutim sempat mencapai Rp211,1 triliun pada 2022, namun menurun ke Rp159,5

Tabel 9.3 PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	43.234,51	53.888,95	76.262,46	59.217,25	55.429,39
Kutai Barat	27.169,27	32.093,14	43.410,26	39.336,03	39.694,31
Kutai Kartanegara	149.045,20	177.416,58	240.392,59	204.872,66	204.700,14
Kutai Timur	115.555,66	136.617,57	211.101,48	168.271,52	159.497,23
Berau	35.450,85	43.036,48	60.158,16	51.280,02	50.816,51
Penajam Paser Utara	9.050,58	10.089,91	13.128,96	17.206,15	23.327,35
Mahakam Ulu	2.765,99	2.972,87	3.169,29	3.409,17	3.773,97
Kota Balikpapan	103.918,75	111.400,69	127.371,53	143.169,19	153.567,10
Kota Samarinda	66.526,91	71.170,55	83.353,69	89.289,45	98.414,87
Kota Bontang	55.664,04	57.948,13	63.107,88	68.105,69	68.418,31
Kalimantan Timur	607.744,49	696.632,67	921.450,99	843.571,25	858.430,74

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

triliun pada 2024. Lagi-lagi hal ini menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap harga komoditas. Kutim memiliki basis ekonomi pertambangan dan perkebunan, terutama kelapa sawit, yang membuat struktur ekonominya relatif beragam, namun volatilitas harga komoditas tetap menjadi faktor dominan.

Kota Balikpapan dan Samarinda memperlihatkan tren yang lebih stabil dibanding daerah berbasis tambang. Balikpapan sebagai kota jasa, perdagangan, dan transportasi mencatat PDRB ADHK dari Rp79,8 triliun (2018) menjadi Rp100,2 triliun (2024). ADHB-nya juga naik signifikan dari Rp97,7 triliun pada 2018 menjadi Rp153,6 triliun pada 2024. Stabilitas ini menandakan diversifikasi ekonomi kota pelabuhan dan perminyakan tersebut relatif baik, meskipun tetap dipengaruhi aktivitas migas. Samarinda, sebagai ibukota provinsi, memperlihatkan pertumbuhan riil dari Rp43,3 triliun (2018) ke Rp58,2 triliun (2024). Dari sisi ADHB, lonjakan terjadi dari Rp63,5 triliun menjadi Rp98,4 triliun dalam periode sama. Hal ini mencerminkan fungsi Samarinda sebagai pusat administrasi, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang berkembang pesat, serta semakin mengokohkan perannya sebagai pusat pertumbuhan non-tambang di Kaltim.

Kota Bontang menunjukkan pola yang berbeda. Dari sisi ADHK, terjadi tren stagnan bahkan penurunan

pada 2024 (Rp41,6 triliun) dibanding 2023 (Rp42,6 triliun). Sementara pada ADHB, meski ada kenaikan dari Rp58,7 triliun (2018) menjadi Rp68,4 triliun (2024), laju pertumbuhannya relatif lambat dibanding daerah lain. Hal ini berkaitan dengan dominasi sektor migas dan pupuk di Bontang yang menghadapi tekanan global, serta keterbatasan diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada industri besar membuat daya tahan ekonomi Bontang lebih rapuh terhadap gejolak eksternal.

Kabupaten Paser menunjukkan pertumbuhan riil stabil, dari Rp34,3 triliun (2018) menjadi Rp38,9 triliun (2024). Namun dari sisi ADHB, terlihat penurunan cukup tajam dari Rp76,2 triliun (2022) menjadi Rp55,4

Tabel 9.4 PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	34.712,07	36.582,32	36.985,15	37.493,83	38.909,10
Kutai Barat	20.644,38	21.509,05	22.536,42	23.848,65	25.654,27
Kutai Kartanegara	120.953,68	124.197,10	128.798,43	135.406,05	143.009,77
Kutai Timur	92.868,68	92.039,29	97.173,42	104.663,19	114.943,00
Berau	27.337,09	28.802,65	29.940,84	31.570,05	33.868,49
Penajam Paser Utara	6.604,62	6.492,68	7.433,57	9.619,21	12.570,19
Mahakam Ulu	1.763,93	1.786,29	1.802,46	1.852,96	1.919,65
Kota Balikpapan	83.034,71	86.831,69	91.142,16	97.060,15	100.191,74
Kota Samarinda	45.041,33	46.294,41	49.349,59	53.604,33	58.247,25
Kota Bontang	39.320,23	39.949,08	40.930,98	42.633,63	41.563,91
Kalimantan Timur	472.393,33	484.439,61	506.158,91	537.630,01	570.824,01

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

triliun pada 2024. Hal ini menandakan ketergantungan kuat pada sektor komoditas yang fluktuatif. Kutai Barat mencatat tren ADHK positif, dari Rp20,1 triliun (2018) menjadi Rp25,6 triliun (2024), sementara ADHB mencapai Rp39,7 triliun pada 2024. Berau pun mengalami peningkatan ADHK dari Rp26,7 triliun (2018) menjadi Rp33,8 triliun (2024), dengan ADHB relatif tinggi Rp50,8 triliun pada 2024. Kedua daerah ini memperlihatkan kombinasi sektor tambang, perkebunan, dan pariwisata yang memberi kontribusi positif.

Penajam Paser Utara (PPU) merupakan daerah yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir karena proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara ADHK, PPU melonjak dari Rp6,5 triliun pada 2018 menjadi Rp12,5 triliun pada 2024. Bahkan dari sisi ADHB, peningkatannya luar biasa: dari Rp8,8 triliun (2018) menjadi Rp23,3 triliun (2024). Pertumbuhan ini menggambarkan dampak langsung pembangunan IKN yang meningkatkan aktivitas konstruksi, investasi, serta jasa pendukung. PPU menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur besar mampu mengubah struktur ekonomi daerah secara signifikan.

Mahakam Ulu, sebagai kabupaten termuda dan paling kecil secara ekonomi, menunjukkan pertumbuhan

moderat. ADHK naik dari Rp1,6 triliun pada 2018 menjadi Rp1,9 triliun pada 2024. ADHB juga meningkat dari Rp2,5 triliun menjadi Rp3,7 triliun pada periode sama. Meski kecil, pertumbuhan konsisten ini penting untuk menunjukkan potensi pengembangan wilayah pedalaman, terutama melalui sektor pertanian, perkebunan, serta ekowisata. Dari gambaran di atas, terlihat bahwa ekonomi Kalimantan Timur masih sangat dipengaruhi oleh daerah dengan basis komoditas tambang dan migas, terutama Kukar, Kutim, Balikpapan, dan Bontang. Ketika harga komoditas naik, PDRB ADHB melonjak, namun ketika harga turun, nilai PDRB ikut merosot meski pertumbuhan riil tetap positif. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor ekstraktif. Di sisi lain, daerah dengan basis jasa dan perdagangan seperti Balikpapan dan Samarinda memberikan kontribusi lebih stabil, meskipun secara skala masih kalah besar.

Kehadiran proyek IKN di PPU memberi dinamika baru yang berpotensi menggeser keseimbangan ekonomi regional. PPU yang sebelumnya merupakan salah satu daerah dengan kontribusi kecil kini menjadi magnet pertumbuhan. Lonjakan PDRB PPU baik riil maupun nominal dapat menjadi momentum untuk mendorong pemerataan ekonomi, asalkan dikelola dengan strategi pembangunan inklusif. Namun, jika tidak hati-hati, ada risiko ketimpangan baru antara daerah inti IKN dengan kabupaten/kota sekitarnya.

NILAI TUKAR PETANI

129.04

NTP gabungan 2023



Tanaman Pangan	97.77
Tanaman Hortikultura	111.86
Tanaman Perkebunan Rakyat	166.92
Peternakan	108.62
Perikanan	99.68



10. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Angka ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), atau sederhananya perbandingan antara pendapatan yang diperoleh petani dari hasil produksi dengan biaya yang mereka keluarkan untuk konsumsi maupun produksi. Jika $NTP > 100$, artinya petani berada pada kondisi surplus, di mana penerimaan lebih tinggi daripada pengeluaran. Sebaliknya, jika $NTP < 100$, maka petani mengalami defisit.

Di Kalimantan Timur, peran sektor pertanian cukup signifikan, meskipun perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan energi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebagai penopang ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, analisis perkembangan NTP 2020–2024 memberikan gambaran yang penting mengenai dinamika kesejahteraan petani di provinsi ini. Jika dilihat secara agregat, NTP gabungan di Kalimantan Timur menunjukkan tren meningkat. Tahun 2020 sebesar 111,36, lalu naik ke 120,94 pada 2021 (+8,6 poin). Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 126,03 (+4,21 poin). Tahun 2023 mencapai 129,04 (+2,39 poin), dan pada 2024 melonjak tinggi ke 142,32 (+10,29 poin).

Tabel 10.1 Rata-rata Nilai Tukar Petani dan Perubahannya Menurut Subsektor di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024 (2018=100)

Uraian	Nilai Tukar Petani				Perubahan		
	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Tanaman Pangan	95,28	92,34	97,77	102,94	-3,09	5,88	5,29
Tanaman Hortikultura	106,07	112,32	111,86	113,63	5,89	-0,41	1,58
Tanaman Perkebunan Rakyat	151,1	162,54	166,92	186,93	7,57	2,69	11,99
Peternakan	104,28	108,77	108,62	105,17	4,31	-0,14	-3,18
Perikanan	101,77	99,42	99,86	99,81	-2,31	0,44	-0,05
Gabungan	120,94	126,03	129,04	142,32	4,21	2,39	10,29

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum, periode 2020–2024 memperlihatkan kemajuan signifikan dalam NTP petani di Kalimantan Timur, terutama didorong oleh subsektor perkebunan rakyat. Namun, kondisi antar subsektor sangat bervariasi. Tanaman pangan sempat terpuruk tetapi pulih kembali, hortikultura relatif stabil, peternakan

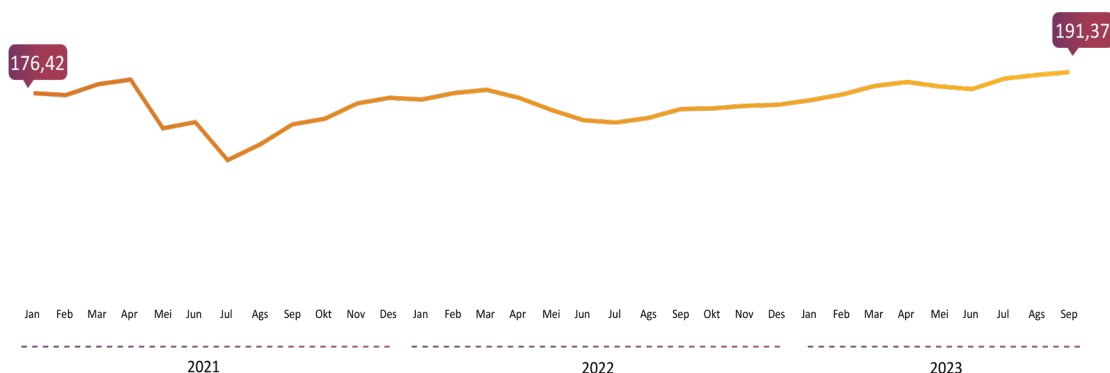
sempat tumbuh lalu melemah, sementara perikanan masih stagnan bahkan defisit.

Kenaikan NTP gabungan hingga 142,32 pada 2024 menjadi sinyal positif bahwa kesejahteraan petani Kalimantan Timur semakin membaik. Namun, kesenjangan antar subsektor menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah dan inklusif agar semua kelompok petani, baik petani sawah, pekebun, peternak, maupun nelayan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Kenaikan konsisten ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur semakin membaik dalam lima tahun terakhir. Lonjakan besar pada 2024 terutama didorong oleh subsektor perkebunan rakyat yang mengalami peningkatan signifikan.

Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani sekaligus daya tukar hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun terhadap biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan petani, karena berarti nilai yang diterima dari penjualan hasil produksinya lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi. Dalam konteks Kalimantan Timur, subsektor



Gambar 10.1 Nilai Tukar Petani Sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

perkebunan rakyat menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah, mengingat wilayah ini memiliki basis komoditas perkebunan yang kuat, terutama kelapa sawit, karet, dan kakao. Oleh karena itu, memahami dinamika NTP subsektor perkebunan rakyat dari tahun 2022 hingga 2024 sangat penting untuk menilai kondisi sosial-ekonomi petani, sekaligus sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan pertanian di daerah tersebut.

Berdasarkan data, tren NTP subsektor perkebunan rakyat di Kalimantan Timur menunjukkan pergerakan yang fluktuatif namun secara umum cenderung meningkat dalam rentang tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka NTP masih berada pada level yang relatif tinggi, dimulai dari 176,42 pada Januari dan menutup tahun di angka 173,16 pada Desember. Sepanjang tahun tersebut, nilai NTP tertinggi tercatat pada bulan April dengan angka 186,01, sedangkan yang terendah ada pada bulan Juli dengan hanya 129,00. Fluktuasi yang cukup tajam ini mengindikasikan adanya dinamika pasar komoditas perkebunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Penurunan yang signifikan pada pertengahan tahun 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh turunnya harga beberapa komoditas perkebunan di pasar global, terutama kelapa sawit, yang memang sangat dominan di Kalimantan Timur. Harga CPO (crude palm oil) sempat melemah akibat kebijakan ekspor yang ketat serta melimpahnya pasokan global, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan petani. Namun, menjelang akhir tahun, NTP kembali meningkat karena adanya pemulihan harga, meski tidak setinggi pada kuartal pertama.

Memasuki tahun 2023, kondisi NTP subsektor perkebunan rakyat relatif lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya. NTP pada bulan Januari tercatat 171,94, sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2022. Namun, sepanjang 2023, tren NTP bergerak dalam kisaran yang tidak terlalu jauh berbeda, yakni antara 155,70 pada bulan Juli sebagai titik terendah hingga 178,85 pada bulan Maret sebagai titik tertinggi. Stabilitas ini mencerminkan adanya keseimbangan antara harga jual komoditas perkebunan dan biaya produksi yang ditanggung petani. Faktor global tetap berperan besar, terutama harga minyak sawit mentah yang dipengaruhi oleh permintaan pasar internasional, kebijakan perdagangan negara-negara importir utama, serta fluktuasi harga minyak nabati lain seperti kedelai. Selain itu, faktor domestik seperti ketersediaan pupuk, biaya transportasi, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung distribusi hasil pertanian juga ikut menentukan. Meski demikian, rata-rata NTP pada tahun 2023 relatif sedikit lebih rendah dibandingkan 2022, menunjukkan bahwa petani perkebunan masih menghadapi tekanan biaya produksi yang cukup tinggi meskipun harga jual hasil panen mengalami peningkatan.

Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang menarik, karena tren NTP subsektor perkebunan rakyat cenderung meningkat signifikan, meski tetap dengan fluktuasi bulanan. Pada Januari 2024, NTP tercatat 171,49, hampir setara dengan level akhir 2023. Namun, sepanjang tahun, nilainya terus meningkat hingga mencapai 208,28 pada bulan Desember, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tiga tahun terakhir. Peningkatan ini bisa dikaitkan dengan membaiknya harga komoditas perkebunan global, terutama minyak sawit, yang mengalami pemulihan berkat meningkatnya permintaan dari negara-negara konsumen besar seperti India, Tiongkok, dan Uni Eropa. Di sisi lain, penguatan harga komoditas perkebunan juga didorong oleh faktor geopolitik global, perubahan iklim yang memengaruhi produksi minyak nabati di berbagai negara, serta adanya kebijakan energi baru terbarukan yang mendorong permintaan terhadap biodiesel berbasis sawit.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, subsektor perkebunan rakyat menunjukkan daya tahan yang kuat di

tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Meskipun pada 2022 sempat terjadi penurunan tajam, tren jangka menengah hingga 2024 justru memperlihatkan perbaikan yang nyata. Hal ini tentu memberikan sinyal positif terhadap tingkat kesejahteraan petani perkebunan di Kalimantan Timur. Dengan NTP yang secara konsisten berada jauh di atas angka 100, petani perkebunan memiliki surplus pendapatan dibandingkan kebutuhan konsumsi dan biaya produksi, meskipun tetap harus menghadapi tantangan biaya input yang semakin tinggi.

Salah satu hal yang patut dicatat adalah adanya disparitas musiman dalam pergerakan NTP. Hampir setiap tahun, titik terendah NTP terjadi pada pertengahan tahun, yakni sekitar bulan Juni hingga Juli, sedangkan titik tertinggi cenderung muncul pada kuartal pertama atau akhir tahun. Pola ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh siklus harga komoditas perkebunan yang berkorelasi dengan musim panen, kondisi cuaca, serta pola permintaan global. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun biasanya terjadi peningkatan suplai hasil panen yang menyebabkan harga turun, sementara pada akhir tahun permintaan global sering meningkat seiring kebutuhan industri makanan dan energi, sehingga harga komoditas kembali naik. Pemahaman atas pola musiman ini penting bagi pemerintah maupun asosiasi petani dalam menyusun strategi pemasaran dan manajemen produksi agar petani tidak terlalu merugi pada periode harga rendah.

Dari perspektif ekonomi makro daerah, pergerakan NTP subsektor perkebunan rakyat juga berimplikasi langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur, mengingat subsektor ini menyumbang porsi signifikan terhadap sektor pertanian secara keseluruhan. Peningkatan NTP menunjukkan adanya potensi pertumbuhan nilai tambah yang lebih besar dari subsektor perkebunan rakyat, sehingga mampu mendorong kontribusi terhadap PDRB. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung stabilitas harga komoditas perkebunan sekaligus menekan biaya produksi menjadi sangat strategis, bukan hanya untuk kesejahteraan petani, tetapi juga untuk perekonomian daerah secara keseluruhan.

Subsektor Tanaman Hortikultura

Hortikultura di Kalimantan Timur relatif lebih stabil dibanding tanaman pangan. Pada 2020, NTP hortikultura berada di angka 105,2, naik sedikit menjadi 106,07 pada 2021 (+0,83 poin). Tahun 2022 terjadi kenaikan signifikan hingga 112,32 (+5,89 poin), menandakan petani hortikultura menikmati keuntungan yang cukup baik.

Namun, pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 111,86 (-0,41 poin). Hal ini mungkin disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau fluktuasi harga komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah. Pada 2024, subsektor ini kembali mengalami kenaikan menjadi 113,63 (+1,58 poin).

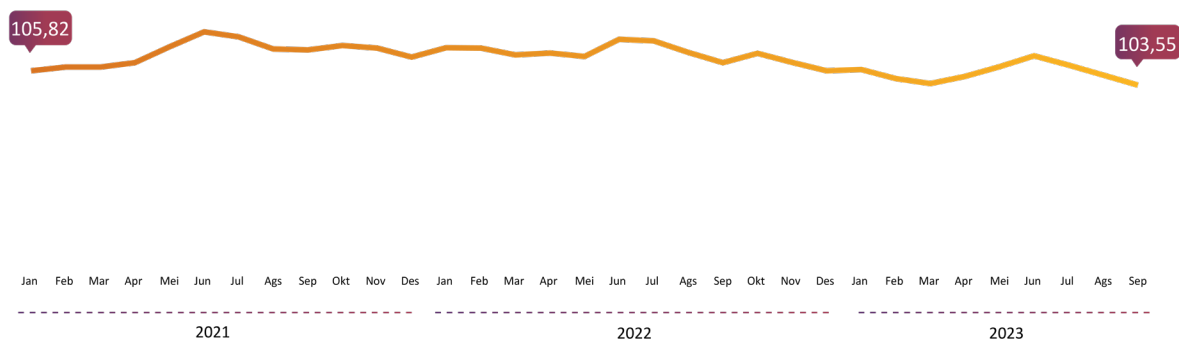
Dari pola ini terlihat bahwa hortikultura cukup tangguh dalam menjaga kesejahteraan petani. Walaupun ada sedikit fluktuasi, NTP selalu berada jauh di atas 100, menunjukkan bahwa subsektor ini konsisten

memberikan surplus. Diversifikasi produk hortikultura, yang meliputi buah tropis, sayuran, dan tanaman hias, memberikan peluang stabilitas pendapatan bagi petani.

Subsektor Peternakan

Dalam konteks Kalimantan Timur, subsektor peternakan memang tidak sebesar perkebunan, tetapi tetap penting karena berhubungan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat, seperti daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, memahami dinamika NTP subsektor peternakan selama 2022–2024 bisa membantu kita melihat bagaimana kondisi peternak di daerah ini, apakah mereka mengalami peningkatan kesejahteraan atau justru menghadapi tantangan yang berat.

Pada tahun 2022, kondisi NTP subsektor peternakan di Kalimantan Timur cukup baik. Angkanya dimulai dari 105,82 pada Januari dan relatif stabil hingga akhir tahun dengan nilai 108,04 pada Desember. Secara umum, sepanjang tahun 2022, NTP peternakan selalu berada di atas angka 105. Nilai tertinggi tercatat pada bulan Juni, yaitu 112,12, sementara yang terendah berada pada Januari sebesar 105,82. Artinya, sepanjang tahun 2022, pendapatan peternak selalu lebih besar daripada pengeluarannya. Kestabilan ini menunjukkan bahwa harga jual produk peternakan, seperti daging ayam, telur, atau sapi, berada pada level yang cukup



Gambar 10.2 Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

baik dibandingkan biaya pakan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari peternak. Walaupun ada fluktuasi, perubahannya tidak terlalu tajam sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi peternak pada tahun 2022 cukup terjaga. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan konsumsi daging dan telur pasca-pandemi COVID-19, ketika masyarakat mulai kembali beraktivitas normal dan sektor perhotelan, restoran, maupun catering meningkat permintaannya.

Memasuki tahun 2023, tren NTP subsektor peternakan tetap menunjukkan kestabilan, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan 2022. Pada bulan Januari 2023, NTP tercatat sebesar 109,56, lalu sepanjang tahun bergerak di kisaran 105 hingga 111. Angka tertinggi ada di bulan Juni sebesar 110,90, sementara angka terendah ada di Desember, yaitu 105,84. Secara umum, NTP subsektor peternakan 2023 tidak menunjukkan lonjakan besar, namun juga tidak mengalami penurunan drastis. Hal ini menandakan bahwa sektor peternakan masih bisa bertahan dengan baik di tengah tekanan ekonomi, terutama terkait kenaikan harga pakan yang sempat terjadi. Kita tahu bahwa salah satu masalah terbesar dalam usaha peternakan adalah harga pakan yang menyumbang lebih dari 60% biaya produksi. Pada tahun 2023, harga pakan mengalami kenaikan karena bahan baku seperti jagung dan kedelai harganya naik di pasar internasional. Meski begitu, peternak di Kalimantan Timur masih bisa menjaga keseimbangan karena harga jual produk peternakan juga mengalami peningkatan, sehingga nilai NTP tetap berada di atas 100. Hal ini memberikan gambaran bahwa walaupun margin keuntungan peternak mungkin tidak terlalu besar, mereka masih tetap berada pada posisi yang relatif aman.

Tahun 2024 menjadi periode yang menarik, karena NTP subsektor peternakan menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada awal tahun, Januari 2024, NTP tercatat sebesar 106,05, lalu sempat turun pada bulan Februari menjadi 104,61. Namun setelah itu, NTP mengalami fluktuasi kecil dan tetap terjaga di kisaran 103 hingga 108. Angka tertinggi ada pada bulan Juni dengan nilai 108,26, sedangkan terendah ada pada bulan September dengan angka 103,55. Menjelang akhir tahun, Desember 2024, NTP subsektor peternakan berada di level 104,15. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bisa dikatakan bahwa kondisi peternak pada 2024 sedikit lebih berat. Meskipun masih berada di atas 100, jarak antara pendapatan dan pengeluaran semakin tipis. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi, terutama pakan dan obat-obatan ternak, semakin menekan keuntungan peternak. Selain itu, harga jual hasil ternak tidak selalu naik mengikuti kenaikan biaya produksi. Misalnya, harga daging ayam broiler sering berfluktuasi karena pasokan yang berlebih di pasaran, sehingga peternak tidak selalu mendapatkan harga yang menguntungkan. Dengan kondisi seperti ini, NTP subsektor peternakan memang tetap positif, tetapi tantangan yang dihadapi peternak semakin nyata.

Jika kita lihat secara keseluruhan, perkembangan NTP subsektor peternakan dari 2022 hingga 2024 menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan nilai selalu berada di atas 100. Artinya, secara umum peternak di Kalimantan Timur masih bisa hidup layak karena pendapatan mereka lebih besar daripada pengeluaran. Namun, stabilitas ini tidak berarti tanpa masalah. Tantangan yang dihadapi peternak tetap besar, terutama terkait biaya pakan, ketersediaan sarana produksi, dan fluktuasi harga jual hasil ternak. Misalnya, ketika harga pakan naik, peternak harus mengeluarkan modal lebih besar. Jika pada saat yang sama harga ayam atau telur turun karena pasokan melimpah, maka keuntungan peternak bisa menipis, meskipun NTP secara rata-rata masih terlihat baik. Kondisi seperti ini sering membuat peternak berada dalam posisi yang tidak menentu, karena mereka tidak bisa mengendalikan harga pakan maupun harga jual hasil ternak.

Dari sisi musiman, data menunjukkan bahwa puncak NTP subsektor peternakan hampir selalu terjadi pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan konsumsi pada momen tertentu, misalnya Idul Fitri, yang biasanya jatuh pada periode tersebut. Permintaan daging ayam, sapi, dan telur meningkat tajam menjelang hari raya, sehingga harga jual hasil ternak naik dan memberikan keuntungan lebih besar bagi peternak. Sebaliknya, titik terendah biasanya terjadi pada akhir tahun, seperti bulan Desember. Pada periode ini, permintaan pasar cenderung menurun setelah puncak konsumsi, sementara biaya produksi tetap tinggi. Pola musiman seperti ini penting untuk dipahami agar peternak bisa mengatur strategi produksi dan penjualan. Misalnya, mereka bisa meningkatkan produksi menjelang hari raya agar bisa memanfaatkan harga tinggi, dan menahan penjualan ketika harga sedang jatuh agar tidak merugi.

lain faktor musiman, tantangan lain yang memengaruhi NTP subsektor peternakan adalah masalah kesehatan hewan dan penyakit. Kita tahu bahwa penyakit seperti flu burung atau penyakit mulut dan kuku (PMK) bisa memberikan dampak besar terhadap produksi ternak. Jika terjadi wabah, maka banyak ternak yang harus dimusnahkan atau tidak bisa dijual, sehingga pendapatan peternak menurun drastis. Meskipun dalam data NTP 2022–2024 tidak terlihat penurunan tajam akibat wabah besar, potensi ancaman penyakit selalu ada dan bisa memengaruhi kesejahteraan peternak. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk vaksinasi, pengawasan kesehatan ternak, dan bantuan saat terjadi wabah sangat penting agar peternak tetap bisa bertahan.

Dari perspektif kebijakan, subsektor peternakan membutuhkan perhatian serius karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan masyarakat. Dengan NTP yang relatif stabil di atas 100, pemerintah mungkin melihat bahwa kondisi peternak baik-baik saja. Namun, angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Ada peternak yang mungkin mendapat keuntungan besar, tetapi ada juga yang tertekan karena biaya pakan tinggi dan harga jual rendah. Oleh sebab itu, kebijakan yang mendukung stabilitas harga pakan, penyediaan bibit ternak unggul, serta akses pembiayaan murah menjadi sangat penting. Selain itu, penguatan rantai distribusi juga perlu dilakukan agar harga di tingkat peternak bisa lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh permainan pasar di tingkat tengkulak atau pedagang besar.

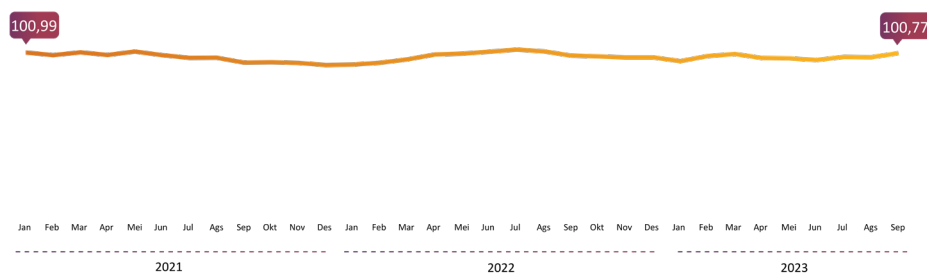
Subsektor Perikanan

Pada tahun 2022, NTP subsektor perikanan di Kalimantan Timur tercatat mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada bulan Januari, NTP berada pada angka 100,99, sedikit di atas 100. Artinya, nelayan dan petambak masih bisa menutupi pengeluaran mereka dengan pendapatan yang diterima. Namun, sepanjang tahun nilai NTP subsektor perikanan cenderung menurun. Misalnya, pada bulan Juli angkanya turun menjadi 99,35, yang berarti pendapatan nelayan sudah lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Bahkan sampai akhir tahun, Desember 2022, NTP subsektor perikanan hanya 97,13. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan dan petambak menghadapi kesulitan, terutama karena biaya produksi semakin meningkat, sementara harga jual ikan dan

hasil laut lainnya tidak selalu mengikuti kenaikan biaya tersebut. Kondisi ini bisa terjadi karena harga pakan ikan dan udang naik, harga solar untuk melaut meningkat, dan distribusi hasil tangkapan atau budidaya sering terkendala. Jika dilihat dari rata-rata, tahun 2022 bisa dikatakan sebagai tahun yang berat bagi subsektor perikanan di Kalimantan Timur, karena meskipun awalnya masih positif, pada akhirnya NTP jatuh ke bawah 100.

Masuk ke tahun 2023, kondisi subsektor perikanan terlihat sedikit lebih baik, meskipun belum sepenuhnya stabil. Pada bulan Januari, NTP berada di angka 97,30, masih di bawah 100. Namun, ada sedikit perbaikan di bulan April dengan angka 100,39. Ini menunjukkan bahwa pada beberapa bulan, nelayan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Salah satu penyebab kenaikan ini kemungkinan adalah meningkatnya permintaan hasil laut saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, ketika konsumsi ikan dan hasil perikanan meningkat di masyarakat. Tetapi sayangnya, perbaikan itu tidak bertahan lama. Di bulan November 2023, NTP subsektor perikanan turun lagi menjadi 99,51, bahkan sampai Desember hanya 99,49. Artinya, sepanjang 2023, kondisi nelayan dan petambak masih belum terlalu baik. Mereka hanya sesekali menikmati pendapatan lebih besar dari pengeluaran, tetapi lebih sering berada dalam posisi merugi atau hampir tidak ada keuntungan. Tantangan utama tetap sama, yaitu harga pakan ikan yang mahal, biaya bahan bakar solar untuk kapal nelayan yang terus naik, serta harga jual hasil tangkapan yang kadang turun ketika pasokan melimpah. Hal ini membuat nelayan sulit mendapatkan keuntungan yang stabil.

Tahun 2024 memperlihatkan kondisi yang lebih menarik. Pada awal tahun, Januari, NTP subsektor perikanan berada di angka 98,34, masih di bawah 100. Namun, di bulan Maret, angkanya naik menjadi 100,54, menandakan adanya perbaikan kecil. Puncak perbaikan terjadi pada Oktober dengan angka 101,60, yang



Gambar 10.3 Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

berarti pada bulan itu nelayan benar-benar lebih sejahtera. Sayangnya, tren positif ini tidak konsisten. Pada bulan November, NTP turun lagi menjadi 100,32, lalu di Desember 2024 hanya 99,93. Jadi, meskipun ada beberapa bulan di mana kondisi nelayan lebih baik, secara keseluruhan NTP subsektor perikanan di 2024 masih belum stabil. Bisa dikatakan, kondisi mereka tidak separah 2022, tetapi juga belum bisa dikategorikan sejahtera secara konsisten. Nelayan masih sering menghadapi masalah biaya produksi tinggi, harga jual yang tidak stabil, dan tantangan cuaca yang memengaruhi hasil tangkapan.

Kalau kita melihat tiga tahun ini secara menyeluruh, kita bisa menyimpulkan bahwa subsektor perikanan di Kalimantan Timur berada dalam posisi yang cukup rapuh. Pada 2022, nelayan sempat merasakan NTP di atas 100, tetapi segera jatuh di bawahnya dan bertahan rendah hingga akhir tahun. Pada 2023, ada sedikit perbaikan, tetapi tidak signifikan. Tahun 2024 memang memperlihatkan peningkatan di beberapa bulan, tetapi tidak konsisten. Artinya, kesejahteraan nelayan masih belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama harga input produksi dan harga pasar hasil perikanan.

Salah satu faktor utama yang menekan NTP subsektor perikanan adalah tingginya biaya pakan ikan dan udang untuk petambak. Pakan menyumbang lebih dari 60% biaya produksi, sehingga jika harganya naik, keuntungan petambak akan langsung tergerus. Sementara itu, harga jual ikan atau udang seringkali tidak naik sejalan dengan biaya produksi, bahkan cenderung turun ketika panen raya. Akibatnya, petambak sering menghadapi situasi di mana biaya produksinya tinggi, tetapi harga jual tidak menguntungkan. Bagi nelayan tangkap, masalah utama adalah harga bahan bakar solar. Untuk melaut, nelayan membutuhkan solar dalam jumlah besar, dan kenaikan harga solar membuat biaya operasional semakin berat. Jika hasil tangkapan banyak tetapi harga ikan di pasar turun, nelayan justru bisa rugi. Kondisi inilah yang membuat NTP subsektor perikanan sering kali berada di bawah 100.

Selain faktor biaya, kondisi cuaca juga sangat berpengaruh pada subsektor perikanan. Nelayan yang bergantung pada laut tidak bisa selalu melaut karena sering terhambat oleh gelombang tinggi atau cuaca ekstrem. Jika mereka tidak bisa melaut, maka pendapatan berhenti, sementara pengeluaran tetap ada. Hal ini juga bisa menekan NTP. Sementara itu, petambak juga menghadapi risiko banjir, kekeringan, atau penyakit ikan dan udang yang bisa menurunkan hasil produksi. Faktor-faktor ini menjadikan usaha perikanan penuh ketidakpastian, yang tercermin dalam fluktuasi nilai NTP.

Namun, di balik semua tantangan, ada peluang besar bagi subsektor perikanan di Kalimantan Timur. Daerah ini memiliki potensi sumber daya laut yang besar dan wilayah tambak yang luas. Jika dikelola dengan baik, subsektor perikanan bisa menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. NTP yang kadang naik di atas 100 menunjukkan bahwa sebenarnya potensi keuntungan ada, hanya saja perlu upaya lebih untuk membuatnya stabil. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah memperbaiki akses nelayan dan petambak terhadap bahan baku produksi dengan harga yang lebih terjangkau, memperluas akses pasar agar harga jual hasil perikanan lebih stabil, serta memperkuat dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi atau bantuan.

Subsektor Tanaman Pangan

Subsektor Tanaman Pangan Pada subsektor tanaman pangan, NTP tahun 2020 tercatat sebesar 101,6, yang berarti kondisi petani masih sedikit di atas titik impas. Namun, pada 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 95,28, turun -6,22 poin. Penurunan ini menunjukkan bahwa pendapatan petani tanaman pangan menurun relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Faktor-faktor penyebabnya bisa meliputi turunnya harga gabah akibat kelebihan pasokan atau menurunnya kualitas panen akibat faktor cuaca.

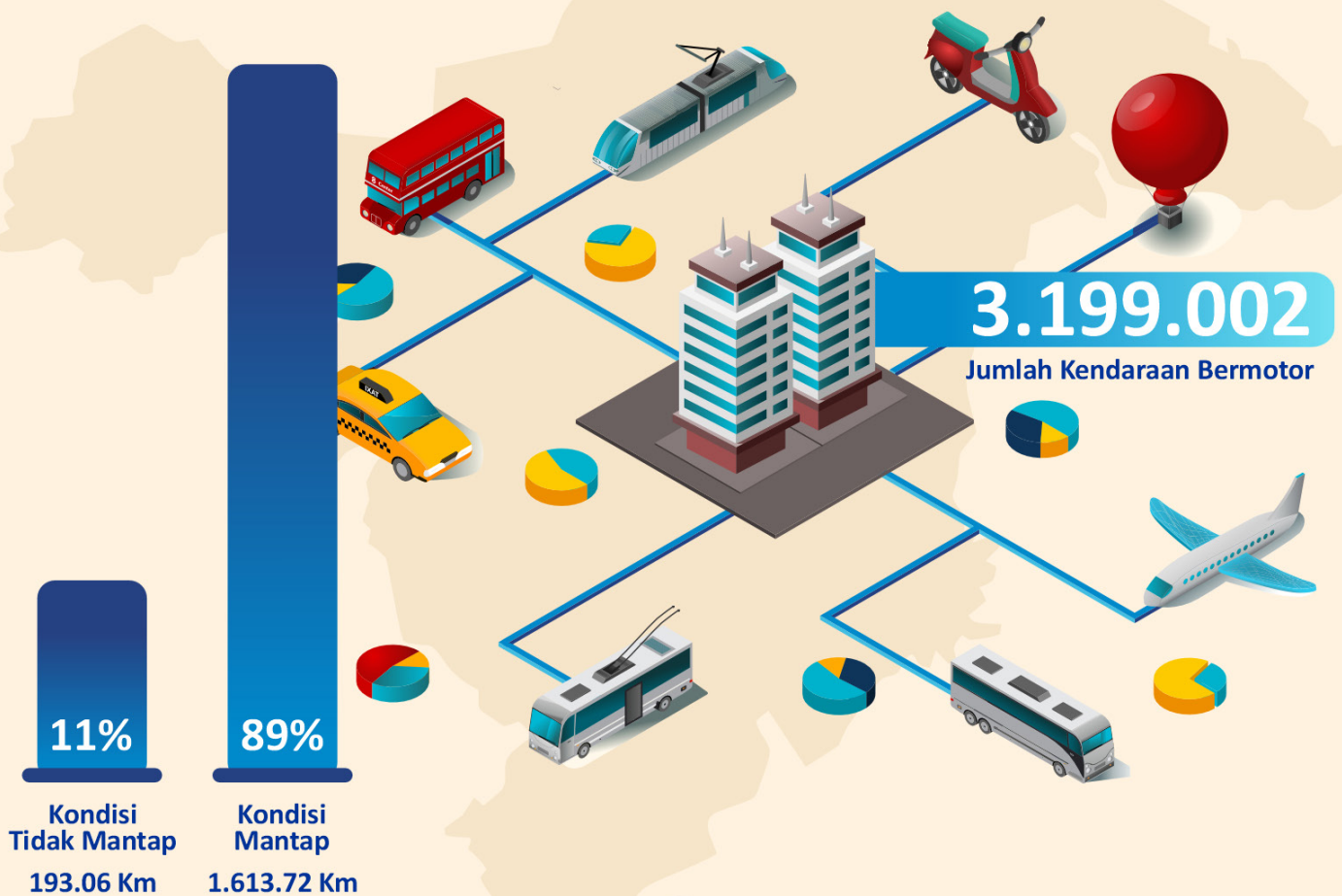
Tren negatif berlanjut pada 2022, ketika NTP turun lagi menjadi 92,34 (-3,09 poin). Situasi ini berarti dua tahun berturut-turut petani tanaman pangan berada dalam kondisi defisit. Namun pada 2023, terjadi rebound dengan kenaikan 5,88 poin sehingga mencapai 97,77. Tahun 2024, perbaikan semakin kuat dengan lonjakan 5,29 poin hingga NTP kembali ke level surplus sebesar 102,94.

Pola ini menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam subsektor tanaman pangan. Ketergantungan pada faktor cuaca, harga input pertanian (pupuk, benih), dan kebijakan harga gabah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Pemulihan pada 2023–2024 dapat mengindikasikan adanya perbaikan harga hasil panen atau stabilisasi biaya produksi. Namun demikian, kerentanan subsektor ini tetap tinggi. dan meningkatkan kinerja para petani.

PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

Kemantapan Jalan

Kalimantan Timur 2022





11. Perhubungan dan Infrastruktur

Perhubungan Darat

Infrastruktur jalan memainkan peranan penting dalam perekonomian, utamanya sebagai tulang punggung yang membentuk kerangka utama konektivitas dan mobilitas, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan infrastruktur dapat mendukung jalannya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dengan memberikan landasan yang kokoh bagi berbagai aktivitas kehidupan.. Infrastruktur jalan dan transportasi menjadi pondasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan barang, orang, dan modal untuk mencapai tujuan dengan efisien. Jaringan jalan juga menghubungkan berbagai wilayah, menggerakkan perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) membagi jalan umum menurut statusnya menjadi beberapa kategori, yaitu: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dengan sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan

Tabel 11.1 Panjang Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Status Jalan (km), 2024

Status Jalan	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Jalan Nasional	1.710,9	1.806,78	1.806,78
Jalan Provinsi	895,09	895,09	938,84
Jalan Kabupaten dan Kota	9.326,53	9.830,52	9.362,02

Sumber: Open Data PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

strategis kabupaten. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan

antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Lalu jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Data panjang jalan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan status jalan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan jaringan infrastruktur transportasi di wilayah ini. Pada tahun 2022, total panjang jalan nasional tercatat sebesar 1.710,90 km, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 1.806,78 km pada tahun 2023, dan angka ini tetap stabil di tahun 2024. Kenaikan tersebut menandakan adanya pembangunan dan peningkatan ruas jalan nasional yang berperan penting sebagai penghubung antarkabupaten dan akses utama ke wilayah strategis, termasuk kawasan industri dan pelabuhan. Stabilitasnya panjang jalan nasional pada tahun 2024 juga bisa menunjukkan bahwa fokus pembangunan telah beralih dari ekspansi menuju pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada.

Untuk jalan provinsi, panjangnya relatif konstan pada 2022 dan 2023 sebesar 895,09 km, kemudian bertambah menjadi 938,84 km pada 2024. Peningkatan sekitar 43 km ini mengindikasikan adanya pembangunan jalan baru atau peningkatan status beberapa ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Langkah ini penting karena memperkuat konektivitas antarwilayah dalam satu provinsi dan memperlancar arus barang maupun mobilitas masyarakat, khususnya menuju kawasan ekonomi baru dan lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdekatan dengan wilayah Kalimantan Timur.

Sementara itu, jalan kabupaten dan kota memiliki panjang paling besar dibandingkan jenis jalan lainnya, yakni 9.326,53 km pada 2022, meningkat menjadi 9.830,52 km pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 9.362,02 km di tahun 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh penyesuaian data, perubahan status jalan menjadi jalan provinsi, atau adanya proses rehabilitasi dan penghapusan ruas jalan yang rusak berat. Meski demikian, secara umum, jaringan jalan kabupaten dan kota tetap menjadi tulang punggung transportasi lokal di Kalimantan Timur, menghubungkan permukiman, sentra produksi, dan kawasan wisata daerah.

Perkembangan Kendaraan Bermotor

Selain infrastruktur jalan, peran penting juga dipegang oleh kendaraan bermotor dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah kendaraan bermotor, yang mencakup mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan sepeda motor, menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat mobilitas masyarakat dan intensitas pergerakan barang. Data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga 2024 memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten dan mencerminkan pertumbuhan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, total kendaraan bermotor tercatat sebanyak 2.855.060 unit dan terus bertambah menjadi 3.009.663 unit pada 2019. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang menjadi moda transportasi utama di daerah ini.

Jenis kendaraan yang mendominasi adalah sepeda motor, dengan jumlah yang sangat besar dan terus

meningkat dari 2,43 juta unit pada 2018 menjadi sekitar 3,15 juta unit pada 2024. Peningkatan signifikan ini menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan roda dua untuk mobilitas harian,

Tabel 11.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenisnya, 2021-2024

Jenis Kendaraan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mobil Penumpang	355.157	359.801	383.157	383.207
Mobil Bis	34.787	35.025	17.156	17.195
Truk	374.586	375.939	385.594	385.641
Sepeda Motor	2.496.608	3.097.103	3.149.745	3.149.776
Kalimantan Timur	3.264.435	3.870.522	3.941.251	3.935.819

Sumber: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Selain karena faktor efisiensi, sepeda motor juga dianggap lebih fleksibel dalam menjangkau wilayah dengan kondisi jalan yang bervariasi, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang infrastrukturnya.

Mobil penumpang juga menunjukkan tren yang stabil dan meningkat dari 246 ribu unit pada 2018 menjadi lebih dari 383 ribu unit pada 2024. Hal ini menggambarkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah yang mendorong kebutuhan terhadap kendaraan yang lebih nyaman. Di sisi lain, mobil barang turut mengalami peningkatan tajam dari 170 ribu unit pada 2018 menjadi 385 ribu unit pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan semakin aktifnya kegiatan ekonomi dan distribusi barang di Kalimantan Timur, terutama dengan adanya pembangunan infrastruktur besar seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memperkuat arus logistik dan perdagangan antarwilayah.

Sementara itu, jumlah mobil bis mengalami fluktuasi cukup besar. Pada tahun 2021 jumlahnya melonjak hingga 34.787 unit, namun kembali menurun pada 2023 menjadi sekitar 17 ribu unit dan tetap stabil hingga 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya operasional angkutan umum akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi serta dampak perubahan sistem transportasi umum di daerah perkotaan.

Perkembangan Transportasi Laut

Data perkembangan penumpang angkutan laut dalam negeri di Provinsi Kalimantan Timur periode 2021 hingga pertengahan 2025 memperlihatkan tren yang positif dan menunjukkan bahwa transportasi laut masih menjadi sarana penting mobilitas masyarakat di wilayah ini. Pada tahun 2021, jumlah penumpang domestik tercatat sebanyak 244.968 orang, lalu melonjak menjadi 417.786 orang pada 2022. Peningkatan

yang cukup besar ini menandakan mulai pulihnya aktivitas masyarakat setelah masa pandemi COVID-19, di mana pembatasan perjalanan laut sudah mulai dilonggarkan dan mobilitas antarwilayah kembali meningkat. Tren kenaikan ini berlanjut di tahun 2023 dengan jumlah penumpang mencapai 481.912 orang, dan terus meningkat lagi menjadi 495.660 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut, terutama karena jalur pelayaran di Kalimantan Timur berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatnya kegiatan perdagangan antarwilayah juga turut mendorong peningkatan jumlah penumpang kapal laut, baik untuk tujuan kerja, pendidikan, maupun wisata.

Memasuki tahun 2025, data bulanan hingga Juli memperlihatkan fluktuasi jumlah penumpang yang tetap tinggi. Pada Januari tercatat sebanyak 34.274 penumpang, kemudian sedikit menurun pada Februari (24.679 orang), sebelum meningkat tajam pada Maret (81.849 orang) dan April (78.773 orang). Bulan Mei hingga Juli menunjukkan angka yang relatif stabil, berkisar antara 52 ribu hingga 62 ribu penumpang per bulan. Pola ini menggambarkan bahwa mobilitas laut masyarakat Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh faktor musiman seperti libur panjang, cuaca laut, serta kegiatan ekonomi dan sosial di masing-masing daerah pelabuhan.

Tabel 11.3 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2024

Pelabuhan	2021	2022	2023	2024	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Domestik	244.968	417.786	481.912	495.660	343.745

Keterangan: *) Januari-Juli 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Transportasi Udara

Perkembangan penumpang angkutan udara di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2022 hingga 2025 menunjukkan peningkatan signifikan yang mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya konektivitas antarwilayah. Pada tahun 2022, jumlah penumpang domestik tercatat sebanyak 1.281.423 orang, sementara penumpang internasional masih sangat terbatas, hanya 130 orang. Angka ini menunjukkan bahwa sektor penerbangan domestik telah mulai pulih dari dampak pandemi, meskipun penerbangan internasional masih dalam tahap pemulihan awal.

Tahun 2023 menandai lonjakan besar dalam aktivitas penerbangan. Jumlah penumpang domestik naik tajam menjadi 2.091.095 orang, menunjukkan peningkatan hampir 63% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara telah pulih sepenuhnya, didukung oleh semakin banyaknya kegiatan ekonomi, perjalanan bisnis, serta geliat sektor pariwisata di Kalimantan

Timur. Pada saat yang sama, penumpang internasional juga meningkat menjadi 2.853 orang, menggambarkan mulai terbukanya kembali akses penerbangan luar negeri dan meningkatnya minat wisatawan mancanegara maupun pelaku bisnis global untuk berkunjung ke provinsi ini.

Pada tahun 2024, tren kenaikan tersebut terus berlanjut. Penumpang domestik mencapai 2.628.913 orang, memperlihatkan peningkatan yang stabil dan berkelanjutan. Sementara itu, jumlah penumpang internasional melonjak drastis menjadi 41.442 orang, atau naik lebih dari 14 kali lipat dibanding tahun 2023. Lompatan besar ini menandakan bahwa penerbangan internasional di Kalimantan Timur telah benar-benar hidup kembali. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan pembangunan infrastruktur bandara, termasuk perluasan terminal dan peningkatan fasilitas di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan sebagai pintu gerbang utama.

Memasuki tahun 2025, data bulanan menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Pada bulan Januari, jumlah penumpang domestik tercatat 243.376 orang, diikuti penurunan kecil di Februari menjadi 214.420 orang. Namun, pada bulan Maret terjadi lonjakan tajam hingga 251.244 orang, yang kemungkinan besar dipicu oleh peningkatan aktivitas menjelang Ramadan dan masa liburan. Hal ini menggambarkan bahwa mobilitas udara di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

Bulan April hingga Juli 2025 menunjukkan pola yang relatif stabil. Pada April terdapat 234.069 penumpang, sedikit menurun dibanding Maret, namun angka tersebut kembali meningkat pada Juni menjadi 252.866 orang, lalu sedikit menurun di Juli menjadi 245.763 orang. Pola ini memperlihatkan bahwa permintaan terhadap transportasi udara tetap tinggi sepanjang tahun, dengan sedikit fluktuasi mengikuti pola perjalanan liburan dan kegiatan kerja. Artinya, transportasi udara kini telah menjadi pilihan utama masyarakat Kalimantan Timur untuk mobilitas cepat dan efisien, baik antar kota maupun antar pulau.

Sementara itu, jumlah penumpang internasional pada 2025 juga menunjukkan fluktuasi yang menarik. Di bulan Januari dan Februari, tercatat 4.836 penumpang, menandakan stabilnya permintaan pada awal tahun.

Tabel 11.4 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Domestik di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2025

Bandara	2021	2022	2023	2024	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Domestik	1.281.423	2.091.095	2.628.913	2.967.035	1.644.114
Internasional	130	2.853	41.442	49.448	32.955

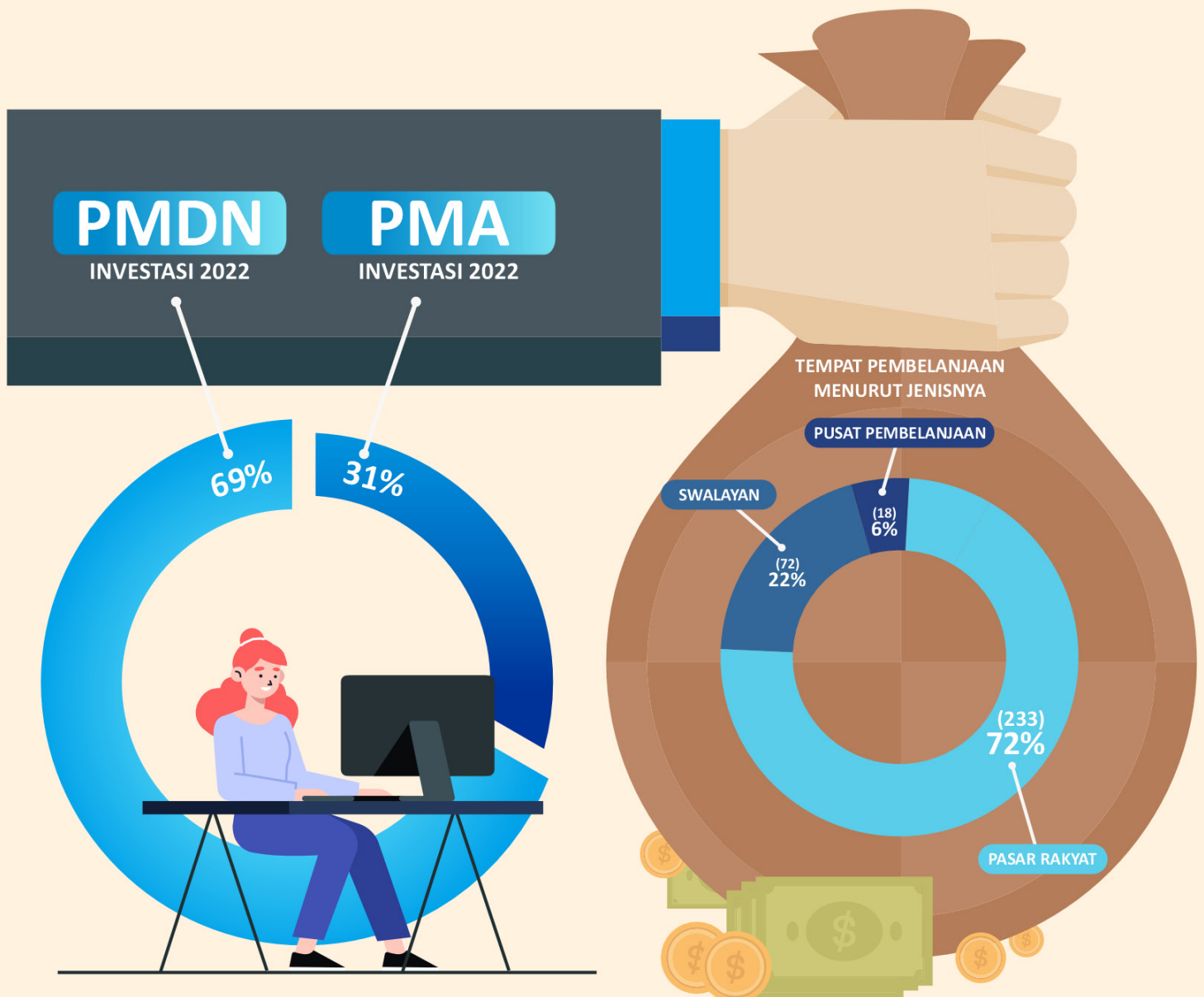
Keterangan: *) Januari-Juli 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Meskipun sempat menurun di Maret menjadi 4.224 penumpang, angka tersebut kembali meningkat pada Mei mencapai 9.654 penumpang, menunjukkan adanya arus kunjungan wisatawan asing yang meningkat di pertengahan tahun. Pada Juni dan Juli, jumlahnya kembali berada di kisaran 4.900–5.800 penumpang, menggambarkan konsistensi aktivitas penerbangan luar negeri di provinsi ini.

PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN MODAL

Presentase realisasi

PMDN dan PMA Kalimantan Timur 2022

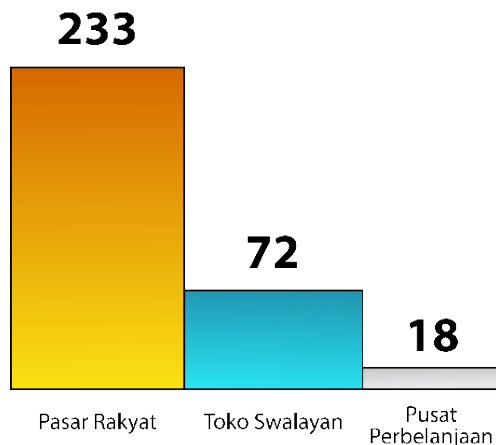




12. Perdagangan, Industri, Koperasi dan Modal

Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan memainkan peran sentral dalam memengaruhi dinamika ekonomi suatu wilayah. Perdagangan mengatur pergerakan barang dan layanan yang esensial untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Sebagai komponen integral dari aktivitas perdagangan, kehadiran pasar memiliki signifikansi yang sangat penting dalam mendorong serta memfasilitasi proses pertukaran barang dan jasa antara pelaku ekonomi. Lebih dari sekadar tempat transaksi, pasar mencakup peranan yang lebih luas sebagai pusat dinamika sosial dan ekonomi, di mana interaksi antara penjual dan pembeli membentuk pola kompleks penawaran, permintaan, dan pembentukan harga.

Berdasarkan data jumlah pasar pada periode 2021 hingga 2023, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam struktur pasar di wilayah yang diamati. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah pasar tercatat tetap stabil sebanyak 868 unit. Angka ini menunjukkan bahwa selama dua tahun tersebut, kondisi perdagangan ritel masih terjaga dengan baik, baik dari sisi ketersediaan pasar tradisional maupun pasar modern. Namun, memasuki tahun 2023 terjadi penurunan tajam dalam jumlah pasar, yakni hanya tersisa 643 unit. Penurunan sebesar 225 unit atau sekitar 25,9 persen ini menandai adanya perubahan besar dalam lanskap perdagangan lokal, khususnya pada sektor pasar modern.



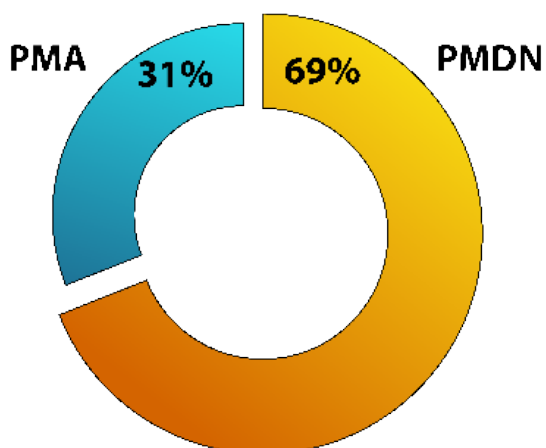
Gambar 12.1 Banyaknya Jumlah Pasar tradisional dan pasar modern, 2020-2023

Jika ditinjau lebih dalam, pasar tradisional menunjukkan kestabilan yang cukup kuat. Dalam tiga tahun berturut-turut, jumlah pasar tradisional tetap 403 unit, yang menandakan bahwa aktivitas perdagangan berbasis komunitas dan kebutuhan harian masyarakat tetap bertahan. Keberadaan pasar tradisional ini menjadi bukti bahwa sektor ini masih memegang peran penting dalam

perekonomian lokal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebaliknya, pasar modern mengalami penurunan drastis dari 465 unit pada tahun 2022 menjadi hanya 240 unit pada tahun 2023. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya persaingan dari platform *e-commerce*, efisiensi biaya operasional oleh pengelola ritel modern, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah ke belanja *online*.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi strategis di Indonesia dalam bidang sumber daya alam, terus menarik minat investasi, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi strategis di Indonesia, terus menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, data investasi yang masuk ke wilayah ini, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), memperlihatkan tren yang sangat positif. Angka-angka yang tercatat bukan hanya mencerminkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menggambarkan transformasi struktural yang sedang berlangsung di provinsi ini.

Jika dilihat dari jumlah proyek yang terealisasi, PMDN menunjukkan lonjakan luar biasa dari 9.291 proyek pada tahun 2021 menjadi 24.743 proyek pada tahun 2024. Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu hanya 6.706 proyek, lonjakan tajam di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa investor domestik semakin percaya terhadap potensi Kalimantan Timur. Hal ini bisa dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi, serta pembangunan infrastruktur yang semakin masif, terutama dalam rangka mendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.



Gambar 12.2 Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Di sisi lain, PMA juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Dari 1.034 proyek pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 3.018 proyek pada tahun 2024. Meskipun jumlah proyek PMA lebih kecil dibandingkan PMDN, pertumbuhan ini tetap signifikan. Investor asing melihat Kalimantan Timur sebagai wilayah yang strategis, kaya sumber daya alam, dan memiliki potensi besar untuk pengembangan industri berkelanjutan. Nilai realisasi investasi juga memperkuat narasi pertumbuhan ini. PMDN mencatatkan peningkatan dari Rp30.297 miliar pada tahun

2021 menjadi Rp55.078 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa proyek-proyek yang masuk bukan hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat dalam hal skala dan nilai ekonomis. Sementara itu, PMA mencatatkan realisasi investasi dari US\$754 juta menjadi US\$1.417 juta dalam periode

yang sama. Angka ini menunjukkan bahwa investor asing tidak hanya tertarik, tetapi juga berani menanamkan modal dalam jumlah besar di Kalimantan Timur.

Salah satu indikator penting dari keberhasilan investasi adalah penyerapan tenaga kerja. PMDN berhasil menyerap tenaga kerja dari 21.615 orang pada tahun 2021 menjadi 57.002 orang pada tahun 2024. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa investasi domestik memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. PMA juga berkontribusi signifikan, dengan penyerapan tenaga kerja dari 5.790 orang menjadi 13.417 orang. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023, tren keseluruhan tetap positif.

Jika kita melihat lebih dalam, pertumbuhan investasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Kalimantan Timur memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik bagi investor. Provinsi Kalimantan Timur memiliki

Tabel 12.1 Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PMDN				
Jumlah Proyek (unit)	9.291	6.706	15.490	24.743
Realisasi (miliar Rp)	30.297	39.595	52.172	55.078
Tenaga Kerja (orang)	21.615	39.792	37.022	57.002
PMA				
Jumlah Proyek (unit)	1.034	1.005	1.991	3.018
Realisasi (juta US\$)	754	1.266	1.333	1.417
Tenaga Kerja (orang)	5.790	16.631	13.764	13.417

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

cadangan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari batu bara, minyak dan gas, hingga potensi energi baru dan terbarukan. Kedua, lokasi geografisnya yang strategis di bagian timur Indonesia menjadikannya pintu gerbang perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi katalis utama bagi pertumbuhan investasi. Proyek ini tidak hanya menarik perhatian nasional, tetapi juga internasional. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung IKN, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, memberikan efek domino terhadap sektor-sektor lain, termasuk properti, logistik, dan jasa.

Ke depannya, Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,

Tabel 12.1 Perkembangan Realisasi Invetasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024

Kab/Kota	PMDN (miliar Rp)				PMA (US\$ juta)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
Paser	567,12	1.616,94	2.458,13	1.99,53	31,19	109,06	77,90	75,08
Kutai Barat	1.437,23	2.631,77	3.253,52	6.857,56	29,65	198,43	105,78	55,24
Kutai Kartanegara	3.319,55	10.564,90	9.440,54	8.346,87	122,87	180,41	331,15	537,93
Kutai Timur	5.279,05	3.428,92	5.241,83	5.169,65	248,36	630,92	458,24	285,54
Berau	445,26	2.619,00	4.303,94	2.632,70	35,75	49,37	47,00	63,78
Penajam Paser Utara	404,89	1.253,09	1.475,72	2.893,56	1,60	9,86	10,91	54,11
Mahakam Ulu	575,50	284,95	189,19	282,07	0,12	3,80	23,10	33,48
Kota Balikpapan	16.773,02	14.681,98	20.501,29	21.301,96	193,18	51,88	244,87	293,57
Kota Samarinda	585,53	1.270,87	2.894,24	3.049,09	17,13	32,43	23,52	9,05
Kota Bontang	910,23	1.243,15	2.413,30	2.549,91	65,33	8,00	10,25	9,29
Kalimantan Timur	30.297,38	39.595,63	52.171,70	55.078,92	745,19	1.266,22	1.332,71	1.417,07

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

dan partisipasi aktif dari semua pihak, provinsi ini dapat menjadi contoh sukses bagaimana investasi dapat mendorong transformasi ekonomi dan sosial.

Jika kita lihat tabel 12.1 yang menunjukkan perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur selama periode 2021 hingga 2024, yang mencakup sepuluh kabupaten/kota. Secara keseluruhan, tren investasi di provinsi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nilai maupun distribusi antarwilayah.

Dari total provinsi, PMDN mengalami kenaikan konsisten dari Rp30.297,38 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp55.078,92 miliar pada tahun 2024. Lonjakan terbesar terjadi antara 2022 dan 2023, di mana nilai PMDN naik dari Rp39.595,63 miliar menjadi Rp52.171,70 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur semakin menarik bagi investor domestik, terutama setelah adanya pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sementara itu, PMA juga menunjukkan tren positif, meskipun kenaikannya lebih moderat. Nilai PMA meningkat dari US\$745,19 juta pada 2021 menjadi US\$1.417,07 juta pada 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa investor asing tetap melihat Kalimantan Timur sebagai lokasi strategis untuk menanamkan modal, meskipun jumlah proyek PMA relatif lebih kecil dibanding PMDN. Kedua, jika dianalisis per kabupaten/kota, Kota Balikpapan mendominasi realisasi PMDN dengan nilai tertinggi sepanjang periode. Pada 2021, Balikpapan mencatat Rp16.773,20 miliar, dan terus meningkat hingga Rp21.301,99 miliar pada 2023, sebelum sedikit turun menjadi Rp20.931,94 miliar di 2024. Dominasi Balikpapan dapat dikaitkan dengan posisinya sebagai pusat bisnis dan pintu gerbang menuju IKN, serta keberadaan fasilitas pelabuhan dan bandara yang mendukung aktivitas investasi. Kota Samarinda juga

menunjukkan tren positif, meskipun nilainya lebih kecil dibanding Balikpapan, dengan kenaikan dari Rp585,53 miliar pada 2021 menjadi Rp4.049,97 miliar pada 2024.

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pemain penting lainnya, dengan realisasi PMDN yang melonjak dari Rp3.319,55 miliar pada 2021 menjadi Rp8.842,77 miliar pada 2024. Kutai Timur juga mencatat pertumbuhan signifikan, dari Rp5.279,05 miliar menjadi Rp8.146,13 miliar dalam periode yang sama. Kedua daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan perkebunan, yang menjadi daya tarik utama bagi investor. Ketiga, untuk PMA, pola distribusi sedikit berbeda. Kota Balikpapan kembali menjadi kontributor terbesar, dengan nilai PMA mencapai US\$293,57 juta pada 2024, naik dari US\$51,18 juta pada 2021. Kutai Kartanegara juga mencatat kenaikan signifikan, dari US\$127,86 juta menjadi US\$537,93 juta, menjadikannya salah satu tujuan utama investasi asing di sektor energi dan sumber daya alam. Kutai Timur mengikuti dengan pertumbuhan dari US\$286,48 juta menjadi US\$484,08 juta.

Sementara itu, daerah seperti Paser, Berau, dan Mahakam Ulu memiliki nilai PMA yang relatif kecil, meskipun tetap menunjukkan tren positif. Jika dilihat dari dinamika tahunan, tahun 2023 menjadi titik puncak pertumbuhan PMDN, sedangkan PMA mengalami kenaikan stabil setiap tahun. Lonjakan PMDN pada 2023 kemungkinan besar terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur IKN dan proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan kontraktor lokal. PMA, meskipun pertumbuhannya lebih lambat, tetap menunjukkan komitmen jangka panjang investor asing terhadap Kalimantan Timur. Dampak dari tren ini terhadap ekonomi daerah sangat besar. Peningkatan PMDN dan PMA tidak hanya memperkuat struktur ekonomi Kalimantan Timur, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pengembangan sektor-sektor pendukung seperti transportasi, logistik, dan jasa. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan investasi antarwilayah. Sedangkan Kabupaten seperti Mahakam Ulu dan Berau masih mencatat nilai investasi yang relatif kecil, sehingga perlu strategi khusus untuk menarik minat investor.

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PRODUKSI PADI
KALIMANTAN TIMUR

**205.29,58
TON**

2023

Samarinda, Kubar,
Mahulu, Balikpapan,
Bontang

3%

Kutai Timur

5%

Bearu

9%

Paser

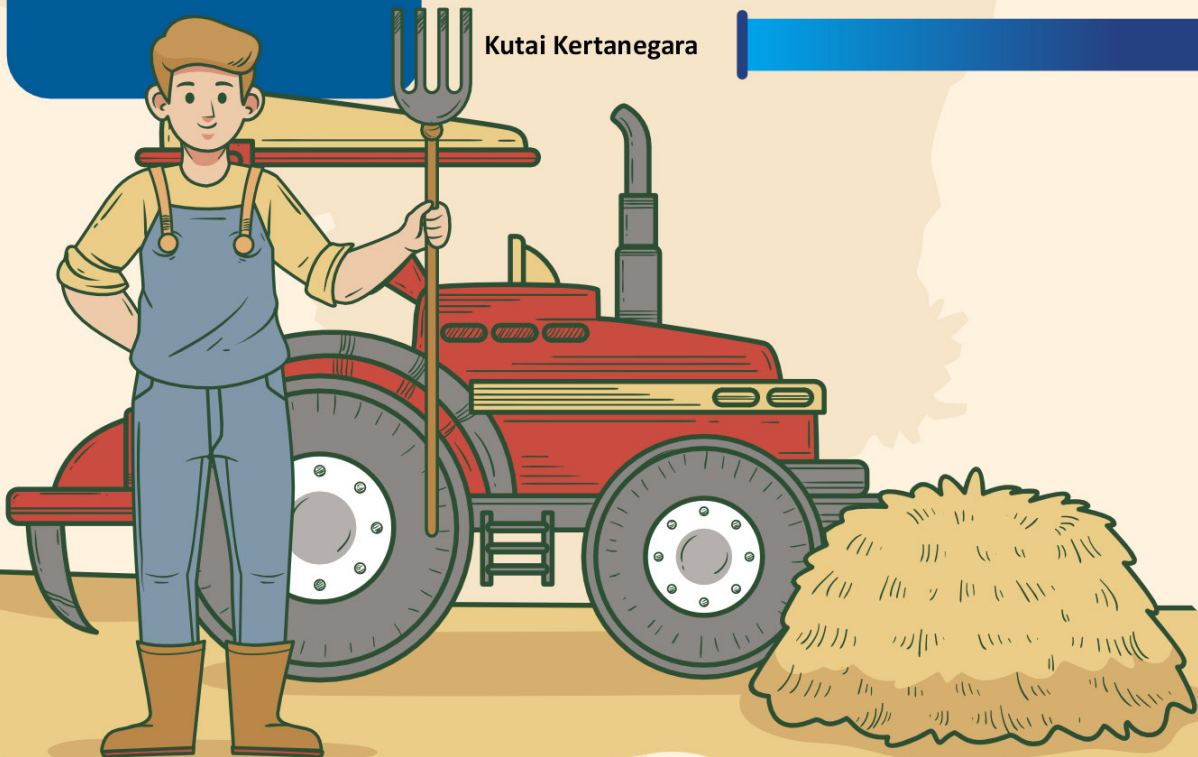
12%

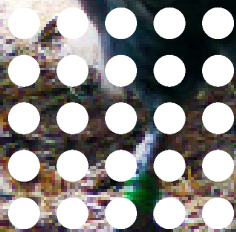
PPU

20%

Kutai Kertanegara

49%





13. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Produksi Padi Kalimantan Timur

Pertanian dan ketahanan pangan memegang peranan sentral dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai dua bidang yang saling terkait, pertanian tidak hanya menyediakan bahan pangan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta membentuk pondasi ketahanan pangan yang kokoh. Oleh karena itu, pemahaman tentang pertanian dan ketahanan pangan menjadi krusial dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keamanan pangan dan pemberdayaan ekonomi.

Dari subsektor tanaman pangan, luas lahan baku sawah nasional telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ATR / Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019. Kepmen ini menetapkan bahwa luas lahan baku sawah untuk Provinsi Kalimantan Timur adalah 41.406 hektare. Dari jumlah tersebut secara keseluruhan, total produksi padi di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 262.773,9 ton pada tahun 2018 menjadi 215.290,58 ton pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor pertanian, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kebijakan pertanian, dan masalah infrastruktur.

Tabel 13.1 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota (Ton) 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	48.251,88	52.365,75	51.972,06	48.202,66	26.369,02	46.973,41
Kutai Barat	962,88	1.199,22	2.021,46	1.284,77	1.342,49	1,345.66
Kutai Kartanegara	121.202,5	110.940,4	104.441,8	105.025,7	106.411,09	96,937.18
Kutai Timur	15.926,08	17.078,56	13.119,61	12.076,25	10.777,38	14,081.13
Berau	16.739,31	23.352,73	22.364,87	21.135,98	20.274,04	17,802.22
Penajam Paser Utara	41.622,32	47.018,03	42.130,12	45.160,69	44.123,19	46,240.28
Mahakam Ulu	1.521,06	1.081,75	932,09	489,42	650,93	871:48:00
Balikpapan	37,27	419,57	354,13	302,1	154,88	125:53:00
Samarinda	7.212,12	8.651,61	6.988,91	5.492,34	5.032,70	9,241.67
Bontang	342,92	326,86	352,88	255,43	154,86	~0
Kalimantan Timur	253.818,4	262.434,5	244.678,0	239.425,3	215.290,58	233,618.56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Produksi padi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur ketersediaan pangan di suatu daerah. Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya dikenal dengan kekayaan tambang dan migas, tetapi juga memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif kecil dibandingkan pertambangan, keberadaan produksi padi tetap vital dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Data KSA Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam produksi padi kabupaten/kota di Kaltim pada periode 2018–2024.

Secara total, produksi padi Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencapai sekitar 262,7 ribu ton. Angka ini kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2019 menjadi 253,8 ribu ton, lalu naik kembali pada 2020 mencapai 262,4 ribu ton. Namun, sejak 2021 tren penurunan mulai terasa dengan produksi turun ke angka 244,6 ribu ton, lalu berlanjut ke 239,4 ribu ton pada 2022. Penurunan semakin dalam di 2023 dengan hanya 226,9 ribu ton, sebelum sedikit pulih pada 2024 menjadi 233,6 ribu ton. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga stabilitas produksi, baik dari sisi luas panen, produktivitas, maupun faktor eksternal seperti cuaca, iklim, dan alih fungsi lahan.

Kabupaten Paser menjadi salah satu penyumbang utama produksi padi di Kaltim. Pada 2018, Paser menghasilkan sekitar 32 ribu ton, lalu melonjak drastis menjadi 48,2 ribu ton pada 2019. Kenaikan berlanjut hingga 2020 dengan produksi 52,3 ribu ton, yang menjadi capaian tertinggi dalam periode ini. Namun, tren positif ini tidak berlangsung lama. Tahun 2021 produksinya turun tipis ke 51,9 ribu ton, lalu merosot cukup dalam ke 48,2 ribu ton pada 2022. Tahun 2023 menjadi titik nadir dengan produksi hanya 28,6 ribu ton, sebelum akhirnya bangkit di 2024 dengan 46,9 ribu ton. Fluktuasi yang tajam ini memperlihatkan kerentanan Paser terhadap kondisi iklim dan teknis pertanian. Meski demikian, posisinya tetap penting sebagai salah satu daerah penopang pangan Kaltim.

Kutai Barat menampilkan pola produksi yang relatif kecil dibandingkan daerah lain. Pada 2018, produksinya sebesar 1.089 ton, turun sedikit menjadi 962 ton pada 2019. Kemudian, 2020 menjadi titik tertinggi dengan 1.199 ton, bahkan melonjak drastis pada 2021 mencapai 2.021 ton. Namun, produksi kembali menurun di 2022 ke angka 1.284 ton, sedikit naik di 2023 menjadi 1.319 ton, dan hanya meningkat tipis pada 2024 di angka 1.345 ton. Walaupun kontribusinya kecil terhadap total produksi provinsi, Kutai Barat tetap memiliki potensi untuk pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal, terutama di wilayah pedalaman yang masih memiliki lahan potensial.

Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan pusat produksi terbesar di Kaltim. Tahun 2018, produksinya mencapai 144 ribu ton, lalu turun cukup signifikan pada 2019 menjadi 121 ribu ton, dan terus turun pada 2020 ke 110,9 ribu ton. Tren penurunan berlanjut ke 104,4 ribu ton pada 2021, meski ada sedikit kenaikan ke 105 ribu ton pada 2022. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan yang cukup baik ke angka 115 ribu ton, namun 2024 kembali turun drastis menjadi 96,9 ribu ton. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan besar, khususnya terkait

alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perkebunan sawit, serta pembangunan infrastruktur. Meski begitu, Kukar tetap menjadi "lumbung padi" utama Kaltim, dengan kontribusi hampir setengah dari total produksi provinsi.

Kutai Timur menunjukkan tren menurun cukup tajam. Dari 12,8 ribu ton pada 2018, produksi naik ke 15,9 ribu ton pada 2019 dan 17 ribu ton pada 2020. Namun, sejak 2021 produksi merosot menjadi 13,1 ribu ton, lalu 12 ribu ton pada 2022, semakin turun ke 10,1 ribu ton pada 2023, dan hanya sedikit pulih di 2024 dengan 14 ribu ton. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan serius pada sektor pertanian Kutim, baik dari sisi luas panen maupun produktivitas.

Kabupaten Berau juga menunjukkan pola fluktuatif. Tahun 2018, produksinya 19,4 ribu ton, lalu turun ke 16,7 ribu ton pada 2019, sebelum melonjak ke 23,3 ribu ton pada 2020. Namun, sejak itu tren menurun, yakni 22,3 ribu ton (2021), 21,1 ribu ton (2022), 20,4 ribu ton (2023), dan hanya 17,8 ribu ton (2024). Penurunan jangka panjang ini mencerminkan tantangan besar, mungkin terkait keterbatasan lahan dan perubahan iklim yang berpengaruh pada hasil panen.

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu daerah dengan produksi relatif stabil. Dari 38 ribu ton pada 2018, produksi naik ke 41,6 ribu ton (2019), bahkan meningkat ke 47 ribu ton pada 2020. Tahun 2021 sedikit menurun ke 42,1 ribu ton, namun naik kembali ke 45,1 ribu ton pada 2022 dan stabil di angka 45,1 ribu ton pada 2023. Tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan capaian 46,2 ribu ton. Stabilitas ini menjadikan PPU sebagai salah satu daerah andalan pangan, apalagi dengan posisinya yang strategis sebagai calon ibu kota negara (IKN).

Mahakam Ulu mencatat produksi sangat kecil dibandingkan kabupaten lain. Dari 1.120 ton pada 2018, produksi naik ke 1.521 ton pada 2019, lalu turun ke 1.081 ton pada 2020, 932 ton pada 2021, bahkan jatuh ke 489 ton pada 2022. Tahun 2023 menunjukkan sedikit perbaikan ke 680 ton, lalu ke 871 ton pada 2024. Meskipun volumenya kecil, pengembangan padi di Mahulu bisa diarahkan untuk ketahanan pangan lokal masyarakat pedalaman.

Sebagai kota besar dengan dominasi sektor jasa dan perdagangan, Balikpapan hampir tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi padi. Tahun 2018 tercatat 0 ton, lalu sedikit muncul pada 2019 (37 ton), melonjak ke 419 ton pada 2020, namun menurun kembali menjadi 354 ton (2021), 302 ton (2022), 153 ton (2023), dan hanya 125 ton pada 2024. Perannya dalam ketahanan pangan lebih banyak melalui distribusi dan konsumsi, bukan produksi.

Samarinda mencatat tren penurunan cukup dalam. Dari 13,9 ribu ton pada 2018, produksi merosot ke 7,2 ribu ton pada 2019, lalu sedikit naik ke 8,6 ribu ton pada 2020. Tren penurunan berlanjut ke 6,9 ribu ton pada 2021, 5,4 ribu ton pada 2022, dan 5,1 ribu ton pada 2023. Namun, pada 2024, Samarinda berhasil bangkit dengan capaian 9,2 ribu ton, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pertanian atau perluasan lahan tanam.

Kota Bontang memiliki kontribusi sangat kecil. Tahun 2018 produksinya 185 ton, naik menjadi 342 ton pada 2019, lalu 326 ton pada 2020, 352 ton pada 2021, namun turun ke 255 ton pada 2022, 153 ton pada 2023, dan mendekati 0 ton pada 2024. Seperti halnya Balikpapan, kontribusi Bontang lebih banyak pada konsumsi dan distribusi, bukan produksi. Sementara itu, Kutai Kartanegara tetap menjadi kabupaten dengan produksi padi tertinggi di provinsi ini, meskipun produksinya mengalami sedikit penurunan dari 144.048,5 ton pada tahun 2018 menjadi 106.411,09 ton pada tahun 2023. Produksi padi di kabupaten ini mengalami tren penurunan yang stabil, mencerminkan kebutuhan untuk strategi peningkatan produksi yang lebih baik. Kutai Timur dan Berau juga menunjukkan penurunan dalam produksi padi. Di Kutai Timur, produksi padi turun dari 12.850,97 ton pada tahun 2018 menjadi 10.777,38 ton pada tahun 2023, sedangkan Berau mengalami penurunan dari 19.422,59 ton menjadi 20.274,04 ton dalam periode yang sama. Di sisi lain, Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi tetapi umumnya mempertahankan tingkat produksi yang lebih tinggi, dari 38.039,29 ton pada tahun 2018 menjadi 44.123,19 ton pada tahun 2023.

Kabupaten Balikpapan, yang sebelumnya tidak memproduksi padi pada tahun 2018, menunjukkan adanya produksi padi kecil pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 419,57 ton pada tahun 2020, tetapi mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Produksi padi di Samarinda dan Bontang juga menunjukkan tren penurunan, dengan Samarinda turun dari 13.933,69 ton pada tahun 2018 menjadi 5.032,70 ton pada tahun 2023, sementara Bontang berkurang dari 185,1 ton menjadi 154,86 ton dalam periode yang sama.

Produksi Hortikultura Kalimantan Timur

Data pada tabel menunjukkan perkembangan produksi berbagai jenis sayuran semusim di Kalimantan Timur selama periode 2021 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa sebagian besar komoditas mengalami fluktuasi, dengan beberapa jenis sayuran menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sementara yang lain cenderung stabil atau menurun. Jika kita lihat komoditas bawang. Produksi bawang daun meningkat dari 4.262 kuintal pada 2021 menjadi 6.762,83 kuintal di 2023, sebelum turun sedikit menjadi 4.865,36 kuintal di 2024. Bawang merah menunjukkan lonjakan besar, dari 724 kuintal di 2021 menjadi 3.340,55 kuintal di 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan minat petani terhadap komoditas ini, mungkin karena harga jual yang menarik. Bawang putih juga mengalami kenaikan signifikan, dari 53,34 kuintal di 2021 menjadi 45.080,03 kuintal di 2024, meskipun sempat turun di 2022.

Sedangkan untuk produksi sayuran jenis cabai menunjukkan pola yang menarik. Cabai besar/TW/Teropong justru menurun drastis, dari 31,56 kuintal di 2021 menjadi hanya 8.615,48 kuintal di 2024. Sebaliknya, cabai keriting dan cabai rawit tetap menjadi komoditas unggulan dengan produksi puluhan ribu kuintal. Cabai keriting naik dari 27.604 kuintal di 2021 menjadi 35.797,29 kuintal di 2024, sedangkan cabai rawit mencapai 60.583,26 kuintal di 2024. Ini menunjukkan bahwa cabai rawit masih menjadi pilihan utama petani karena permintaan pasar yang tinggi.

Untuk komoditas daun dan sayuran hijau seperti kangkung, kacang panjang, dan petsai/sawi juga menunjukkan tren positif. Produksi kangkung yang semula 123.308 kuintal di 2021 sedikit menurun menjadi 83.824,84 kuintal di 2024, tetapi tetap menjadi salah satu komoditas dengan volume terbesar. Kacang panjang meningkat dari 94.756 kuintal di 2022 menjadi 52.034,40 kuintal di 2024, meskipun sempat turun di 2023. Petsai/sawi mengalami lonjakan besar, dari 69.146 kuintal di 2021 menjadi 75.757,86 kuintal di 2024, menandakan komoditas ini semakin diminati. Keempat, komoditas buah seperti melon, semangka, dan tomat juga menarik untuk dianalisis. Produksi

Tabel 13.2 Produksi Sayur-sayuran Semusim, 2021-2024

Jenis Sayur sayuran	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Produksi Bawang Daun (kuintal)	4.262	4.785	6.762,83	4.865,36
Produksi Bawang Merah (kuintal)	724	1.145	2.521,90	3.340,55
Produksi Bayam (kuintal)	53.340	49.297	47.425,23	45.080,03
Produksi Buncis (kuintal)	52.387	55.464	44.024,65	27.302,26
Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal)	31.560	20.826	11.827,15	8.615,48
Produksi Cabai Keriting (kuintal)	27.604	36.498	36.473,39	35.797,29
Produksi Cabai Rawit (kuintal)	83.671	77.779	74.704,45	60.583,26
Produksi Jamur Tiram (kilogram)	548	1.670	2.943,88	
Produksi Kacang Panjang (kuintal)	96.907	94.756	67.468,92	52.034,40
Produksi Kangkung (kuintal)	123.308	110.258	93.937,94	83.824,84
Produksi Kembang Kol (kuintal)	1.197	1.245	1.624,95	1.076,28
Produksi Ketimun (kuintal)	122.480	119.111	105.926,43	88.165,61
Produksi Kubis (kuintal)	40	23	43,5	51,6
Produksi Labu Siam (kuintal)	1.191	3.235	1.847,00	2.816,00
Produksi Melon (kuintal)	4.676	4.698	...	7.851,15
Produksi Petsai/Sawi (kuintal)	69.146	84.927	70.855,73	55.737,86
Produksi Semangka (kuintal)	40.473	36.648	...	101.157,17
Produksi Terung (kuintal)	108.095	122.700	94.196,06	82.643,00
Produksi Tomat (kuintal)	91.010	88.409	69.289,61	62.948,43

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

melon naik dari 4.676 kuintal di 2021 menjadi 7.851,15 kuintal di 2024. Semangka mengalami peningkatan signifikan, dari 40.473 kuintal di 2021 menjadi 101.157,17 kuintal di 2024. Tomat, meskipun sempat mencapai 91 kuintal di 2021, melonjak drastis menjadi 62.948,43 kuintal di 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya pergeseran pola tanam ke komoditas yang memiliki nilai jual tinggi dan permintaan pasar yang stabil. Sedangkan komoditas kentang dan ketimun juga menunjukkan tren positif. Kentang naik dari 122,48 kuintal di 2021 menjadi 105.926,43 kuintal di 2023, meskipun sedikit turun di 2024. Ketimun stabil di kisaran 119.111 kuintal di 2022 dan 105.926,43 kuintal di 2023, menandakan komoditas ini tetap menjadi pilihan utama petani.

Data pada tabel 13.3 menunjukkan perkembangan produksi berbagai jenis buah-buahan di Kalimantan Timur selama periode 2021 hingga 2024. Secara umum, produksi buah-buahan di provinsi ini mengalami fluktuasi, namun sebagian besar komoditas menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan potensi besar sektor hortikultura di Kalimantan Timur yang terus berkembang. Pada komoditas alpukat tercatat produksi alpukat meningkat dari 6.728,30 kuintal pada 2021 menjadi 10.765,82 kuintal pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan bahwa alpukat semakin diminati, baik oleh petani maupun konsumen, karena nilai jualnya yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Buah naga juga mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari 120.348 kuintal di 2021 menjadi 89.460,82 kuintal di 2024, meskipun sempat mencapai puncak di 2023 dengan 83.385,25 kuintal.

Tabel 13.3 Produksi Buah-Buahan Tahunan, 2021-2024

Jenis sayur dan buah	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alpukat/Avocado	6.728,30	6.384,34	10.424,31	10.765,82
Anggur/Grape	-	-	14,52	66,00
Apel/Apple	-	-	-	-
Belimbing/Star Fruit	9.484,72	12.674,46	21.654,71	11.652,95
Buah Naga/Dragon Fruit	120.348,14	127.191,37	33.375,41	246.829,38
Duku/Langsar/Kokosan	36.048,08	39.983,77	83.585,28	49.840,66
Durian	134.395,51	87.727,88	208.205,05	108.560,25
Jambu Air/Water Apple	13.604,98	12.285,18	19.558,35	28.257,76
Jambu Biji/Guava	21.403,13	14.660,44	20.293,10	83.955,73
Jeruk Pamelor/Pomelo	2.915,53	2.047,14	2.458,40	1.866,74
Jeruk Lemon/Lemon	1.554,99	2.758,21	5.815,92	9.048,50
Jeruk Siam/Keprok/Orange/ Tangerine	113.006,30	77.552,06	83.955,31	75.665,79
Lengkeng/Longan	6.061,64	15.895,69	20.001,46	25.946,06
Mangga/Mango	51.315,94	30.102,88	47.579,56	76.049,63
Manggis/Mangosteen	1.308,05	3.415,74	4.697,61	4.643,01
Nenas/Pineapple	551.708,51	366.411,41	248.670,57	710.531,76
Nangka/Cempedak/Jackfruit	328.185,98	83.644,03	118.343,60	256.381,91
Pepaya/Papaya	240.679,54	136.740,98	294.421,27	334.933,83
Pisang/Banana	1.306.561,44	1.275.624,65	1.561.317,45	1.946.515,21
Rambutan/Rambutan	113.286,95	107.026,38	163.344,24	143.504,08
Salak/Snakefruit	75.080,92	68.413,83	67.559,27	240.465,13
Sawo/Sapodilla/Sawo	18.088,02	13.522,07	15.186,30	22.431,78
Sirsak/Soursop	10.455,17	8.285,65	7.761,82	11.679,68
Sukun/Breadfruit	18.959,88	10.277,48	13.571,70	36.724,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Sedangkan komoditas belimbing naik dari 9.484,72 kuintal di 2021 menjadi 11.652,95 kuintal di 2024. Sementara itu, kelapa tetap menjadi salah satu komoditas unggulan dengan produksi mencapai 40.896,82 kuintal di 2024, naik dari 36.048,98 kuintal di 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kelapa masih menjadi andalan petani karena manfaatnya yang beragam. Ketiga, buah jeruk menunjukkan variasi yang cukup besar. Jeruk pamelon mengalami penurunan dari 2.915,53 kuintal di 2021 menjadi 1.864,79 kuintal di 2024. Sebaliknya, jeruk siam justru melonjak tajam dari 115.000 kuintal di 2021 menjadi 94.548,79 kuintal di 2024, meskipun sempat mencapai 93.855,04 kuintal di 2023.

Jeruk lemon juga menunjukkan tren positif, dari 1.554,99 kuintal di 2021 menjadi 1.986,75 kuintal di 2024. Sedangkan komoditas mangga dan rambutan juga mengalami peningkatan. Produksi mangga naik dari 5.135,94 kuintal di 2021 menjadi 6.049,49 kuintal di 2024. Rambutan bahkan mencatat lonjakan besar, dari 115.000 kuintal di 2021 menjadi 143.505,43 kuintal di 2024. Hal ini menandakan bahwa buah-buahan tropis seperti rambutan masih menjadi favorit di Kalimantan Timur. Komoditas nenas dan pepaya juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Produksi nenas meningkat dari 551.708 kuintal di 2021 menjadi 750.531,91 kuintal di 2024, menjadikannya salah satu komoditas dengan volume terbesar. Pepaya juga naik dari 254.598 kuintal di 2021 menjadi 334.933,54 kuintal di 2024. Kedua komoditas ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk pasar lokal maupun ekspor.

Selain itu, pisang tetap menjadi komoditas unggulan dengan produksi mencapai 1.344.353,94 kuintal di 2024, naik dari 1.106.564,71 kuintal di 2021. Pisang menjadi buah yang paling banyak diproduksi karena permintaan yang tinggi dan kemudahan dalam budidaya. Komoditas lain seperti sawo, sirih, dan sukun juga menunjukkan tren positif, meskipun volumenya lebih kecil dibandingkan pisang dan nenas.

Jika kita lihat dari komoditas tanaman perkebunan kabupaten/kota secara umum, komoditas kelapa sawit mendominasi produksi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti oleh karet, kelapa, dan beberapa komoditas lain seperti kopi, kakao, tebu, tembakau, dan lada. Pertama, kelapa sawit menjadi komoditas unggulan dengan total produksi mencapai 18.667.978 ton. Kabupaten Kutai Timur mencatat produksi tertinggi, yaitu 3.759.931 ton, disusul Kutai Kartanegara dengan 3.446.893 ton, dan Paser dengan 2.762.937 ton. Penajam Paser Utara juga berkontribusi besar dengan 2.785.000 ton. Dominasi kelapa sawit ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan di Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada komoditas ini, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Komoditas kelapa menempati posisi berikutnya dengan total produksi 7.843 ton. Produksi terbesar berasal dari Kutai Kartanegara (2.619 ton) dan Berau (1.002 ton). Meskipun volumenya jauh lebih kecil dibanding kelapa sawit, kelapa tetap menjadi komoditas penting karena digunakan untuk berbagai produk turunan seperti minyak kelapa dan bahan pangan. Ketiga, karet menjadi komoditas yang cukup signifikan dengan total produksi 73.580 ton. Kutai

Kartanegara kembali mendominasi dengan 20.729 ton, diikuti Kutai Timur (15.557 ton) dan Paser (9.705 ton). Produksi karet yang cukup besar ini menunjukkan potensi pengembangan industri berbasis karet di Kalimantan Timur, seperti ban dan produk olahan lainnya. Keempat, komoditas kopi dan kakao memiliki produksi yang relatif kecil. Kopi hanya mencapai 170 ton secara total, dengan kontribusi terbesar dari Kutai Timur (59 ton) dan Kutai Kartanegara (21 ton). Kakao sedikit lebih tinggi dengan total 2.543 ton, didominasi oleh Kutai Timur (1.456 ton) dan Penajam Paser Utara (725 ton). Meskipun volumenya kecil, kedua komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi dikembangkan untuk pasar premium.

Komoditas tebu, tembakau, dan lada memiliki produksi yang sangat terbatas. Tebu hanya tercatat 0,25 ton, sedangkan tembakau tidak ada produksi sama sekali. Lada memiliki total produksi 5.080 ton, dengan kontribusi terbesar dari Kutai Kartanegara (2.961 ton) dan Berau (1.240 ton). Lada merupakan komoditas ekspor yang bernilai tinggi, sehingga meskipun produksinya kecil, tetap memiliki prospek yang menjanjikan. Jika dilihat dari distribusi antarwilayah, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara menjadi pusat produksi perkebunan terbesar di Kalimantan Timur. Kedua daerah ini memiliki lahan yang luas dan infrastruktur

Tabel 13.4 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota (ton) di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh.	Tem- bakau	Lada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paser	2.762.937	622	9.705	54	6	-	-	-	18
Kutai Barat	1.233.000	218	35.107	28	21	-	-	-	6
Kutai Kartanegara	3.446.893	2.619	20.729	16	41	-	-	-	2.961
Kutai Timur	7.759.931	679	1.557	59	1.456	-	-	-	156
Penajam Paser Utara	2.785.000	1.794	100	9	725	-	-	-	556
Berau	585.377	1.022	2.157	1	1	-	-	-	1.240
Mahakam Ulu	78.485	4	-	-	289	0	-	-	-
Samarinda	250	562	3.626	3	1	-	-	-	127
Balikpapan	15.371	306	599	-	3	-	-	-	16
Bontang	734	17	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	18.667.978	7.843	73.580	170	2.543	0,25	-	-	5.080

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

yang mendukung pengembangan perkebunan. Paser dan Penajam Paser Utara juga berperan penting, terutama dalam produksi kelapa sawit. Sebaliknya, daerah seperti Mahakam Ulu dan Balikpapan memiliki kontribusi yang relatif kecil, kemungkinan karena keterbatasan lahan dan fokus pada sektor lain. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur perkebunan di Kalimantan Timur masih didominasi oleh kelapa sawit, yang menyumbang lebih dari 90% total produksi. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu komoditas dapat menjadi risiko jika terjadi fluktuasi harga global

atau isu lingkungan. Oleh karena itu, diversifikasi komoditas perkebunan seperti karet, kelapa, kopi, dan kakao perlu didorong untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ke depan, peluang pengembangan perkebunan di Kalimantan Timur sangat besar. Pemerintah daerah perlu mendorong inovasi teknologi, penguatan rantai pasok, dan akses pasar untuk komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, dan lada. Selain itu, perhatian terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan harus menjadi prioritas agar pengembangan perkebunan tidak merusak ekosistem. Jika langkah ini dilakukan, Kalimantan Timur dapat menjadi pusat perkebunan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

Peternakan Kalimantan Timur

Secara umum, komoditas daging ayam pedaging mendominasi produksi, diikuti oleh daging sapi, telur ayam petelur, dan telur ayam buras. Komoditas lain seperti daging babi, domba, dan kambing memiliki kontribusi yang lebih kecil, namun tetap penting untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Pertama, daging ayam pedaging menjadi komoditas unggulan dengan total produksi mencapai 57.150,18 ton. Produksi terbesar berasal dari Kota Samarinda dengan 14.946,29 ton, diikuti Balikpapan (12.351,3 ton) dan Kutai Timur (3.597,75 ton). Tingginya produksi ayam pedaging di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan menunjukkan tingginya permintaan masyarakat perkotaan terhadap daging ayam, yang merupakan sumber protein utama dan relatif terjangkau. Daging sapi menempati posisi berikutnya dengan total produksi 7.836,42 ton. Produksi tertinggi berasal dari Samarinda (1.700,55 ton) dan Kutai Timur (766,15 ton), diikuti Balikpapan (1.149,55

Tabel 13.5 Produksi Daging dan Telur dari Beberapa Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2024 (Ton)

Kabupaten/Kota	Daging Ayam Pedaging	Daging Babi	Daging Domba	Daging Kambing	Daging Sapi	Telur Ayam Buras	Telur Ayam Petelur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	2.653,23	87,07	0,56	36,33	1.020,96	1.163,96	106,36
Kutai Barat	2.434,67	556,38	-	38,99	298,88	138,83	177,78
Kutai Kartanegara	14.126,97	38,33	-	89,38	870,1	260,67	3.062,26
Kutai Timur	3.597,75	383,78	-	54,18	766,15	438,69	767,62
Berau	1.707,75	263,77	0,72	93,7	705,49	144,02	1.963,36
Penajam Paser Utara	1.721,72	7,96	-	23,98	599,5	292,47	360,5
Mahakam Ulu	71,43	49,06	-	0,95	17,38	40,14	-
Balikpapan	12.351,3	68,45	0,65	217,94	1.149,55	65,28	824,2
Samarinda	14.946,29	199,56	0,78	209,57	1.700,55	710,49	3.071,01
Bontang	3.539,08	445,3	-	97,31	707,86	65,74	-
Kalimantan Timur	57.150,18	2.099,67	2,70	862,33	7.836,42	3.320,27	10.333,07

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

ton). Daging sapi memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu komoditas penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani, terutama untuk acara adat dan konsumsi harian. Ketiga, daging babi mencatat total produksi 2.099,67 ton, dengan kontribusi terbesar dari Kutai Barat (556,38 ton) dan Bontang (445,3 ton). Meskipun produksinya lebih kecil dibanding daging ayam dan sapi, daging babi tetap menjadi komoditas penting bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Timur.

Daging domba dan kambing memiliki produksi yang relatif kecil, masing-masing 2,70 ton dan 862,33 ton, namun tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan khusus, terutama saat perayaan keagamaan. Keempat, produksi telur juga menjadi indikator penting dalam data ini. Telur ayam petelur mendominasi dengan total produksi 10.333,07 ton, sedangkan telur ayam buras mencapai 3.320,27 ton. Produksi telur ayam petelur terbesar berasal dari Samarinda (3.071,01 ton) dan Balikpapan (824,2 ton). Tingginya produksi telur menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur di Kalimantan Timur cukup berkembang, mengingat telur merupakan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika dilihat dari distribusi antarwilayah, Samarinda dan Balikpapan menjadi pusat produksi terbesar untuk daging ayam pedaging, daging sapi, dan telur ayam petelur. Hal ini wajar mengingat kedua kota tersebut merupakan pusat ekonomi dan memiliki populasi yang padat. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara juga berperan penting, terutama dalam produksi daging sapi dan ayam pedaging. Sebaliknya, daerah seperti Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara memiliki kontribusi yang lebih kecil, kemungkinan karena keterbatasan lahan dan populasi ternak.

Ketahanan Pangan Kalimantan Timur

Data yang ditampilkan pada tabel 13.8 memberikan gambaran tentang pola pengeluaran per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024, yang dibedakan menurut kelompok komoditas dan daerah tempat tinggal (kota dan desa). Analisis ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan, serta perbedaan pola konsumsi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pertama, jika dilihat dari total pengeluaran, masyarakat kota mengalokasikan sekitar 43,21% untuk kebutuhan makanan dan 56,79% untuk kebutuhan bukan makanan. Sebaliknya, masyarakat desa mengalokasikan 51,54% untuk makanan dan 48,46% untuk bukan makanan. Secara keseluruhan, rata-rata provinsi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan mencapai 45,33%, sedangkan bukan makanan sebesar 54,67%.

Perbedaan ini mencerminkan bahwa masyarakat kota cenderung menghabiskan lebih banyak untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, transportasi, dan jasa, sementara masyarakat desa masih lebih fokus pada pengeluaran untuk bahan pangan. Kedua, jika dianalisis lebih detail, kelompok makanan yang paling besar menyerap pengeluaran adalah padi-

padian, terutama beras, dengan persentase 3,99% di kota dan 6,07% di desa. Hal ini wajar mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, pengeluaran untuk ikan, udang, cumi, dan kerang juga cukup tinggi, yaitu 4,39% di kota dan 5,62% di desa. Ini menunjukkan bahwa protein hewani dari hasil laut masih menjadi pilihan utama, terutama di daerah pedesaan yang dekat dengan sumber daya perikanan. Komoditas daging menempati posisi berikutnya dengan pengeluaran 2,35% di kota dan 2,88% di desa. Sementara itu, telur dan susu menyerap sekitar 2,44% di kota dan 2,28% di desa. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga memiliki kontribusi yang cukup besar, masing-masing sekitar 0,73% dan 2,77% di kota, serta 0,93% dan 3,07% di desa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat desa cenderung mengonsumsi lebih banyak buah-buahan, mungkin karena akses yang lebih mudah ke sumber produksi lokal. Ketiga, pengeluaran untuk bahan bukan makanan didominasi oleh perumahan dan fasilitas rumah tangga,

Tabel 13.6 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (rupiah), 2024

Kelompok Komoditas Makanan	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Padi-padian	3,99	6,07	4,52
Umbi-umbian	0,34	0,43	0,36
Ikan/udang/cumi/kerang	4,39	5,62	4,71
Daging	2,35	2,88	2,49
Telur dan susu	2,44	2,33	2,41
Sayur-sayuran	3,03	4,03	3,29
Kacang-kacangan	0,77	0,93	0,81
Buah-buahan	2,59	3,07	2,71
Minyak dan kelapa	0,86	1,21	0,95
Bahan minuman	0,96	1,52	1,1
Bumbu-bumbuan	0,83	1,22	0,93
Konsumsi lainnya	0,78	1,1	0,86
Makanan dan minuman jadi	15,8	14	15,34
Rokok	4,08	7,13	4,85
Jumlah makanan/	43,21	51,54	45,33
Bukan makanan			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	30,74	26,54	29,67
Aneka barang dan jasa	12,46	9,49	11,71
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,22	2,11	2,19
Barang tahan lama	4,81	5,53	4,99
Pajak, pungutan, dan asuransi	4,4	3,26	4,11
Keperluan pesta dan upacara	2,17	1,54	2,01
Jumlah bukan makanan	56,79	48,46	54,67
Jumlah	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

yang mencapai 30,74% di kota dan 26,54% di desa. Ini menunjukkan bahwa biaya tempat tinggal menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran rumah tangga, terutama di perkotaan. Selain itu, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa juga cukup besar, yaitu 12,46% di kota dan 9,54% di desa. Komponen lain seperti pakaian, alas kaki, dan tutup kepala menyerap sekitar 2,22% di kota dan 2,11% di desa, sedangkan pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi mencapai 4,74% di kota dan 2,71% di desa. Menariknya, pengeluaran untuk rokok cukup tinggi di desa, yaitu 7,13%, dibandingkan 4,08% di kota. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perilaku konsumsi antara masyarakat kota dan desa, di mana rokok masih menjadi pengeluaran signifikan di pedesaan. Sementara itu, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi lebih tinggi di kota (15,8%) dibanding desa (11%), mencerminkan gaya hidup masyarakat perkotaan yang lebih sering membeli makanan siap saji.

Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran dalam rupiah, pola ini semakin jelas. Masyarakat kota mengeluarkan lebih banyak untuk kategori bukan makanan, terutama perumahan dan jasa, sedangkan masyarakat desa lebih banyak mengalokasikan untuk bahan pangan seperti beras, ikan, dan buah-buahan. Perbedaan ini mencerminkan tingkat pendapatan dan gaya hidup yang berbeda antara kedua wilayah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pola pengeluaran masyarakat Kalimantan Timur masih didominasi oleh kebutuhan dasar, baik makanan maupun perumahan. Namun, perbedaan antara kota dan desa cukup mencolok. Masyarakat kota lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan, sedangkan masyarakat desa masih fokus pada bahan pangan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan ekonomi dan akses terhadap barang dan jasa di perkotaan lebih maju dibanding pedesaan. Ke depan, informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, program pengendalian harga bahan pangan di desa, atau pengembangan fasilitas perumahan yang terjangkau di kota. Selain itu, edukasi tentang pola konsumsi sehat juga penting, mengingat pengeluaran untuk rokok masih cukup tinggi di pedesaan. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dapat meningkat secara merata, baik di kota maupun desa..

Tabel 13.7 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kelompok Komoditas Makanan	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Padi-padian	3,99	6,07	4,52
Umbi-umbian	0,34	0,43	0,36
Ikan/udang/cumi/kerang	4,39	5,62	4,71
Daging	2,35	2,88	2,49
Telur dan susu	2,44	2,33	2,41
Sayur-sayuran	3,03	4,03	3,29
Kacang-kacangan	0,77	0,93	0,81
Buah-buahan	2,59	3,07	2,71
Minyak dan kelapa	0,86	1,21	0,95
Bahan minuman	0,96	1,52	1,1
Bumbu-bumbuan	0,83	1,22	0,93
Konsumsi lainnya	0,78	1,1	0,86
Makanan dan minuman jadi	15,8	14	15,34
Rokok	4,08	7,13	4,85
Jumlah makanan/	43,21	51,54	45,33
Bukan makanan			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	30,74	26,54	29,67
Aneka barang dan jasa	12,46	9,49	11,71
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,22	2,11	2,19
Barang tahan lama	4,81	5,53	4,99
Pajak, pungutan, dan asuransi	4,4	3,26	4,11
Keperluan pesta dan upacara	2,17	1,54	2,01
Jumlah bukan makanan	56,79	48,46	54,67
Jumlah	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

PENUTUP





XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX



Penutup

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 3,85 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 4,12 juta jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, urbanisasi, serta pengembangan wilayah. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit akibat kondisi geografisnya yang sulit dijangkau. Struktur penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang mencerminkan potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja produktif di masa depan. Jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 1,38 juta dengan dominasi laki-laki mencapai 81 persen, menandakan masih kuatnya peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga.

Dalam bidang pendidikan, sebagian besar penduduk masih berpendidikan dasar, di mana lebih dari satu juta jiwa belum tamat atau hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SD. Meskipun demikian, tren peningkatan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi mulai terlihat, dengan lulusan SLTA mencapai satu juta jiwa dan lulusan perguruan tinggi sekitar 212 ribu jiwa. Perkembangan ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun pemerataan akses pendidikan di wilayah pedalaman masih menjadi tantangan besar.

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja meningkat dari 2,75 juta pada tahun 2020 menjadi 3,03 juta pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menurun dari 71,79 persen menjadi 67,07 persen, menandakan bahwa sebagian penduduk usia produktif tidak aktif di pasar kerja, terutama karena masih bersekolah atau berfokus pada urusan rumah tangga. Meski demikian, jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 1,84 juta menjadi 1,97 juta, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,87 persen menjadi 5,14 persen. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu mencatat tingkat pengangguran terendah, sementara Kota Balikpapan dan Bontang memiliki TPT lebih tinggi akibat fluktuasi industri migas dan manufaktur. Tren ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan vokasi untuk memanfaatkan potensi bonus demografi.

Kondisi kemiskinan di Kalimantan Timur juga mengalami perbaikan yang signifikan. Persentase penduduk miskin menurun secara konsisten dari 6,64 persen pada September 2020 menjadi 5,78 persen pada Maret 2024. Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan mencapai 4,47 persen, sementara di perdesaan masih berada di angka 8,76 persen. Meskipun terjadi kesenjangan antarwilayah, tren penurunan ini menandakan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

juga terus membaik, mencerminkan bahwa penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan antarpenduduk miskin semakin mengecil. Peningkatan ini tidak lepas dari keberhasilan program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur memperlihatkan pencapaian yang membanggakan dengan peningkatan dari 75,83 pada 2018 menjadi 78,83 pada 2024. Nilai ini menempatkan provinsi ini di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Capaian ini menunjukkan peningkatan di tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Harapan hidup mencapai 74,72 tahun, Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 9,99 tahun, dan Harapan Lama Sekolah mencapai 14,03 tahun. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur yang semakin baik dan berdaya saing.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, capaian demokrasi juga menggembirakan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai 86,17 poin atau termasuk kategori baik. Nilai ini menunjukkan kuatnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan peran lembaga demokrasi di provinsi ini. Aspek kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam politik menjadi kekuatan utama, sementara tantangan masih terdapat pada peningkatan efektivitas lembaga perwakilan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam bidang ekonomi makro, inflasi di Kalimantan Timur sepanjang 2024–2025 menunjukkan tren menurun dari 3,29 persen menjadi sekitar 1,6 persen. Kota Samarinda dan Balikpapan menjadi acuan utama penghitungan inflasi. Penurunan ini dipengaruhi oleh kestabilan pasokan bahan pokok, koordinasi TPID dengan Bank Indonesia, serta efisiensi distribusi. Namun, harga pangan tetap menjadi potensi risiko terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai rata-rata 5,2 persen pada 2024. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi motor utama, disusul industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa transportasi. Meskipun struktur ekonomi masih didominasi sektor migas, terjadi diversifikasi menuju sektor nonmigas, terutama jasa dan konstruksi yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investasi juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, total investasi di Kalimantan Timur mencapai lebih dari Rp60 triliun. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Balikpapan menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar. Pemerintah daerah terus berupaya menarik investor baru dan mendorong pemerataan investasi ke daerah seperti Berau dan Mahakam Ulu melalui insentif dan kemudahan perizinan.

Selain itu, sektor ekspor tetap menjadi tulang punggung ekonomi dengan komoditas unggulan seperti batu bara, migas, dan hasil tambang lainnya. Nilai ekspor mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun dengan mitra utama Tiongkok, India, dan Jepang. Surplus perdagangan yang tinggi menjadi indikator kuatnya daya saing ekonomi daerah, meski pemerintah kini mulai mendorong diversifikasi ekspor nonmigas untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.

Kalimantan Timur juga menunjukkan pemulihan signifikan di sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara meningkat tajam sejak 2022 dengan destinasi unggulan seperti Derawan, Bukit Bangkirai, dan pesisir Balikpapan. Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, transportasi, dan konektivitas juga terus ditingkatkan melalui proyek strategis seperti tol Samarinda-Balikpapan, pelabuhan Kariangau, serta pengembangan Bandara APT Pranoto.

Disisilain, pemerintah berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperluas rehabilitasi lahan bekas tambang, mendorong energi terbarukan, dan mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam sektor pertanian, luas lahan baku sawah mencapai 41.406 hektare dengan produksi padi sekitar 215 ribu ton pada 2023. Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao tetap menjadi andalan, disertai peningkatan produksi peternakan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Secara keseluruhan, Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan pesat dalam berbagai bidang pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, serta stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi kuat bagi transformasi menuju provinsi maju. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten dan kota. Dengan dukungan semua pihak dan momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur siap menjadi lokomotif kemajuan Indonesia di masa depan.



Jl. Basuki Rahmat No. 41 Sungai Pinang Luar,
Kec Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75121